



# ISU MINYAK DALAM INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK PADA TAHUN 2003

## SKRIPSI



Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Asal:	Hadiah	Klass 327.730.67 NUR i e,
Terima di:	Pembelian 03 FEB 2004	
No. induk:		
Pengkatang:		

AMERIKA SERIKAT - HUBUNGAN LAMBAHAN  
- IRPK.

Oleh :

**Vivin Ulfiah Nurarika**  
990910101068

Pembimbing :  
**Drs. Pra Adi Sulistyono**  
NIP: 131759534

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2003**

## LEMBAR PERNYATAAN

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua bahan yang dipergunakan dalam penulisan ini berasal dari sumber-sumber yang sah dan diketahui.

Jember, 15 Oktober 2003  
Penulis



LEMBAR PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan oleh Panitia Penguji Skripsi  
Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Pogram Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
Pada :

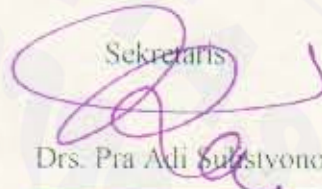
Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Oktober 2003  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi Prodi HI

Panitia Penguji

Ketua  


Drs. M. Nur Hasan, Mhum

NIP. 131658013

Sekretaris  


Drs. Pra Adi Sulistyono

NIP. 131759534

Anggota Tim Penguji,

1. Drs. M. Nur Hasan, Mhum  
NIP. 131658013

2. Drs. Pra Adi Sulistyono  
NIP. 131759534

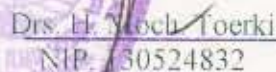
3. Drs. H. Nuruddin M. Yasin  
NIP. 130518486

4. Drs. Sunardi P., MIS  
NIP. 131325932



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember



  
Drs. H. Yoch Toerki  
NIP. 130524832

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya ini untuk:*

♥ *Bapak dan Ibu yang selalu mengiringi langkahku*

*dengan do'a dan restunya*

♥ *Adik-adikku yang turut serta membantu dan memberi*

*motivasi. Semoga kalian dapat meraih apa*

*yang dicita-citakan*

MOTTO

...ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا اما بانفسهم ... {الرعد: ١١}

“...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”

(QS. Ar Ra'd : 11)\*

---

\* Al Quran dan Terjemahannya, PT Intermedia, 1992, Hal. 370

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur terucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Isu Minyak dalam Invasi AS ke Irak pada Tahun 2003”. Karya ini merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan studi tingkat Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Selama dalam penulisan karya ini, tidak jarang penulis mengalami kesulitan-kesulitan, namun puji syukur pada Allah SWT, karena banyak bantuan yang tak ternilai dari berbagai pihak baik moril maupun spiritual, fasilitas dan bimbingan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Pra Adi Sulistyono, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Nuruddin M. Yasin, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan FISIP Universitas Jember
4. Bapak Drs. AbuBakar Eby Hara, MA, PhD selaku dosen wali penulis, serta segenap civitas akademika di lingkungan FISIP Universitas Jember yang telah membantu penulis sehingga proses belajar dan penyusunan skripsi ini berjalan lancar.
5. Seluruh staf dan karyawan di institusi tempat penelitian penulis, yaitu perpustakaan FISIP dan Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang dengan ketulusannya selalu memberi perhatian, semangat dan dorongan baik moril, material maupun spiritual kepada penulis. Semoga jasa-jasa yang begitu besar ini bias menempatkann Bapak dan Ibu dalam posisi orang-orang yang dicintai dan dimuliakan Allah SWT.
7. Buat orang-orang yang sangat kuhormati : Ibu Mutrofin, Bu Lilik, Pak Nur hasan, Pak Joko Susilo, Mas Chanif, Mbak Ririn, Om Saiful Arif, Tante Ana

- Mardiana. Bantuan, perhatian, dukungan dan do'a anda semua jualah yang telah menghantarkan kesuksesan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat adik-adikku : Andika Robbi NurYasin, Aulia Meirdhania, Riska Nur Rahmattillah, Iqbal Amar Fauzi. Kalian adalah sumber inspirasi dan motivasiku.
  9. Untuk Sahabat sejatiku, Rahmatus Sa'adah semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menjadi bagian dalam hidupmu.
  10. Buat komunitas HI. Buat anak-anak HI'99 : Titik, Putri, Farida, Tanti, Ika, Rika, Titis, Evi, Nur Afni, Ani, Futi, dll. Thanks a lot for everything that you have given to me. Kebersamaan dengan kalian akan menjadi memori yang takkan terlupakan. Buat Adik Tingkat : Dhek Eka, Erma, Iin, Mahe Arin, Meilia, Arik. Terima kasih atas bantuan data-data dan do'anya. Buat Kakak Tingkat : Mbak Rina, Mas Nurani dan Mas Gilig. Terima kasih atas kontribusi pemikirannya.
  11. Buat saudara-saudaraku di BKPTI dan CSIC Jember : Mbak Dewi, Mbak Ulfa, Mbak Evi, Mbak Rini, Tuti, Vitri, Lilis, Eni, Kholifah, Naneng, dll. Kalian adalah saudara-saudaraku yang terbaik, kalian pula yang telah membuat hidupku terasa begitu bermakna dan membahagiakan.
  12. Buat pimpinan LBB Smart Jember, Bpk. Samsul Huda terima kasih atas toleransi dan dukungannya. Buat adik-adik Bimbel LBB Smart Jember, gelak canda tawa dan keceriaan kalian begitu menghibur dan membesarkan hatiku.
  13. Buat pemilik rental Kenanga dan penjilidan YudhiSakti Jember, terima kasih atas pelayanannya yang sangat baik
  14. Seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan khususnya bagi pengembangan Ilmu Hubungan Internasional.

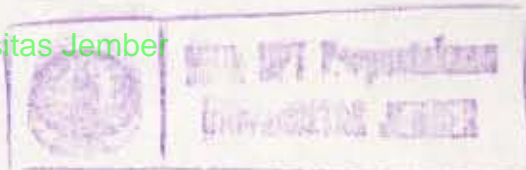
Jember, 10 Oktober

2003

Penulis







## DAFTAR ISI

	Halaman :
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan .....	9
1.3 Permasalahan .....	10
1.4 Kerangka Konsep dan Teori .....	11
1.5 Hipotesa .....	16
1.6 Metode Penelitian .....	16
1.7 Pendekatan .....	17
<b>BAB II KONDISI KEKAYAAN ALAM IRAK DAN POSISI IRAK DI KAWASAN TIMUR TENGAH</b>	
2.1 Gambaran Umum Irak .....	21
2.1.1 Kekayaan Sumber Daya Alam Irak .....	22
2.1.2 Produksi dan Distribusi Aliran Minyak Irak .....	25
2.1.3 Pengaruh Minyak terhadap Kondisi Perekonomian Irak .....	27
2.1.4 Pengaruh Minyak terhadap Perekonomian Dunia Terutama Amerika Serikat .....	29
2.2 Arti Penting Kawasan Timur Tengah dan Irak .....	32
2.2.1 Kepentingan Strategis AS atas Kawasan Timur Tengah .....	32
2.2.2 Posisi Irak di Timur Tengah .....	34
2.2.2.1 Ambisi Irak untuk menjadi pemimpin di kawasan Timur Tengah .....	34
2.2.2.2 Peranan Irak di OPEC .....	40

<b>BAB III</b>	<b>POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT</b>	
3.1	Sejarah Hubungan AS-Irak .....	44
3.2	Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Irak.....	51
3.3	Proses Perumusan Kebijakan Politik Luar Negeri AS .....	52
3.4	Pengaruh Lobi Yahudi dalam Pembuatan Politik Luar Negeri AS .....	55
3.5	Pengaruh Kelompok Kepentingan Bisnis dan Kelompok Militer di dalam Pemerintahan AS .....	65
3.6	AS di Bawah Pemerintahan G.W. Bush .....	69
<b>BAB IV</b>	<b>ANCAMAN KRISIS ENERGI (MINYAK) DAN KRISIS EKONOMI AS DI MASA PEMERINTAHAN G.W. BUSH DAN IMPLIKASINYA BAGI IRAK</b>	
4.1	Ancaman Krisis Energi (Minyak) AS di Masa George W. Bush .....	72
4.2	Krisis Ekonomi AS di Masa G.W. Bush .....	74
4.3	Implikasi Krisis Energi dan Krisis Ekonomi AS terhadap Irak .....	78
<b>BAB V</b>	<b>AGENDA AS DIBALIK INVASI AS KE IRAK</b>	
	Kepentingan untuk menguasai industri minyak dunia dan keinginan menjadi kekuatan hegemon di kawasan Timteng .....	83
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN</b> .....	92

**DAFTAR PUSTAKA**

**Lampiran-lampiran**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Faktor minyak selalu menjadi isu sentral dan senantiasa menjadi salah satu pemicu (trigger) konflik di Timur Tengah, tak terkecuali dalam konflik Amerika Serikat-Irak saat ini. Ketergantungan Amerika Serikat pada suplai minyak Timur Tengah telah menghasilkan suatu kebijakan tentang strategi pengadaan energi Amerika Serikat.<sup>1</sup> Tujuan strateginya adalah guna terjaminnya persediaan minyak hingga pada tingkat yang tidak mengancam keamanan nasional dan ekonomi Amerika Serikat. Praktis, kebijakan ini lalu diaktualisasikan lewat *action-action* yang seringkali menyulut konflik antara Amerika Serikat dengan produsen minyak tersebut.

Irak adalah negara yang memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia.<sup>2</sup> Cadangan minyak Irak diketahui secara pasti sebesar 112 miliar barel, dan kemungkinan Irak masih memiliki 220 miliar barel belum lagi ditambah dengan sejumlah cadangan minyak mentah yang belum dieksplorasi. Yang kemungkinan jumlahnya sangat besar dan melebihi jumlah cadangan minyak yang selama ini diketahui. Selain cadangan minyaknya yang melimpah, biaya produksi minyak mentah Irak sangat rendah. Kedua hal inilah yang membuat kalangan perusahaan minyak internasional menaruh minat dan kepentingan terhadap perusahaan minyak

---

<sup>1</sup> Kompas, 18 Oktober 2002.

<sup>2</sup> Kompas, 28 Nopember 2002.

Irak. Bahkan berdasarkan estimasi berbagai sumber selain dari Elf Aquintance dan Total Fina, besarnya cadangan minyak Irak adalah 25-30% lebih besar bila dibandingkan dengan seluruh cadangan minyak Arab Saudi dengan estimasi 338 miliar barel.<sup>3</sup> Ladang minyak Kaluna saja mempunyai cadangan minyak 40 miliar barel dan Majnoon 30 miliar barel.

Amerika Serikat saat ini mengalami resesi ekonomi dan krisis energi. Ekonomi AS saat ini mengalami resesi yang sangat serius. Selama pemerintahan George W. Bush, pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi 1,2 % pada tahun 2001.<sup>4</sup> Tragedi 11 September makin menghujamkan perekonomian AS. Sektor industri yang paling terpuak adalah sektor penerbangan, jasa perhotelan, serta transportasi. US Airways (terbesar kelima di AS) dan United Airlines (terbesar di dunia) sudah meminta perlindungan lewat *chapter 11* agar terhindar dari kewajiban membayar utang-utang untuk sementara waktu. Maskapai penerbangan AS lainnya, seperti American Airlines dan Delta, kini juga terkena dampaknya. Kini terpaksa dialokasikan dana cadangan sebesar US\$ 7 miliar untuk membantu industri penerbangan AS yang sekarat.

Kepercayaan pebisnis dan konsumen untuk melakukan pembelian makin menurun. Pasalnya, di akhir tahun 2001 muncul kasus Enron (bermarkas di Texas) yang merupakan salah satu skandal terbesar korporasi di AS. Perusahaan yang bergerak di bidang *energy trading* itu mendadak menyatakan diri bangkrut, padahal

---

<sup>3</sup> *Republika*, 5 April 2003.

<sup>4</sup> *Republika*, 13 Maret 2003.

laporan keuangannya selalu berisikan kinerja perusahaan yang sangat bagus di tahun-tahun sebelumnya. Ironisnya, kejatuhan Enron disangkutpautkan dengan Dinasti Bush, yang kebetulan berasal dari Texas dan merupakan Baron Minyak. Publik AS menilai kepemilikan Enron sangat erat kaitannya dengan keluarga Bush. Skandal Enron juga diikuti dengan serentetan skandal korporasi besar lainnya, seperti Qwest, Worldcom, dan Global Crossing.

Kondisi buruk itu memaksa pemerintah AS untuk mengeluarkan paket stimulus ekonomi. Paket itu dijuluki sebagai *growth and jobs*, yang dimaksudkan untuk mendorong pengeluaran konsumen dengan tujuan : (1) mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi, (2) meningkatkan investasi oleh individu dan perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dan (3) memberikan bantuan kepada warga AS yang pengangguran. Caranya, pemerintah Bush merencanakan pengurangan pemungutan pajak (*tax cut*) yang total nilainya sekitar US\$ 670 miliar yang akan direalisasikan selama 10 tahun. Dari jumlah itu, sebesar US\$ 98 miliar pengurangan pajak akan direalisasikan dalam 16 bulan ke depan sejak Januari 2003.<sup>5</sup>

Kebijakan stimulus ekonomi ini akan menyebabkan defisit anggaran pemerintah AS menjadi semakin meningkat. Pada tahun anggaran 2002, yang berakhir 30 September, anggaran AS mengalami defisit US\$ 157,67 miliar. Sedangkan pada tahun 2003 ini, Gedung Putih memproyeksikan defisit anggaran

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

sekitar US\$ 109 miliar, tapi kalangan pengusaha justru memperkirakan defisit US\$ 200 miliar, atau bahkan akan melampaui rekor defisit sebesar US\$ 300 miliar.<sup>6</sup>

Sedangkan ancaman krisis energi AS ditengarai dengan menipisnya persediaan energi minyak dalam negerinya yang hanya cukup untuk digunakan sampai 10 tahun kedepan. Padahal kebutuhan Amerika Serikat akan minyak sangat besar sekali, sampai-sampai impor minyaknya mencapai 70 % dari keseluruhan kebutuhannya. Dengan menguasai seluruh ladang minyak Irak, akan sangat menguntungkan Amerika Serikat, baik secara ekonomi maupun militer.<sup>7</sup> Secara ekonomi, jelas AS sangat berkepentingan untuk menghancurkan OPEC dengan membanjiri pasar minyak dunia 7-8 juta barel/hari bahkan bisa mencapai 10 juta barel/hari dari ladang minyak Irak, sehingga dengan produksi rata-rata itu praktis harga minyak mentah dunia dapat ditekan sampai US\$12-16 dolar/barel. Sedangkan secara politik militer, minyak Irak merupakan cadangan strategis bagi AS untuk menghidupkan mesin perangnya bagi sasaran perang berikutnya : Iran dan Korea Utara (kedua negara ini oleh AS dijuluki *Axis of Evil*).

Ketergantungan industri AS pada minyak bisa dibuktikan pada kisah terkaparnya beberapa maskapai penerbangan sipil AS, karena diperburuk oleh kenaikan harga minyak sejak Perang Teluk awal tahun 1990-an. Berdasarkan sumber dari *Reuters* pertengahan Maret, maskapai penerbangan akan mem-PHK 70.000-

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Republika, Loc.cit.*

100.000 karyawan dan mengalami kerugian tahunan hingga US\$ 10,7 miliar.<sup>8</sup> Militer dan teknologi AS, juga sangat tergantung pada minyak. Dengan suplai minyak yang cukup, inilah maka AS bisa menggerakkan mesin perangnya untuk semakin memantapkan posisinya sebagai negara superpower.

Bila pemimpin Irak bisa dijinakkan, maka AS akan bisa memegang kendali kekuasaan atas kawasan minyak dunia. Bila Irak tidak dijinakkan, kepentingan strategis politik, ekonomi dan militer para pengusaha minyak AS akan hilang. Dengan menyerang Irak dan membentuk penguasa baru yang pro-AS di Irak, maka terbuka peluang besar untuk menjamin kepentingan strategis tersebut.

Begitu bernafsunya AS terhadap minyak Irak ini, antara lain terlihat dari aksi pemerintah AS yang telah menghimpun sejumlah perusahaan minyak membahas kontrak membangun kembali Irak pascaperang. Diberitakan, pemerintahan Bush telah memanggil sedikitnya lima perusahaan AS guna mengajukan tender pembangunan kembali Irak. Setiap kontrak pembangunan kembali bernilai hampir US\$ 900 juta (sekitar Rp 810 miliar). Lima perusahaan minyak tadi yaitu Halliburton Co Kellogg Brown and Root dari Halliburton Co di Houston, Bechtel Group dari San Francisco, Fluor dari Aliso Viejo di California, Louis Berger Group dari East Orange New Jersey, dan Parsons Corp dari Pasadena California.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Mengingat begitu strategisnya minyak bagi AS, maka dibuat alasan untuk menjatuhkan rezim di Irak. Maka dibuatlah tuduhan bahwa rezim Irak merupakan pelindung dan pelatih para teroris, memiliki senjata pemusnah massal, negara terorisme, mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB, dan sebagainya.

Jika Irak sudah berhasil dikuasai, maka kendali harga minyak dunia akan berada di tangan AS. Maka siapapun yang menguasai cadangan minyak bumi dan gas alam, termasuk jalur ekonomi minyak seperti jaringan pipa penyaluran minyak ke Asia Selatan melalui Afghanistan ke India melalui Pakistan, jalur laut pengangkutan minyak dan gas alam dari Timur Tengah seperti Selat Malaka maka ia akan menguasai dunia.

Dalam konteks ambisi ini, faktor Irak sebagai ancaman dan pemilik senjata pemusnah massal hanyalah faktor perantara. Dengan menghembuskan strategi itu sebenarnya sasaran utama AS adalah upaya untuk menguasai dan mengontrol harga minyak Irak. Presiden Bush senior mengatakan : *The real conflict was over the jobs and president Bush said it was about acces to energy resources and our way of life.* Bahkan untuk memenuhi tujuan ini AS siap untuk menggunakan kekuatan militernya. Hal terakhir ini sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Presiden Carter dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 23 Januari 1980.<sup>10</sup>

Tujuan strategis Amerika Serikat guna menjamin persediaan minyak dan mengamankan dengan segala cara suplai minyaknya-walaupun harus menggunakan kekuatan militer untuk menjamin terus mengalirnya suplai minyak telah memperoleh

<sup>10</sup> Christoph Hertram, *Third World Conflict and International Security*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal.93.



momentum emas yaitu disaat dicabutnya embargo ekonomi PBB atas Irak. Namun di saat negara-negara lain seperti Rusia, China dan Perancis memanfaatkan kesempatan ini dengan menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan minyak Irak, Amerika Serikat malah berupaya mengerahkan dukungan dari sekutunya untuk melakukan serangan militer atas Irak. Bahkan Amerika Serikat mendorong Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan ancaman senjata dan itu terus dilakukan dengan berupaya mendapat dukungan dari Perancis, Rusia dan China yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut seolah menyangkal pendapat bahwa perusahaan minyak Amerika Serikat tidak berkepentingan terhadap aset minyak Irak yang sangat potensial tersebut. Namun secara logika tidak mungkin Amerika Serikat melepaskan peluang yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonominya dengan melepas aset berharga berupa *Iraqi oil* tersebut. Hal itu disebabkan meningkatnya kebutuhan minyak Amerika Serikat sebesar 53 persen dari kebutuhan minyaknya dan impornya meningkat hingga 62 persen pada tahun 2020.<sup>11</sup> Dan impor terbesar salah satunya didapatkan di Irak. Perusahaan minyak Amerika Serikat pun mengharapkan keuntungan dari industri yang memiliki ikatan yang sangat kuat dengan gedung putih tersebut. Presiden Bush sendiri adalah Kepala Bagian Perusahaan Minyak Texas, yang menerapkan kebijakan energi nasional yang mengandalkan pada perluasan sumber-sumber minyak baru secara agresif. Wakil

---

<sup>11</sup> Matt Rees, "The Selling of President's War", dalam *Time*, 18 Nopember 2002.

Presiden, Dick Cheney ada dibagian CEO pelayanan minyak raksasa Halliburton. Penasehat keamanan nasional Condoleezza Rice adalah direktur bagian Chevron.<sup>12</sup>

Konflik antara Amerika Serikat dan Irak yang disulut oleh isu minyak sebenarnya sudah berlangsung semenjak sebelum masa George Bush berkuasa. Pada masa perang Irak-Iran (1980-1988), kapal-kapal perang Amerika Serikat turun tangan mengawal kapal-kapal tanker minyak dari teluk Arab melalui selat sempit Hormoz menuju negara-negara Barat. Keberadaan militer Amerika Serikat itu terus dipertahankan di kawasan Arab Teluk hingga terjadi invasi Irak ke Kuwait tahun 1990. Pasca invasi Irak itu malah semakin meningkatkan kehadiran militernya di kawasan kaya minyak itu, dan bahkan membangun armada V di Bahrain. Di luar kawasan Arab Teluk, Amerika Serikat juga meningkatkan kehadiran militernya sesuai dengan tuntutan strategi barunya dalam menghadapi tantangan abad ke-21, globalisasi, perang bintang dan menjaga kesepakatan internasional.

Pada masa Bush sekarang ini, penggalangan kekuatan militer untuk menguasai ladang minyak Irak dilakukan dengan menempatkan 40.000 pasukannya secara permanen di Irak pasca rezim Saddam Husein. Sedangkan strategi untuk menyerang Irak dan mengaitkan dengan jaringan al-Qaeda dengan bukti yang tidak jelas merupakan intrik politik negara (statecraft) AS dengan dukungan para tokoh politik garis keras Yahudi di belakang layar seperti Paul Wolfowitz (Dephan), John Bolton (Deplu), Elliot Cohen (Dephan), Lewis Libby, Dov Zakheim (Deplu) dan Stephen Cambone. Selain itu keputusan George W. Bush untuk melakukan

---

<sup>12</sup> J.W. Schoen, "Iraqi Oil, American Bonanza?", dalam *MSNBC.Com*, 17 Januari 2003.

penyerangan terhadap Irak tentu tak luput dari pengaruh (tekanan) kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) ataupun kelompok-kelompok lobi. Kelompok kepentingan bisnis memiliki andil yang besar dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri di AS, begitu pula dengan AIPAC yang memiliki kekuatan lobi politik dahsyat di Amerika yang bekerja untuk Israel. Tentu saja AIPAC akan selalu berusaha supaya kepentingan Israel didukung, termasuk pula dalam masalah penyerbuan AS ke Irak saat ini. Israel pun bisa merasakan hasil dari penjarahan minyak Irak dan kepentingan Israel yang lainnya pun dilindungi oleh Amerika Serikat.

## 1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Penentuan ruang lingkup pembahasan diperlukan untuk memperjelas dan mempermudah dalam menganalisa permasalahan secara seksama, terarah dan sistematis dalam kurun waktu tertentu. Selain itu pembatasan masalah juga diperlukan untuk menghindari kekaburan arti dan pembahasan yang terlalu meluas, mengambang dan meilmpai batas sehingga mengakibatkan berkurangnya bobot ilmiah suatu penulisan. Kartini Kartono memberikan penjelasan tentang pembatasan masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

“Pembatasan masalah berkaitan dengan limit waktu, perongkosan, sempitnya waktu, terbatasnya dana dan kemampuan intelektual guna menyelidiki semua interrelasi permasalahan”.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, CV. Rajawali Pers, Jakarta, t.th.

Berdasarkan pada tujuan diatas, maka dalam karya ini akan dibagi menjadi dua pembatasan masalah, yaitu : pembatasan materi dan pembatasan waktu.

1. Pembatasan Materi

Materi hanya dibatasi pada pembahasan tentang aspek ekonomis politis dari penyerbuan (invasi) Amerika Serikat ke Irak.

2. Pembatasan Waktu

Waktu yang digunakan untuk menganalisa materi yaitu pada tahun 2003 yaitu pada saat dilancarkannya invasi Amerika Serikat terhadap Irak dan dilanjutkan dengan penguasaan terhadap ladang-ladang minyak Irak.

### 1.3 Permasalahan

Permasalahan (problematika) adalah hal mendasar yang harus diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah. Mengetahui permasalahan akan memberikan kita arah didalam setiap penelitian dan membuat kita mampu mencari dan menyarankan suatu penyelesaian dalam setiap permasalahan yang sedang kita hadapi dan berusaha kita pecahkan. Prof. DR. Winamo Surachmad mendefinisikan problematika sebagai berikut :

“Problematika adalah pemisahan daripada kompleksitas kesulitan-kesulitan dan kebutuhan yang dijumpai oleh pikiran yang bekerja didalam suatu situasi”<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Winamo Surachmad, *Pengantar Metode Research*, PN. Alumni, Bandung, t.th.

“Problematika penelitian adalah bagian pokok dari suatu kegiatan penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti mengajukan pertanyaan tentang persoalan yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian”.<sup>15</sup>

Sehingga untuk memperjelas problematika penulis membuat pertanyaan :

### **Mengapa Amerika Serikat melakukan invasi terhadap Irak ?**

#### **1.4 Kerangka Konsep dan Teori**

Tingkat analisa diperlukan dalam tulisan ini supaya diperoleh penjelasan yang optimal. Dalam hal ini terdapat dua aspek penting dalam memilih tingkat analisa yaitu unit analisa dan unit eksplanasi. Seperti yang dinyatakan oleh Moctar Mas'ood yaitu :

“Unit analisa adalah unit yang perilakunya hendak kita deskripsikan, jelaskan dan ramalkan (karena itu disebut juga variabel dependen); dan unit eksplanasinya adalah unit yang dampaknya terhadap unit analisa hendak kita amati (bisa juga disebut variabel independen)”.<sup>16</sup>

Berdasarkan pada pengertian tersebut maka unit analisa yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah state (negara bangsa) dan unit eksplanasinya menggunakan level state (negara bangsa) pula. Penggunaan perspektif unit analisa dan unit eksplanasi pada tingkat yang sama disebut dengan analisa korelasionalis.

Konsep kepentingan nasional (*national interest*) akan digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan tulisan ini. Keputusan suatu negara untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sangat dipengaruhi oleh kepentingan

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1977.

<sup>16</sup> Moctar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional - Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1989.

nasionalnya. Hal ini disebabkan karena negara adalah entitas politik terorganisasi yang mampu mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan seperti, pertama mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan lingkungan internasionalnya dan eksternalnya, Kedua kemampuan untuk memobilisasi sumber-sumber daya untuk menjalankan keputusan yang diambil dan ketiga, aplikasi instrumen dan teknik untuk mendukung keputusan.

Menurut H.J Morgenthau, seorang ahli ilmu politik mengatakan bahwa syarat minimal suatu negara untuk melindungi identitas fisik, politik dan budayanya dari gangguan negara lain. Makna yang tersirat dalam konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Morgenthau adalah bahwa suatu negara perlu memelihara kelangsungan hidupnya. Dengan demikian konsep kepentingan nasional merupakan alat tindakan politik yang dapat menjadi dasar pembenaran suatu tindakan, memperjelas atau mengajukan alternatif kebijakan yang ditempuh. Selain itu konsep kepentingan nasional juga dapat digunakan untuk menguraikan, menjelaskan atau menentukan sumber-sumber yang diperlukan dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara.

Ketergantungan minyak yang sangat besar mendorong Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan terkait dengan potensi strategis minyak Irak. Invasi atas Irak menjadi pilihan tindakan Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan-kepentingannya. Kebijakan melakukan invasi atas Irak ini dilakukan dengan terlebih dahulu menuduh Irak memiliki senjata pemusnah massal. Dengan alasan tersebut maka Amerika Serikat akan dengan mudah mendapat dukungan dari negara-negara lain terutama sekutunya dan Dewan Keamanan PBB. Jika cara ini berhasil maka aset

minyak Irak akan dikuasai oleh Amerika Serikat dan ini tentunya akan sangat menguntungkan kepentingan-kepentingannya.

Selain menggunakan konsep *national interest* (kepentingan nasional), penulis juga menggunakan Teori Pembuatan Keputusan (Decision Making Theory) dalam menganalisa permasalahan ini. Secara sederhana, Dougherty dan Pfaltgraff mendefinisikan Decision Making Theory sebagai berikut :

“Suatu tindakan memilih diantara berbagai alternatif yang ada, yang diliputi dengan ketidakpastian”.<sup>17</sup>

Richard C. Snyder juga mengemukakan definisi Decision Making Theory sebagai : berikut :

“ Sebuah proses yang menyangkut pemilihan dari sejumlah masalah-masalah yang terbentuk secara sosial, pemilihan sasaran-sasaran alternatif yang ingin diterapkan dalam urusan negara yang dipikirkan oleh para pembuat keputusan”.<sup>18</sup>

Sedangkan dalam karyanya Mochtar Mas’oed mengatakan :

“... Teori Pembuatan Keputusan ( Decision Making Theory ) memusatkan perhatian pada berbagai rangsangan atau stimulus yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan dan keputusan itu sendiri”.<sup>19</sup>

Jadi dengan demikian esensi dari setiap pembuatan keputusan adalah memilih diantara berbagai kemungkinan alternatif yang ada untuk kesinambungan bangsa.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> James F. Dougherty dan Robert L. Pfaltgraff Jr, *Contending Theory's to International Relation*, J.B. Lippincot, Co. Ltd, Philadeipia, 1971, hal.58.

<sup>18</sup> Richard C. Snyder, *Foreign Policy Decision Making an Approach to International Politics*, The Free Press, New York, 1962, hal.12.

<sup>19</sup> Mochtar Mas’oed, *Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisasi*, PAU Studi Ilmu Sosial UGM, Yogyakarta, 1990, hal. 12.

<sup>20</sup> Abubakar Eby Hara, “Decision Making Theory dalam Hubungan Internasional”, dalam *Jurnal Ilmu Politik 9*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal.16.

Teori pembuatan kebijakan luar negeri yang diungkapkan oleh William D. Coplin digunakan sebagai pisau analisa untuk mengkaji kepentingan Amerika Serikat atas Irak. Ia menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh beberapa faktor determinan, yaitu antara lain:<sup>21</sup>

1. Situasi politik domestik
2. Situasi ekonomi dan militer domestik
3. Konteks internasional

Realita politik internasional saat ini menunjukkan bahwa kemampuan militer suatu negara masih sangat dominan sifatnya dalam menunjang kepentingan nasionalnya. Hampir sebagian besar negara di dunia saat ini menggunakan kekuatan militer yang dimiliki untuk menekan, mengancam, membantu dan memaksa negara lain. Di lain pihak negara yang memiliki kemampuan militer yang lemah biasanya di bidang kebijakan luar negeri lebih banyak ditujukan untuk mengurangi resiko dari kelemahannya, misalnya membentuk pakta militer, mencari bantuan guna meningkatkan kemampuannya atau untuk menjadi negara netral. Dengan demikian militer dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri.

Kemampuan atau potensi dan stabilitas ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negerinya. Kebijakan yang diambil pada saat negara berada dalam minus modal dan teknologi sangat berbeda jika kebijakan itu diambil pada saat negara dalam keadaan surplus modal. Dalam proses

---

<sup>21</sup> William D. Coplin, "Foreign Policy Theory's", dalam buku *AS Penghambat Demokrasi : Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2000, hal.151



industrialisasi, pada saat negara dalam kondisi minus modal, pendapatan dan teknologi maka produksi barang-barang yang dihasilkan lebih ditekankan untuk dapat menarik dan mendatangkan permintaan yang besar dengan modal dan tenaga yang kecil.

Lingkungan dan situasi internasional merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Pernyataan ini didukung oleh seperangkat fakta yang kesemuanya mengisyaratkan bahwa kebijakan luar negeri cenderung menyesuaikan diri dengan dinamika dari lingkungan atau situasi internasional.

Faktor lain yang mempengaruhi kebijakan luar negeri adalah kebijakan dalam negeri (domestic policy). Kecenderungan ini nampak dalam pernyataan bahwa politik luar negeri adalah kepanjangan dari politik dalam negeri yang diteruskan ke luar negeri.

Tingkah laku pembuat keputusan (decision makers behaviour) juga dominan karena kebijakan luar negeri akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor manusiawi dari pembuat keputusan, baik mencakup filsafat hidup, pengalaman, pengetahuan, emosi, ambisi, kepentingan dan lain sebagainya.

Unit analisa model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Analisa politik luar negeri ini dengan demikian memusatkan perhatian pada penelitian kepentingan nasional dan tujuan bangsa, berbagai alternatif haluan kebijakan yang bisa diambil oleh suatu pemerintah, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu. Berbagai pertimbangan rasional tersebut diarahkan untuk optimalisasi pencapaian kepentingan nasional. Kebijaksanaan Amerika Serikat baik domestik maupun internasional secara

menyeluruh merupakan rangkaian dari strategi globalnya untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya.

## 1.5 Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas suatu masalah penelitian.<sup>22</sup> Selanjutnya WJS. Purwodarminto berpendapat bahwa hipotesa adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk mengutarakan pendapat, meski kebenarannya belum dibuktikan.<sup>23</sup>

Dalam hal ini hipotesa dari permasalahan mengenai alasan mengapa **Amerika Serikat menginvasi Irak adalah untuk menguasai industri minyak dunia, serta ingin menjadi kekuatan hegemon di kawasan Timteng.**

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Tulisan ini menggunakan studi pustaka (library research) sebagai metode pengumpulan datanya. Dalam hal ini data sekunder yang dipergunakan adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan di :

---

<sup>22</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

<sup>23</sup> WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, t.th.

1. Perpustakaan FISIP UNEJ
2. Perpustakaan Pusat UNEJ
3. Media-media massa, baik cetak maupun elektronik

#### 1.6.2 Metode Analisa Data

Analisa data bertujuan untuk menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan. Mengingat sifat data yang terkumpul tidak dapat diukur secara langsung, maka dalam penelitian ini data diolah secara deduktif-kualitatif. Dalam hal ini digunakan metode analisa deduktif sebab yang ditekankan adalah teori dulu baru dilakukan penelitian.<sup>24</sup>

Deduksi merupakan cara berpikir dari hal yang bersifat umum ditarik ke kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>25</sup> Penggunaan analisa deduktif kualitatif bertujuan untuk membuat penggambaran atas deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dalam kasus yang diteliti.

#### 1.7 Pendekatan

Menurut R. Suprpto, pendekatan merupakan cara untuk menghampiri dari segi tertentu terhadap suatu masalah sehingga memungkinkan orang untuk menyelidiki, mendalami dan memecahkan permasalahannya. Dalam menganalisa permasalahan dalam tulisan ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan sejarah politik dan pendekatan ekonomi politik.

---

<sup>24</sup> Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Methodologi*, LP3ES, Jakarta, 1989.

<sup>25</sup> Suria Sumantri dan Jujun S., *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Methodologi*, t.th.

## Pendekatan Sejarah Politik

The Liang Gie mengatakan bahwa pendekatan sejarah politik adalah :

“Menerapkan hambaran sejarah dan menggunakan pengetahuan tentang masa lampau apabila menafsirkan pertumbuhan gejala-gejala politik pada masa kini maupun masa depan yang mungkin terjadi”.<sup>26</sup>

Pendekatan sejarah politik dimaksudkan untuk mendekati sasaran yang harus dibahas berdasarkan kejadian-kejadian politik atau peristiwa-peristiwa politik, baik yang sudah lama maupun baru terjadi. Pendekatan sejarah politik meyakini bahwa kejadian yang terjadi saat ini merupakan akibat dari kejadian-kejadian di masa lalu dan kejadian-kejadian kini merupakan penyebab kejadian-kejadian yang akan datang.

Pendekatan sejarah politik memiliki dua aspek untuk pemahaman, yaitu :

1. Bahwa perubahan merupakan sesuatu yang pasti terjadi;
2. Bahwa ada kecenderungan yang dapat dibaca dengan meneliti proses politik di masa sekarang dan kemudian memproyeksikan kecenderungan tersebut ke masa depan.

Penguasaan ladang minyak Irak oleh Amerika Serikat selain untuk memenuhi kepentingan nasional juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman sejarah di masa lalu. Kenyataan masa lalu menunjukkan bahwa minyak merupakan kebutuhan vital bagi kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat.

---

<sup>26</sup> The Liang Gie, *Ilmu Politik*, FISIP UGM, Yogyakarta, 1974.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa selama OPEC berdiri, negara-negara OPEC-lah yang menentukan kuota produksi, jalur distribusi serta harga minyak dunia. Hal ini membuat posisi Amerika sangat terjepit, karena negara-negara OPEC bisa menggunakan minyaknya sebagai senjata politik untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan untuk menghadapi atau mengimbangi kepentingan serta ambisi negara lainnya. Lemahnya posisi Amerika dalam hal ini suatu misal seperti, dikurangnya produksi minyak OPEC bagi Amerika secara berangsur-angsur pada tahun 1975 sampai tercapai sasaran politik berupa penarikan Israel dari seluruh wilayah Palestina. Kondisi ini tentu sangat berbahaya bagi keberlangsungan perindustrian dan dominasi Amerika atas dunia serta bagi agenda Zionis untuk mewujudkan impian Israel Raya-nya. Perindustrian Amerika akan macet karena krisis minyak yang dihadapinya, akibatnya kekacauan pun akan nampak pada perekonomian Amerika, yang kemudian akan segera disusul dengan keriuhan di bidang yang lainnya. Dominasi dan hegemoni Amerika Serikat atas dunia akan beralih pada OPEC karena penentuan segala sesuatu yang berkaitan dengan minyak ada dalam kontrol dan kuasa OPEC. Dan ini merupakan *entry point* untuk menguasai dunia karena negara-negara di dunia, terutama negara-negara industri tidak akan pernah bisa lepas dari kebutuhannya terhadap minyak. Agenda Zionis untuk mewujudkan Israel Raya pun akan pupus karena penopang ekonomi terbesarnya – Amerika Serikat- tidak bisa mensuplai bantuannya karena anggaran nasional Amerika tidak mencukupi atau bahkan mengalami minus modal akibat mandegnya industri dan perekonomian Amerika Serikat.

Faktor-faktor itulah yang kemudian mempengaruhi perumusan politik luar negeri Amerika Serikat, khususnya dalam masalah *security supply* minyak. Dalam memenuhi ambisi minyak ini Amerika membidik Irak karena : (1) Irak adalah negara yang memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia dan bahkan biaya produksinya terendah di dunia; (2) Posisi Irak yang sangat menentukan di OPEC; (3) Kekuatan militer Irak yang dikhawatirkan akan mengancam dominasi dan hegemoni Amerika atas negara lainnya; (4) Penentangan keras Irak atas pendudukan Israel di tanah Palestina.

#### Pendekatan Ekonomi Politik

Isaak mengemukakan ekonomi politik sebagai :

“The study of inequality or assymetry between nation and peoples and collective learning and positioning patterns that preserve or change assymetry”.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa ekonomi politik sebagai studi yang membahas pengambilan keputusan antara pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat. Mochtar Mas'ood mendefinisikan sebagai berikut :

“Ekonomi politik internasional sebagai studi tentang saling keterkaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi antara negara dan pasar, antara lingkungan domestik dengan internasional dan antara pemerintah dengan masyarakat”.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Mochtar Mas'ood, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 10.

## **BAB II**

### **KONDISI KEKAYAAN ALAM IRAK**

### **DAN POSISI IRAK DI KAWASAN TIMUR TENGAH**

#### **2.1 Gambaran Umum Irak**

Irak adalah suatu negara yang selalu menjadi lintasan berbagai kekuatan, baik yang datang dari timur maupun dari barat. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi geografisnya yang dapat dipakai untuk mempertahankan diri. Karena itu, kawasan ini pernah diduduki oleh berbagai bangsa di dunia seperti bangsa Persia, Yunani, Romawi, Arab, Mongol, Usmani dan Inggris. Setiap bangsa yang pernah menguasainya itu sedikit banyak meninggalkan jejak dalam perkembangan budaya rakyat setempat. Namun cirinya yang paling menonjol adalah ciri Arab yang beragama Islam.

Inti teritori Republik Irak adalah sebidang tanah yang terletak antara sungai Dajlah dan Furat, yang dikenal dengan nama Mesopotamia, atau tanah diantara sungai-sungai. Namun daerah teritorial Irak yang berada diluar itu juga cukup luas. Wilayah Irak berbatasan di sebelah selatan dengan padang pasir, dan di sebelah utara dengan perbukitan dan pegunungan yang banyak celah-celahnya.

Republik Irak memiliki luas kira-kira 167.924 mil persegi (434.923 km persegi), dengan penduduk sebanyak 24.001.816 jiwa menurut cacah jiwa tahun 2002. GNP perkapita pada tahun 2002 adalah sebanyak \$2.500. Kota-kota yang

terbesar adalah Basra, Mosul, Kirkuk dan Baghdad sebagai ibukotanya. Bahasa resminya adalah bahasa Arab.

Di sebelah timur, Irak berbatasan dengan Iran, di sebelah utara dengan Turki, di sebelah barat dengan Suriah dan Yordania, dan di sebelah selatan dengan Arab Saudi dan Kuwait. Kebanyakan dari penduduk Irak terdiri dari bangsa Arab yang menganut agama Islam dari aliran Syi'ah dan Sunni, serta di bagian utara bangsa Kurdi yang beragama Islam Sunni. Kaum Syi'ah yang merupakan golongan terbesar tinggal di bagian tenggara dari negara itu. Namun pemerintahan dan militer biasanya didominasi oleh bangsa Arab yang bermazhab Sunni.<sup>1</sup>

### 2.1.1 Kekayaan Sumber Daya Alam Irak

Irak adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, baik itu minyaknya maupun sumber daya alam lainnya. Tiga wilayah Irak yang memiliki sumber kandungan minyak dan gas yang luar biasa : di Irak Utara – Majnun, Qurna Barat dan Nahr Umar yang menghasilkan 500 ribu barel per hari. Diperkirakan 220 miliar barel lagi yang belum dieksplorasi, bahkan mungkin lebih dari itu. Jika saja potensi ini dikelola secara maksimal, dapat dikatakan Irak akan mampu menguasai seperempat cadangan minyak dunia.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Riza Sihbudi dkk, *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.

<sup>2</sup>Lihat : [www.lalamonline.net](http://www.lalamonline.net), "Iraqi Natural Wealth : The Core of Crisis", 2003.



Secara geologis minyak Irak berkualitas sangat tinggi. Minyak mentahnya ringan, menunjukkan berat penyulingan yang optimal dan kandungan sulfur yang teramat rendah. Ini penting dicatat karena kandungan sulfur mempersulit penyulingan sehingga membutuhkan biaya produksi yang lebih besar. Beberapa penyulingan di negara-negara tertentu belum tentu memiliki teknologi penyulingan yang memadai untuk dapat menghasilkan minyak gas dan bensin. Tidak hanya itu, di Irak minyak dapat ditemukan tak jauh dari permukaan, sehingga memudahkan penggalian. Tak pelak lagi, produksi minyak Irak termasuk yang termurah di seluruh dunia. Hanya sebesar 97 sen dikeluarkan untuk tiap barelnya, dibandingkan dengan 6 dolar per barel untuk produksi minyak Rusia (hampir sepertujuhnya). Sementara bila harga tiap barel berkisar \$30, perusahaan minyak Irak akan mendapatkan keuntungan kembali sebesar 97%, sebuah pemasukan laba yang sangat menakjubkan.

Ladang-ladang yang menghasilkan minyak terbesar adalah Kirkuk di utara antara gunung Zagrus dan Upper Plain, ladang minyak Baghdad Timur di daerah tengah, ladang minyak Rumaila di bagian Selatan di sebelah selatan Basrah dan ladang-ladang minyak lainnya di dekat kota Mosul. Minyak yang dihasilkan dari ladang-ladang tersebut memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jenis minyak di ladang Kirkuk dan Basrah rendah kandungan sulfurnya. Ladang minyak Basrah normalnya memproduksi sebesar 340 API (Air Position Indicator), dengan 2,1 kandungan sulfur. Ladang minyak Kirkuk sebelah utara normalnya bisa menghasilkan 370 API dengan kandungan 2% sulfur mentah.

Irak juga memiliki sejumlah fosfat (digunakan untuk membuat pupuk kimia), sulfur, minyak coklat, garam, gipsium dan gas alam. Yang mengandung 110 Tcf (Triliun cubic feet) cadangan gas alam yang telah diketahui, dan kemungkinan juga mengandung 150 Tcf cadangan gas alam lainnya. Sumber gas alam yang terutama adalah Kirkuk, Ain Zalah, Butma dan Bai Hassan di Irak sebelah utara, sebaik ladang minyak Rumaila Utara dan Selatan serta ladang minyak Zubair di sebelah Selatan. Jenis-jenis mineral lainnya yang ditemukan di Irak terutama besi, emas, perak, platinum, zinc, tembaga dan timah hitam.

Selain kaya dengan minyak, mineral dan gas alam, Irak juga memiliki banyak pohon palem dan bahkan Irak menjadi penghasil dan pengekspor terbesar di dunia. Pada tahun 1960 dan 1970, Irak memiliki 30 juta pohon palem. Pada saat itu, jumlah produksinya paling sedikit 578.000 ton. Palem Irak ini tidak hanya superior dalam kuantitas tapi juga dalam kualitas. Hasil pertanian lainnya yang dihasilkan Irak adalah buah-buahan, seperti apel, kurma, anggur, zaitun, jeruk, pir dan delima. Setelah mengetahui bahwa Irak adalah sebuah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, maka jika sumber-sumber kekayaan alam tersebut diolah secara maksimal, maka Irak akan menjadi negara yang termakmur di Timur Tengah sebagaimana telah diwujudkan pada sebelum tahun 1990-an.

Irak dilewati sungai besar yang menjadikannya negara dengan persediaan air terbesar dibandingkan dengan semua negara di Timur Tengah. Sungai legendaris Eufrat dan Tigris, disana pula letak peradaban pertama dan paling modern berkembang. Dua sungai ini ditambah curah hujan rata-rata mencapai 154 mm,

mampu mencukupi pengairan untuk pertanian. Perlu diketahui bahwa seperlima daerah Irak adalah lahan pertanian.

Aliran sungai Eufrat dan Tigris membawa tanah subur ke lembah-lembah di dekatnya selama berabad-abad. Padahal Tigris mempunyai panjang 1.718 km, sepanjang 1.418 ada di wilayah Irak. Sedangkan Eufrat 2.300 km, dan 1.213 mengairi Irak. Akibatnya Irak memiliki daerah subur yang luas dan lebih dari sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang menarik, selain untuk irigasi, kedua sungai tersebut juga dijadikan sumber pembangkit listrik, satu kemudahan lagi bagi para pengeksplosasi minyak dalam mendapatkan energi.

### 2.1.2 Produksi dan Distribusi Aliran Minyak Irak

Irak memiliki 12 pabrik penyulingan minyak dengan total kapasitas 677.000 barel perhari, terbesar ada di Bassora di selatan dan di Baiji di Irak utara. Masing-masing kilang minyak itu mempunyai kapasitas produksi sebesar 170.000 dan 150.000 barel per hari. Sebelum Perang Teluk tahun 1991, Irak mengekspor minyak lewat empat pipa ke Turki, Suriah, Arab Saudi dan dua pelabuhan di Teluk antara lain di Min-Al-Bakr yang bisa melayani *supertankers* dan mengapalkan hingga 1,3 juta barel per hari.

Setelah invasi ke Kuwait dan embargo atas ekspor minyak Irak, produksi minyak Irak turun menjadi 300.000 barel per hari, dari sekitar 3,5 juta barel per hari per Juli 1990. Produksi minyak Irak sangat berfluktuasi. Pada tahun 2001, produksi minyak mentah Irak rata-rata 2,45 juta barel per hari, turun dari 2,59 juta barel perhari

di tahun 2000, dengan fluktuasi mingguan atau bulanan yang sangat tinggi. Produksi minyak Irak terendah terjadi pada Juni 2001 sekitar 1,13 juta barel per hari, dan tertinggi pada April 2001 sekitar 2,95 juta barel per hari.<sup>3</sup>

Irak berharap bisa menggenjot produksi menjadi 3,5 juta barel per hari pada tahun 2000, tetapi gagal karena masalah teknis dan tidak memadainya prasarana di ladang-ladang minyak Irak akibat embargo ekonomi yang sudah selama satu dekade diberlakukan oleh PBB atas Irak. Irak juga mengatakan, kendala peningkatan produksi muncul akibat penolakan PBB untuk memberikan kesempatan pada Irak untuk mendapatkan teknologi perminyakan yang dikehendaki.

Ahli industri perminyakan mengatakan bahwa kapasitas produksi minyak mentah Irak bergerak antara 2,8-3 juta barel per hari. Dari jumlah itu, ekspor bersih antara 2,3-2,5 juta barel per hari (termasuk ekspor minyak secara gelap). Menteri Perminyakan Irak Amir Rashid mengatakan bahwa kapasitas produksi minyak Irak antara 3,2-3,3 juta barel per hari. Irak berharap bisa menaikkan volume minyak Irak menjadi sebesar 3,5 juta barel per hari meskipun tanpa bantuan dari perusahaan-perusahaan asing.

Menurut *Middle East Economic Survey*, Irak juga dibatasi mengekspor minyak, dan hanya bisa mengekspor untuk keperluan pembelian bahan makanan (disebut dengan *oil for food program* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa) sekitar 2,2 juta barel per hari, selebihnya antara 800.000-900.000 barel per hari dikonsumsi di dalam negeri.

---

<sup>3</sup> *Kompas*, 28 Nopember 2002.

Pembatasan ekspor minyak Irak ini sedikit banyaknya akan mengakibatkan pengaruh pada pasokan minyak dunia, mengingat Irak adalah negara yang memiliki cadangan yang juga terbilang terbesar di dunia. Padahal di era industrialisasi ini banyak negara-negara yang menggantungkan industrinya pada minyak, termasuk Amerika Serikat. Pasokan minyak dunia akan melimpah bila Perserikatan Bangsa-Bangsa mau mencabut embargo ekonomi atas Irak. Sehingga dengan demikian perekonomian Amerika Serikat yang tergantung pada minyak akan meningkat drastis.

### **2.1.3 Pengaruh Minyak terhadap Kondisi Perekonomian Irak**

Pada tahun 1970-an, Bank Dunia mencatat negara Irak termasuk dalam daftar negara-negara yang memiliki pendapatan perkapita sedang, sekaligus memiliki kemampuan untuk berpindah ke level pendapatan perkapita tinggi. Minyak menyumbang sekitar 50% dari Produksi Domestik Bruto (PDB) Irak. PDB perkapita Irak mencapai puncaknya sekitar 9.000 Dolar AS (berdasarkan harga pada tahun 2000) pada tahun 1979. Tahun 2001, kisaran pendapatan perkapita Irak hanya sekitar 1.000-1.200 barel per hari.

Irak merupakan negara yang memiliki cadangan minyak yang sangat melimpah. Karena urgensi inilah berbagai aktivitas ekonomi dan juga finansial dalam dan luar negeri sangat bergantung pada minyak. Hasil dari minyak dapat dipakai untuk pengembangan dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1950-an, 30% dari hasil minyak digunakan untuk kemajuan ekonomi, meningkat menjadi 70% pada awal

tahun 1970-an.<sup>4</sup> Adapun dana yang tersisa digunakan untuk membiayai anggaran negara sehari-hari.

Keuangan Irak, baik internal ataupun eksternal sangat sehat. Ekspor minyak sudah lebih dari cukup untuk menutupi anggaran negara dan seluruh kebutuhan sipil dan militer. Bahkan ekspor minyak Irak melebihi biaya-biaya yang harus dikeluarkan, sehingga Irak mendapat surplus devisa anggaran mencapai 35,5 miliar dolar. Sebaliknya, kondisi keuangan negara-negara Teluk waktu itu tak setinggi surplus devisa anggaran Irak. Kelebihan devisa tersebut disimpan di bank-bank luar yang memberikan pendapatan setiap tahunnya mencapai 4,2 miliar dolar pada tahun 1979.<sup>5</sup> Uang sebanyak itu sudah cukup bagi seluruh rakyat Irak untuk membeli kebutuhan pangan dan obat-obatan. Sementara itu, hutang luar negeri Irak tak lebih dari 3 miliar dolar yang dapat diangsur secara khusus karena fasilitas kemudahan-kemudahan resmi dengan ekspor komoditi negara-negara Barat ke Irak. Jumlah itu tak lebih dari 6% dari GDB (Gross Domestik Bruto).

Kemudian Irak, sebagaimana negara Teluk lainnya, memberikan bantuan ke negara-negara Arab dan negara berkembang. Dengan begitu, Irak adalah negara donor dan lebih banyak memberikan hutang daripada menghutang. Adapun soal pengangguran, bisa dibilang tak dikenal di Irak ketika itu. Namun sebaliknya malah dilarang, karena bekerja adalah wajib menurut pemimpin Irak waktu itu. Bahkan negara juga mendatangkan para pekerja dari negara-negara Arab dan asing. Juga

---

<sup>4</sup> Anif Punto Utomo & Hery Sucipto, *Irak Pasca Invasi : AS, Minyak, dan Berakhirnya Pan Arab*, Global Mahardika, Jakarta, 2003, hal. 142.

<sup>5</sup> *Ibid.*

masalah inflasi tak pernah lebih dari 10 persen, nilai yang dianggap stabil pada saat itu, dimana inflasi terjadi secara besar-besaran di berbagai negara.

Besarnya pendapatan Irak dari hasil penjualan minyaknya, tidak hanya menjadikan negara ini makmur secara ekonomi, tapi juga kuat di bidang militer. Pada tahun 1975 saja, Irak sudah membangun militer yang dibekali dengan persenjataan modern yang kuat, dengan pembiayaan militer hingga mencapai 28,596 miliar Dolar.

#### 2.1.4 Pengaruh Minyak terhadap Perekonomian Dunia Terutama AS

Peranan minyak dan gas alam menjadi semakin penting bagi kelangsungan industri dan ekonomi negara-negara industri dunia semenjak Perang Dunia II. Hal ini sebagaimana tampak dalam pidato Presiden Geald Ford di San Fransisco pada bulan Oktober 1975 yang masih relevan hingga saat ini :

*"American concern for Middle East is not a matter of choice; it is a matter of vital necessity. It is a strategic part of the world and the source of a significant and growing portion of our energy resources and those of Western Europe and Japan".<sup>6</sup>*

Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam eksploitasi minyak di Irak hingga sekarang merupakan suatu faktor yang menstabilisir ekonomi Amerika. Lima perusahaan minyak raksasa Amerika (Exxon, Mobil, Texaco, Socal dan Gulf) sejak sebelum Perang Dunia II telah menguasai mulai dari produksi sampai pemasaran minyak Timur Tengah.

---

<sup>6</sup> Weekly Compilation Presidential Document, 1975 dalam buku Sidik Jatmika, *Amerika Penghambat Demokrasi : Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2000.

Disamping keuntungan lima perusahaan minyak raksasa Amerika tersebut dapat membantu stabilitas ekonomi Amerika (misalnya, pada tahun 1980 "*Wind Fall Profit*" mereka mencapai 8 miliar US Dolar), pemerintah Amerika juga menaruh perhatian khusus pada Timur Tengah karena cadangan minyaknya yang terbesar di dunia. Ditinjau dari segi cadangan minyaknya, cadangan minyak Timur Tengah sebesar 369,29 miliar barel dan cadangan yang dimiliki oleh negara-negara Teluk Parsi (GCC) sebesar 358,72 miliar barel.

Sedangkan derajat ketergantungan konsumsi minyak negara Barat dan Jepang semakin meningkat. Bagi Amerika Serikat sendiri, nilai impor minyak Amerika dari keseluruhan nilai impor Amerika relatif besar meskipun mengalami penurunan. Pada tahun 1985, prosentase nilai impor minyak Amerika sebesar 14,9 % yang nilainya 50,5 US Dolar dari total nilai impor Amerika sebesar 338,9 miliar US Dolar. Tahun 1986 turun menjadi 9,4 % dengan nilai 34,4 miliar US Dolar total nilai impor Amerika Serikat.

Peristiwa yang dapat menegaskan arti strategis minyak dan implikasi politik ekonominya terhadap perekonomian dunia adalah Perang Teluk II, dimana Irak melakukan intervensi dan aneksasi terhadap Kuwait untuk mengontrol 19 % minyak dunia. Dengan dikuasainya Kuwait, Saddam Hussein ingin menekan perubahan yang perlu dilakukan Arab Saudi dalam kebijakan minyaknya. Dengan begitu ia dapat secara efektif mempengaruhi harga dan produksi atas 44 % suplai minyak dunia serta memiliki posisi dan pengaruh yang kuat di OPEC.



Prospek kebutuhan minyak dunia akan semakin besar terlihat dari penilaian perusahaan konsultan Purvin dan Gertz yang bermaskas di Houston memperkirakan kebutuhan minyak di Asia Timur dan Asia Selatan akan meningkat mencapai 3,5 % per tahun sampai tahun 2000 sebelum turun menjadi sekitar 2 % dalam 15 tahun sampai tahun 2015. Penilaian ini juga memperkirakan Timur Tengah akan memenuhi 80% kenaikan kebutuhan tersebut atau kira-kira 8,5 juta barel per hari selama lebih dari 20 tahun mendatang.

Seperti diketahui minyak adalah bahan bakar utama dan bahan mentah yang paling diperlukan dalam peradaban industrial kontemporer. Dan bahkan mengalminya minyak di kawasan itu secara bebas adalah soal hidup dan matinya industri serta perekonomian negara-negara industri. Kenaikan harga minyak dunia merupakan sebuah masalah disamping masalah suplainya terhadap negara-negara industri. Karena hal tersebut akan berdampak sebagai bahaya bagi kepentingan negara-negara industri besar, dimana kenaikan ini akan berimbas secara langsung pada perdagangan luar negeri mereka juga pada daya beli konsumennya. Masalah ini tidak bisa dihadapi secara parsial, kecuali dengan menekan pajak yang dikenakan bagi konsumen minyak. Penurunan pajak ini akan berakibat pada menurunnya pendapatan anggaran umum yang diakibatkan secara mendasar oleh kelemahan yang kronis. Dengan demikian, standar uang utama akan menurun dan disisi lain, akan naiknya nilai bunga di pasar uang. Sedangkan tingkat produksi bisa menurun dan naik, selanjutnya perekonomian dunia akan mengalami kemandegan. Sementara bagi negara-negara Teluk penghasil minyak, derita ekonomi dan lingkungan akan berkembang lebih besar dari itu.



## 2.2 Arti Penting Kawasan Timteng dan Irak

### 2.2.1 Kepentingan Strategis Amerika Serikat atas kawasan Timur Tengah

Arti Timteng jauh lebih berarti dengan penemuan minyak dalam jumlah yang luar biasa. Minyak adalah kebutuhan vital bagi negara-negara industri dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya. Hal itu cukup menjadikan Timteng sebagai kawasan yang paling penting di dunia. Cadangan minyaknya telah terbukti sebesar dua per tiga cadangan minyak dunia yang dikenal. Karena berbagai faktor eksploitasinya mudah dan biayanya rendah, sehingga produksi minyak Timteng terus meningkat dengan cepat dan kini merupakan sekitar 40 % produksi minyak dunia. Eropa Barat mendapatkan 70 % kebutuhan minyaknya dari kawasan itu dan Jepang bahkan 80 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara-negara Eropa Barat dan Jepang bergantung pada Timteng. Dengan demikian Timteng memiliki potensi ekonomi dan politik yang besar. Hal itu menjadi sangat jelas dalam kejadian-kejadian yang menyusul pecahnya perang Arab-Israel pada tanggal 6 Oktober 1973.

Timteng dianggap memiliki posisi strategis dalam pemikiran politik luar negeri Amerika karena peranan minyak dan gas alam yang menjadi kian penting bagi kelangsungan industri dan ekonomi Barat sejak Perang Dunia II. Keuntungan yang diperoleh konsorsium Amerika dalam pertambangan minyak Arab Saudi merupakan faktor penting dalam stabilitas ekonomi negaranya.

Dengan memahami begitu strategisnya kawasan Timteng bagi kepentingan Amerika maka Amerika akan selalu berusaha untuk menjaga wilayah ini dari penguasaan negara lain. Kepentingan-kepentingan Amerika terhadap kawasan Timteng ini menurut Amien Rais yaitu :<sup>7</sup>

1. Mengusahakan agar sumber-sumber alam Timteng tidak jatuh ke tangan musuh;
2. Memelihara kemampuan destruksi unsur-unsur regional dari kekuatan strategis Amerika;
3. Menjamin tersalurnya sumber-sumber alam yang penting bagi industri dan militer Amerika;
4. Menjamin suplai sumber-sumber alam yang penting bagi sekutu-sekutu Amerika agar tetap kuat secara ekonomi dan militer;
5. Memelihara kontinuitas mengalirnya keuntungan investasi dan usaha-usaha komersial Amerika;
6. Menjaga kredibilitas dengan jalan memenuhi komitmen-komitmen Amerika di Timteng;
7. Meneruskan hak transit dan "overflight" bagi pesawat udara dan kapal laut Amerika.

---

<sup>7</sup> Amien Rais, 1988, dalam Sidik Jatnika, *Ibid.*, hal.154.

Jika Amerika berhasil mencapai kepentingannya di kawasan Timteng tersebut maka Amerika tidak hanya mendapatkan *security of oil supply*-nya, melainkan juga akan menjadi “Juragan Minyak Dunia”, hal ini tentu akan menjadi alat politik yang handal untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri Amerika, dan sekaligus menciptakan ketergantungan para pesaing Amerika di berbagai penjuru dunia, seperti Uni Eropa, Rusia, Jepang, Korea Utara dan China.

## 2.2.2 Posisi Irak di Timteng

### 2.2.2.1 Ambisi Irak untuk Menjadi Pemimpin di Kawasan Timteng

Sejak Saddam Hussein berkuasa, Baghdad bukan lagi merupakan ibukota sebuah negara terpencil. Berkah kenaikan harga minyak dan ditunjang oleh ketepatan strategi politik luar negerinya mengakibatkan Irak menduduki posisi kunci di dunia Arab dan menjadi salah satu fokus dunia ketiga. Momen itu digunakannya untuk merealisasikan ambisinya untuk menjadi pemimpin di kawasan Timteng. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan *build up* militer secara besar-besaran.

Ambisi Irak untuk menjadi pemimpin di kawasan Timteng ini memperoleh momentum emas saat Mesir mundur sebagai pemimpin di kawasan Timteng akibat perjanjian Camp David (Mesir-Israel). Ambisi Irak ini menjadi semakin besar setelah melihat angkatan bersenjata Iran mengalami disorganisasi sebagai akibat revolusi Khomeini 1979. Irak dimungkinkan menjadi pemimpin di kawasan Timteng karena Irak memiliki sumber-sumber kekuatan yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Diantara sumber kekuatan Irak adalah: pertama, ia memiliki ideologi kuat yang

didasarkan atas konsep partai Ba'ath tentang sosialisme, pan Arabisme dan anti-imperialisme (termasuk kekuatan imperialis adalah Israel dan Amerika); Kedua, kemampuan militer Irak terus meningkat yang diorganisir menjadi 12 batalion dan merupakan kekuatan militer terbesar didunia Arab setelah Mesir dan terbesar keempat didunia; dan ketiga, kekuatan ekonomi Irak semakin berkembang dan pemerintah Ba'ath kelihatan mengalokasikan petrodolarnya untuk pembangunan nasionalnya.

Saddam Hussein mencanangkan suatu piagam nasional Arab yang menentang doktrin Carter. Piagam yang diusulkan itu berisi ajakan untuk menentang "*Security Umbrella*" kawasan Teluk yang diusahakan oleh Amerika Serikat, sekaligus mengancam negara Arab yang gagal memegang prinsip tersebut. Selain itu, Saddam dalam menyikapi sengketa Arab-Israel Irak dengan keras menolak eksistensi Israel yang disebutnya sebagai "entitas Zionis". Dan dalam konsep politiknya Irak secara simultan bergerak kedua arah : pertama, membangun kekuatan militer dan teknologi, termasuk kekuatan nuklir; dan kedua, melancarkan suatu ofensif politik untuk merongrong ikatan-ikatan Israel dengan Eropa dan mengendorkan komitmen Amerika terhadap Israel lewat suatu Eropa yang tunduk pada kekuatan-kekuatan Arab.<sup>8</sup>

Di masa modern ini, Irak tetap merupakan sebuah negara yang berpengaruh di Timur Tengah pada umumnya dan di dunia Arab pada khususnya karena berada di bawah ideologi Ba'ath semenjak tahun 1970-an, maka Irak menampilkan diri sebagai sebuah negara revolusioner dengan ideologi Pan Arab yang konsekwen dalam

---

<sup>8</sup> Kirdi Dipoyudo, "Irak Kekuatan Baru di Timur Tengah", *Analisa* no.6, 1981 dalam Skripsi Aminah Kusuma, *Faktor-faktor Penyebab Hadirnya Pasukan AS (Multinasional) di Arab Saudi Sehubungan dengan Invasi Irak ke Kuwait, 1992*.

upaya untuk mempersatukan seluruh negara Arab. Selain itu, Irak adalah negara yang aktif dalam Gerakan Non Blok. Irak juga merupakan negara yang besar peranannya dalam OPEC.

Dasar dari ideologi Ba'ath adalah persatuan seluruh bangsa Arab yang dimasa lalu telah memiliki suatu sejarah yang sangat gemilang dan di masa depan memiliki sebuah misi yang harus dimainkannya. Dasar-dasar politik Ba'ath digambarkan dalam tiga buah slogan, yaitu wahdah (persatuan seluruh bangsa Arab), hurriyah (kemerdekaan), dan isytirakiyah (sosialisme). Berdasarkan pada ideologi itu, maka Ba'ath tidak dapat mengakui tapal-tapal batas antara negara-negara Arab yang ada sekarang ini, karena semuanya itu merupakan buatan penjajah. Karena itu pada dasarnya ideologi Ba'ath adalah sebuah ideologi yang berorientasi pada perubahan. Kerjasama dengan negara-negara Arab yang konservatif dapat saja dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Ba'ath juga memperhatikan nasib bangsa Arab yang tinggal di luar Dunia Arab. Dalam pidatonya sebelum menjadi presiden pada bulan Juni 1975, Saddam Hussein mengatakan : "Pendek kata, kita menginginkan agar Irak memainkan peranan yang menentukan di kawasan ini, terutama di tanah air Arab. Kita menginginkan Irak memainkan peranan yang menonjol dalam mengadakan suatu konsolidasi kebijakan anti imperialis di tingkat internasional". Tidak lama setelah ia menjadi presiden, ia mengatakan dalam pidatonya bulan Oktober 1979 bahwa Irak mempunyai suatu peranan kesejarahan. Ia mengatakan bahwa berabad-abad lamanya Irak dan bangsa Arab telah dihalangi untuk memiliki unsur-unsur kekuasaan nasionalnya, yaitu, kekayaan, kepemimpinan,

ideologi dan organisasi. Namun negara Arab yang memiliki salah satu dari unsur itu, tidak memiliki unsur-unsur yang lainnya. Sekarang ini, untuk pertama kali dalam sejarah, demikian dikatakannya, Irak memiliki semua unsur itu. Hal itu menjadikannya berhak untuk melakukan suatu peranan Arab dalam sejarah.

Ideologi partai Ba'ath pada pokoknya adalah sebuah ideologi nasionalis yang berdasarkan konsep bersatunya seluruh bangsa Arab. Menurut ideologi Ba'ath itu, terdapat tiga buah tujuan kesejarahan bangsa Arab. Pertama, mempersatukan negara-negara Arab yang ada sekarang ini, karena semua negara itu dibuat oleh penjajah untuk memecah belah bangsa Arab yang satu. Kedua, kebebasan dari segala pengaruh dan hegemoni luar. Ketiga adalah sosialisme. Karena itu masalah luar negeri yang bersifat internasional luas tidak banyak mendapat sorotan dalam ideologi Ba'ath itu. Perhatian lebih banyak ditujukan pada masalah regional antar negara Arab dengan tujuan untuk mempersatukannya. Pernyataan Saddam Hussein dalam bidang luar negeri banyak persamaannya dengan yang dikemukakan oleh Presiden Nasser dari Mesir pada tahun-tahun 1950-an dan 1960-an.

Langkah Irak merebut Kuwait dan menjadikannya propinsi Irak ke-19 merupakan salah satu dari berbagai upaya Saddam Hussein untuk memenuhi ambisinya menjadi pemimpin di kawasan Timur Tengah. Beberapa pengamat pernah percaya bahwa invasi Irak ke Iran pada September 1980, ditujukan untuk menghalangi gerakan spiritual Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, mengeksport ajaran Syi'ah yang fundamentalis. Namun kini, para pengamat tersebut lebih percaya bahwa tindakan Saddam Hussein tersebut sebenarnya untuk membangun kejayaan

Irak dengan menduduki wilayah Iran, termasuk menguasai perairan Shatt al-Arab dan sejumlah ladang minyak.<sup>9</sup>

Sebenarnya niat Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin regional Timur Tengah, sudah tampak ketika dia mulai menjadi presiden pada tanggal 16 Juli 1979. Kala itu dia mencanangkan tiga tujuan, yaitu : melanjutkan perjuangan menentang persetujuan damai Mesir- Israel di Camp David, mempersiapkan pertemuan negara Non Blok pada tahun 1982 dan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan untuk meningkatkan peranannya.<sup>10</sup>

Dalam pertemuan negara-negara Arab di Baghdad pada bulan Nopember 1978, dia mencetuskan agar negara-negara Arab memutuskan hubungan dengan Mesir, karena telah berdamai dengan Israel. Waktu itu Saddam mengancam akan menyerang Kuwait jika menolak gagasan itu dan Presiden Syria Hafez al-Assad mengancam Arab Saudi dan akhirnya negara-negara Arab setuju untuk mengucilkan Mesir. Langkahnya itu akhirnya membukakan jalan bagi Irak untuk menjadi negara paling dominan di kawasan Timteng.

Selain itu salah satu strategi yang mencolok dalam politik luar negeri Irak untuk memenuhi ambisinya sebagai pemimpin di kawasan Timur Tengah adalah upaya pembentukan koalisi segitiga Irak-Yordania-Arab Saudi, yang masing-masing negara itu mempunyai perbatasan bersama dengan kedua negara lainnya. Strategi ini menempati prioritas tertinggi, karena biarpun secara ideologis berbeda, tetapi antara

---

<sup>9</sup> *Sucara Pembaharuan*, "Perang Teluk", P.T. Sinar Media Interaksi Utama, dan P.T. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hal. 173.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 178



Yordania dan Arab Saudi memiliki nilai strategis bagi kepentingan jangka panjang. Bagaimanapun Arab Saudi adalah negara Arab yang terkaya, juga merupakan negara terkemuka di jazirah Arab, sehingga tanpa dukungan Arab Saudi akan menyulitkan usaha Irak dalam meraih posisi kepemimpinan di kawasan Timur Tengah.

Sebaliknya, walaupun Yordania bukan merupakan negara terkemuka di dunia Arab, tetapi jelas Irak membutuhkan suatu garis perbatasan yang aman sebagai pemisah kekuatan Israel. Setidaknya dalam masa konflik Irak dapat menggunakan wilayah Yordania sebagai jalur untuk masuk ke wilayah Israel, sekaligus sebagai wilayah bertahan dalam rangka untuk mengurangi timbulnya kerusakan akibat perang di wilayah sendiri.

Upaya Irak untuk memantapkan pembentukan koalisi segitiga tidak menemui hambatan yang berarti, walaupun kecurigaan tetap ada, tetapi penguasa Arab Saudi tidak dapat menutup kenyataan bahwa kedudukan militer dan politik Irak jauh lebih kuat. Pendekatan terhadap Yordania bahkan bisa dikatakan tidak menemui hambatan yang berarti, karena dengan bantuan ekonomi telah dapat mempengaruhi pandangan penguasa dan rakyat Yordania akan pentingnya menjalin hubungan dengan Irak.

Keberhasilan Irak dalam membentuk koalisi segitiga ini merupakan contoh cemerlang dari keberhasilan pragmatisme politik luar negeri Irak, yang pada prinsipnya berorientasi pada doktrin Ba'ath yang kesemuanya asing bagi Yordania dan Arab Saudi.

Dengan keberhasilannya tersebut wajarlah jika Irak dapat dengan relatif mudah menduduki tempat sentral di kawasan Timur Tengah setelah Mesir dikucilkan. Kenyataan ini ditunjukkan lewat peranannya dalam berbagai pertemuan Arab, seperti Pertemuan Puncak Baghdad (Maret 1979), Pertemuan Puncak Tunis (musim gugur 1979) dan Pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri dan Ekonomi di Amman (Juli 1980). Dan pada Pertemuan Puncak itulah Irak dinobatkan sebagai pemimpin regional kawasan Timur Tengah meskipun ada negara yang mementangnya.<sup>11</sup>

#### 2.2..2.2 Posisi Irak di OPEC

Sebelumnya, pada era tahun 1950-1960 sekalipun Amerika banyak mengimpor minyak, *security of supply* tidak mengkhawatirkan pemerintah Amerika karena produksi minyak mentah di seluruh dunia masih dikuasai oleh *seven sisters* (tujuh perusahaan minyak raksasa Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf, BP dan Shell) yang sebagian besar merupakan perusahaan minyak Amerika Serikat sendiri.

Namun setelah OPEC lahir dan kontrol produksi beralih ke tangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) minyak negara anggota OPEC, maka jaminan suplai Amerika tidak lagi di tangan *seven sisters*. Terlebih setelah OPEC menunjukkan kekuatannya untuk mengurangi suplai pada tahun 1973 sebagai dampak dari konflik Arab-Israel yang menyebabkan timbulnya krisis minyak pertama.

<sup>11</sup> Kirdi Dipoyudo, "Timur Tengah - Pasaran Strategis Dunia", CSIS, Jakarta, 1981, hal.129 dan 141 dalam Skripsi Oentung Darmadji, *Aneksasi Kuwait dalam Kerangka Strategi Global Irak di Timur Tengah*, 1991.

Negara-negara yang tergabung dalam OPEC pada umumnya adalah negara-negara yang begitu menolak eksistensi negara Israel di wilayah Palestina. Negara-negara OPEC tersebut seringkali menggunakan kekuatan senjata minyaknya untuk menunjukkan kemarahannya atas pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan juga atas perlakuan yang tidak berperikemanusiaan terhadap penduduk Palestina.

Untuk menunjukkan solidaritas atas nasib Palestina tersebut, negara-negara di dunia Arab menyerukan agar minyak digunakan sebagai senjata untuk memukul pendukung-pendukung Israel. Pada tanggal 17 Oktober 1973 wakil-wakil negara penghasil minyak Arab bertemu di Kuwait sehubungan dengan sidang OPEC yang sehari sebelumnya menaikkan harga minyak dari US\$ 3,01 menjadi US\$ 5,119 per barel, memutuskan untuk menggunakan senjata minyak sebagai bentuk dukungannya untuk melawan Israel. Negara-negara Arab penghasil minyak memutuskan untuk mengurangi produksi secara berangsur-angsur sampai tercapai sasaran politik mereka, yaitu penarikan Israel dari seluruh wilayah Arab yang didudukinya dan pemulihan hak-hak rakyat Palestina. Produksi minyak pada saat itu dikurangi 5% dari tingkat produksi dari bulan sebelumnya dan selanjutnya 5% per bulan. Saudi Arabia dan Kuwait bahkan mulai dengan pengurangan 10%. Berikutnya Abu Dhabi mulai menghentikan penjualan minyak kepada Amerika yang kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya.

Kemudian pada tanggal 4 Nopember 1975 mereka bersidang lagi di Kuwait dan memutuskan untuk meningkatkan pengurangan produksi menjadi 25% dari produksi bulan September dan Desember menambahnya lagi 5%. Hal itu segera mempengaruhi negara-negara Barat yang sangat tergantung pada minyak Arab.

Ketergantungannya tersebut memaksa mereka untuk meninjau kembali sikapnya dalam menanggapi sengketa Arab-Israel. Dengan dikeluarkannya suatu pernyataan yang menyerukan penarikan Israel dari daerah-daerah pendudukan serta menegaskan bahwa semua negara di Timur Tengah harus mempunyai hak atas perbatasan yang aman dan hak-hak rakyat Palestina pun harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa Arab-Israel. Untuk selanjutnya negara-negara yang sangat tergantung pada minyak Timur Tengah tersebut mendukung Arab.

Dengan adanya kenyataan bahwa minyak Timur Tengah begitu penting dan dibutuhkan, serta kesadaran negara-negara penghasil minyak tersebut dapat menggunakan minyaknya sebagai senjata politik yang sangat efektif, kemudian negara-negara OPEC secara sepihak menaikkan harga minyaknya berkali-kali lipat. Sebagai akibatnya, pendapatan ekspor minyak Timur Tengah meningkat dari US\$ 10.100 juta pada tahun 1972 menjadi US\$ 89.700 pada tahun 1974. Dengan demikian negara-negara penghasil minyak Timur Tengah tidak hanya mampu melaksanakan suatu program pembangunan secara besar-besaran dalam bidang ekonomi ataupun sosial tapi juga mengumpulkan surplus petrodolar yang sangat besar. Dengan meningkatnya pendapatan dan kelebihan petrodolar yang dimiliki oleh negara-negara penghasil minyak Timur Tengah meningkatkan juga kedudukan mereka di dunia internasional. Dukungan politik negara-negara penghasil minyak Timur Tengah tersebut di forum-forum internasional menjadi lebih penting.

Pendapatan cukup besar yang didapatkan dari penjualan minyak, selain digunakan untuk meningkatkan pembangunan dalam negara, juga digunakan untuk meningkatkan kekuatan militer negara-negara penghasil minyak Timur Tengah. Iran, menaikkan anggaran pertahanannya dari US\$ 5.500 juta pada tahun 1974 dan US\$ 7.800 juta pada tahun 1975. Arab Saudi, anggaran pertahanannya meningkat dari US\$ 343 juta pada tahun 1969 menjadi US\$1.478 juta pada tahun 1973 dan US\$ 1.808 juta pada tahun 1974. Kuwait, untuk program perluasan angkatan perangnya menelan biaya US\$ 1.000 juta. Padahal keseluruhan pengeluaran pertahanan Amerika pada tahun tersebut hanyalah 6,2% dan Uni Soviet 5,4% dari GNP (Gross National Product).

Meningkatnya kemakmuran dan kekuatan militer negara-negara OPEC ini tentu menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat dan Israel tak lagi bisa memaksakan kepentingan-kepentingannya dan akan sulit dalam menciptakan hegemoni atas kawasan Timur Tengah.

Irak adalah anggota OPEC yang memiliki cadangan minyak yang sangat melimpah, cadangan minyaknya terbesar kedua setelah Saudi Arabia. Oleh karenanya, Irak mempunyai peran yang besar di OPEC dalam mempengaruhi quota produksi, jalur distribusi dan harga minyak dunia.

Mengingat peran dan pengaruh Irak yang begitu besar di OPEC, sangatlah logis jika Amerika melakukan invasinya ke Irak dengan berdasarkan pada motif untuk memperlemah peran OPEC. Menguasai Irak berarti akan menjadi kunci bagi Amerika untuk memaksa OPEC berhitung dengan produksinya. Menguasai Irak sama pula halnya dengan mengacaukan kontrol minyak yang hendak dimainkan OPEC.

### BAB III

## POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAK

### 3.1 Sejarah Hubungan Amerika Serikat-Timur Tengah

Hubungan antara Amerika Serikat dan Timur Tengah dapat dibagi ke dalam tiga periode yang berbeda-beda : pertama, berakhir pada tahun 1941; kedua, selama periode perang 1941-1945; dan yang ketiga setelah tahun 1945.

Dalam periode pertama, Amerika tidak menunjukkan minat politis yang tetap terhadap wilayah ini. Sejak dulu orang Amerika yang mencurahkan perhatian secara serius pada wilayah Timur Tengah hanyalah para misionaris Protestan dan pendidik.

Peristiwa pertama intervensi politik Amerika terjadi pada tahun 1918-1919 pada waktu penyelesaian perdamaian.<sup>1</sup> Butir 12 dari empat belas butir Wilson secara khusus berkenaan dengan pembagian Imperium Usmaniyah, dan prinsip umum penentuan nasib sendiri. Prinsip ini lalu diejawantahkan oleh Presiden Wilson dengan mengirimkan dua misi ke Timur Tengah untuk mengetahui dengan pasti kehendak rakyat yang bersangkutan; misi King-Crane ke Suriah dan Palestina serta misi Harbord ke Armenia. Namun setelah kematian Wilson dan penghapusan perjanjian Versailles, Amerika menarik diri dari politik dunia sehingga menyerahkan Timur Tengah pada muslihat mereka sendiri.

---

<sup>1</sup> G.Lenczowski & Bixby Asgar, *Timur Tengah di Tengah Karcah Dunia*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1991.

Perhatian Amerika selanjutnya terhadap kawasan ini bersifat sporadis. Amerika, dalam memusatkan perhatiannya pada masalah ekonomi sebagai satu-satunya masalah yang berarti, bersikeras mempertahankan prinsip pintu terbuka, terutama di wilayah mandat Inggris. Pada tahun 1924 dibuat persetujuan Inggris-Amerika mengenai persamaan peluang di Palestina. Di pihak lain, penemuan minyak di Irak menyebabkan perbedaan pendapat sementara antara perusahaan Amerika dan Inggris tentang barang rampasan Turkish Petroleum Company Praperang. Perbedaan pendapat ini semakin rumit karena kelompok Amerika lain yang dikenal sebagai Ottoman American Development Company yang diketuai oleh Admiral Chester, berusaha meratifikasi konsesi lamanya di Turki (1909), yang gagal pada tahun 1913 akibat tentangan Inggris dan Jerman. Pada 9 April 1923 Turki memberikan konsesi eksklusif mineral, jalan kereta api dan minyak kepada Chester mulai dari Ankara dan melalui Sivas, Kharput dan Diarbekir, terus melewati Mosul hingga perbatasan Persia. Dimasukkannya wilayah Mosul yang kontroversial ke dalam konsesi ini, tidak lama sebelum perjanjian Lausanne, berarti bahwa kepentingan kelompok Chester akan berbenturan dengan klaim Inggris atas Mosul dalam kedudukannya sebagai pemegang mandat bagi Irak. Pada tahun 1922 Standar Oil Company dari New Jersey mencapai persetujuan dengan Inggris dimana perusahaan tersebut mendapat bagian 25 persen dari sumber minyak Irak, yang berarti ia mendapat kepentingan tetap dalam kendali Inggris atas Mosul. Kedua kelompok industri ini mengharapkan dukungan pemerintahnya dan untuk sementara tampaknya Amerika terseret ke dalam kontroversi politik yang tidak menyenangkan. Selama lebih dari dua tahun perkara itu

ditanggihkan karena perjanjian Lausanne tidak dapat menyelesaikan secara pasti masalah Mosul ini. Akan tetapi, pada tahun 1925, dengan penyerahan wilayah sengketa Irak itu oleh Dewan LBB, hak Chester otomatis tidak diakui. Hal ini memberi peluang ke arah tercapainya persetujuan yang pasti antara kelompok perusahaan minyak Amerika dan pemerintah Inggris, persetujuan yang mendapat restu dari Departemen Luar Negeri karena mencerminkan prinsip pintu terbuka.

Di luar masalah ekonomi ini, perhatian Amerika Serikat tertarik ke Timur Tengah adalah karena hubungannya dengan masalah Palestina. Lahirnya Deklarasi Balfour 1917 adalah akibat pengaruh kaum Yahudi Amerika yang didukung oleh sikap bersahabat pemerintahnya. Akan tetapi, dengan pemberian mandat, yang jelas menyebabkan terpenuhinya Deklarasi, perhatian resmi Amerika terhadap Palestina berkurang karena menganggap bahwa mandat itu pada dasarnya memenuhi aspirasi Zionis. Dua faktor lain yang menyebabkan berkurangnya perhatian Amerika adalah : adanya kenyataan bahwa kepemimpinan Zionisme Dunia berada di tangan Yahudi Inggris (bukan Yahudi Amerika); dan yang lainnya adalah kenyataan bahwa hingga 1939 Inggris tidak secara drastis membatasi imigrasi Yahudi ke Palestina sehingga membiarkan tumbuhnya tanah air Yahudi. Ringkasnya, pendekatan politik Amerika terhadap Timur Tengah hingga tahun 1941 dapat digambarkan sebagai tidak acuh, beritikad baik dan yakin bahwa wilayah ini menjadi perlindungan Inggris dimana tidak ada kepentingan utama Amerika yang terlibat.



Pada periode 1941-1945, Amerika mendadak mengembangkan hubungan bergandanya dengan Timur Tengah. Urusan di kawasan ini tidak lagi hanya urusan Inggris. Pasukan Amerika Serikat muncul di Iran untuk menangani suplai ke Rusia; mereka juga datang di Mesir dan Palestina, terutama untuk menyelesaikan berbagai tugas teknis yang berkaitan dengan kendaraan lapis baja Amerika yang menjadi perlengkapan Inggris. Angkatan laut dan armada niaga Amerika memegang peranan penting dalam pengiriman perlengkapan ke medan perang timur Tengah. Dan angkatan udara Amerika membuat mata rantai pangkalan-pangkalan yang menghubungkan Afrika Utara dengan medan perang India-Burma-Cina. Ikatan militer dengan kawasan ini diperkuat dengan beberapa tindakan ekonomi : Amerika memberikan pinjam sewa kepada kebanyakan negara Timur Tengah, dan memberika perhatian aktif terhadap pengaturan sementara mengenai produksi minyak. Terutama untuk melayani keperluan strategis Amerika di Timur Jauh, Anglo-Iranian Oil Company menyesuaikan fasilitasnya untuk menghasilkan minyak oktan tinggi bagi pesawat terbang. Dan pada tahun 1943 Harold Ickes, administrator autoritas minyak Amerika, menganjurkan partisipasi aktif pemerintah dalam pipa yang diproyeksikan melalui padang pasir Arabia. Tanggung jawab Amerika dalam hal ini berkembang sampai suatu tingkat sehingga pada tahun 1944 pemerintah merasa perlu mengangkat seorang pejabat tinggi, James Landis, sebagai menteri ekonomi Amerika untuk Timur Tengah. Pada waktu yang sama pemerintah membentuk pos atase perminyakan untuk seluruh kawasan yang menjadi bagian dari Kedubes Amerika di Kairo.

Pemerintah juga menjadi lebih waspada terhadap masalah politik Timur Tengah. Kolonel Donovan, Direktur Biro Dinas Strategi, Werdell Willkie, yang bertindak sebagai wakil pribadi Presiden; Dubes Hariman; dan sejumlah pejabat tinggi lain mengunjungi wilayah ini selama perang. Bahkan Presiden Roosevelt melaksanakan konferensi dengan penguasa Arab di Zone Terusan Suez. Amerika telah menunjukkan sikapnya yang bersahabat dan membantu Arab Saudi pada saat terjadinya krisis ekonomi, dan pada Suriah dan Libanon dalam perjuangan kemerdekaan mereka.

Pada periode 1945 (pasca perang), peningkatan perhatian terhadap Timur Tengah ini meluas. Minyak, Palestina dan ancaman Soviet merupakan tiga hal yang menjadi fokus perhatian Amerika di kawasan Timur Tengah ini. Perkembangan yang mengagumkan dalam produksi minyak di Arab Saudi dan Kuwait, dengan saham-saham Amerika di Bahrain, Irak dan Mesir, menyadarkan para pemimpin Amerika akan pentingnya kawasan strategis ini. Penolakan Deklarasi Balfour oleh Inggris lewat Naskah Putih (1939), disertai perselisihan di Palestina, menyebabkan Amerika perlu menetapkan posisinya, yang menjadi lebih mendesak karena nasib Yahudi di Eropa dan karena pengalihan kepemimpinan Zionis kepada Yahudi Amerika. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekspansionisme Soviet telah memaksa Washington untuk merumuskan kebijakan dan mengambil langkah untuk melindungi Timur Tengah dan mengamankan kepentingan vital Barat disana. Ujian pertama terjadi di Iran (1945-1946) ketika Rusia berusaha menundukkan negeri itu lewat dukungannya kepada pemberontakan Azerbaijan dan pemilikan konsesi minyak dengan paksa.

Reaksi Amerika adalah mendorong Iran untuk melawan tekanan Rusia, dan sebagaimana kemudian diungkapkan oleh Presiden Truman, memperingatkan Rusia atas aksi agresifnya lebih lanjut.

Lebih lanjut Washington ingin menarik negara-negara Arab ke dalam kerjasama militer yang lebih luas dengan kerjasama pertahanan regional yang dipolakan pada aliansi NATO, Washington ingin menarik negara-negara Arab ke dalam rencana kerjasama militer yang lebih luas yang akan meliputi Timur Tengah secara keseluruhan. Namun, dalam hal ini kebijakan Amerika mendapat tanggapan negatif. Negara Arab terkemuka, Mesir, menolak menerima usul Komando Timur Tengah yang disponsori Barat, malahan mengumumkan kebijakan netralisme positif. Pusat-pusat Arab nasionalis lainnya meniru contoh Mesir. Pada tahun 1953 jelas bahwa usaha lebih lanjut untuk menciptakan aliansi regional dengan partisipasi Arab tidak akan berguna. Menteri Luar Negeri John Foster Dulles mengakui hal ini sekembalinya dari Timur Tengah pada musim dingin tahun itu. Penolakan Arab untuk ikut bergabung dengan aliansi pertahanan regional dibawah Amerika adalah karena alasan sebagai berikut : (1) dunia Arab belum menerima eksistensi Israel yang dipandang sebagai ciptaan dan pos depan imperialisme Barat; (2) sisa-sisa kolonialisme Eropa Barat di dunia Arab dipandang sebagai ancaman yang lebih besar bagi kemerdekaan dan kesejahteraan Arab daripada imperialisme Soviet; (3) nasionalis Arab benci akan kemungkinan hubungan klien-majikan yang akan diminta kerjasama militer dengan Barat, dan curiga hal itu akan menjadi alat neokolonialisme; (4) mereka ingin melindungi negara-negara mereka agar tidak menjadi ajang

pertempuran sebagai akibat kemungkinan perluasan perang ke wilayah mereka pada masa yang akan datang.

Karena gagal di inti Arab di Timur Tengah, Washington kembali ke kawasan dimana selalu ada kesadaran akan ancaman Soviet, yakni Barisan Utara. Pakta Baghdad adalah hasilnya. Ia mempersatukan tiga negara non Arab (Turki, Iran dan Pakistan), satu Arab (Irak), dan satu Barat (Inggris) dalam satu aliansi militer. Amerika sendiri tidak ikut bergabung secara resmi, sebagian karena kekhawatiran diasingkan oleh rezim revolusioner Mesir dan semua unsur dunia Arab yang mengikutinya. Tidak lama kemudian perwakilan sipil dan militer Amerika aktif dalam berbagai komisi Pakta Baghdad sehingga membuat Amerika dalam praktek menjadi anggota meskipun resminya bukan anggota persekutuan ini.

Dimulai dengan Pakta Baghdad, Amerika dihadapkan pada reaksi berantai gerakan politik yang memperdalam jurang antara Amerika dan nasionalis Arab. Perjanjian senjata Moskwa-Kairo adalah peristiwa besar kedua dalam kisah sedih ini, yang diikuti dengan penarikan tawaran Bendungan Aswan, nasionalisasi Terusan Suez dan perang Suez. Perang itu memberikan peluang guna memperbaiki kerusakan pada masa lalu karena Amerika tampil untuk membela korban agresi, Mesir. Sebenarnya, ada periode singkat dimana pengakuan atas sikap Amerika dan ucapan terima kasih untuk itu diucapkan oleh Nasser dan nasionalis Arab lainnya. Perolehan itu segera disusul oleh dua tindakan kebijakan Amerika, yaitu : (1) pengesahan prinsip kebebasan pelayaran di Teluk Aqaba oleh Menlu Dulles, dan (2) pernyataan politik Presiden (5 Januari 1957) yang dikenal sebagai Doktrin Eisenhower.

Asal mula dikeluarkannya doktrin itu disebabkan oleh kekhawatiran Washington terhadap penetrasi komunis internasional ke dunia Arab segera setelah berakhirnya Perang Suez, runtuhnya pengaruh Inggris di kawasan ini dan juga bangkitnya kembali permusuhan nasionalis Arab terhadap Barat

### **3.2 Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Irak**

Pada tahun 1968, partai Ba'ath mengambil tampuk kekuasaan. Partai ini menekankan pada nasionalisme Arab, sosialisme Arab. Di bawah partai ini Irak menjadi salah satu negara Arab terkuat. Dan pada saat yang bersamaan tetangganya, Iran tengah gencar melancarkan revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, pemimpin Syi'ah. Irak khawatir revolusi itu dilakukan dengan menyebarkan ajaran Syi'ah pada Irak, padahal mayoritas mereka adalah Sunni. Bagi Irak, revolusi itu selain mengancam pemerintahan Ba'ath juga akan menghancurkan konsep nasionalisme Arab yang telah dirintis Irak dan negara lainnya.

Untuk mencegah hal tersebut, maka Irak dengan dukungan negara-negara lainnya menyerbu Iran pada September 1980, yang kemudian meletus menjadi perang delapan tahun. Dalam pandangan Amerika, apabila Irak kalah dalam perang, maka itu akan merusak peta politik Teluk Persia, Timur Tengah dan Laut Tengah akan berubah pula. Maka Amerika membantu Irak dengan memasok persenjataan militer beserta perlengkapannya. Akan tetapi semenjak terjadinya invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990, maka berakhirilah hubungan baik antara Amerika Serikat dan Irak tersebut. Karena Amerika mempunyai banyak kepentingan di Kuwait dan Timur Tengah.

Amerika Serikat pasca Perang Teluk 1991 telah mengokohkan hegemoninya di kawasan Timur Tengah. Suplai minyak ke Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya berjalan lancar dengan harga yang dapat dikendalikan. Dan yang tak kalah penting, akses militer ke Timur Tengah untuk mendukung hegemonitasnya, Amerika mempunyai perjanjian militer dengan Kuwait, Arab Saudi, Bahrain dan Turki. Prinsip dasar dari strategi Amerika Serikat di kawasan Teluk Parsi adalah mempertahankan keseimbangan kekuatan yang dikehendaki, dari satu sisi untuk melindungi kepentingan Amerika terhadap negara-negara sahabatnya dan di sisi lain melancarkan akses minyak pada harga yang stabil.

### 3.3 Proses Perumusan Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Dalam pemerintahan Amerika, kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh empat faktor (*big four*) yaitu Presiden, Birokratis, Kongres dan *The Court*. Disamping keempat aktor tersebut, kelompok-kelompok kepentingan khusus yang *unofficial* dan media massa mempunyai pengaruh yang besar terhadap kebijakan luar negeri Amerika.

Dari keempat aktor itu, Presiden merupakan pemegang utama kebijakan luar negeri. Meskipun Presiden sebagai aktor kunci kebijakan luar negeri tapi peranannya masih dipengaruhi oleh Birokrasi dan Kongres. Sedang *The Court* dalam pemerintahan merupakan badan yudikatif, sehingga jarang terlibat dalam penentuan kebijakan luar negeri. Jadi dengan demikian kebijakan luar negeri Amerika didominasi oleh badan eksekutif dan legislatif.

Birokrasi sebagai badan eksekutif bersama Presiden memiliki wewenang untuk menentukan dan melaksanakan politik luar negeri. Sedangkan Kongres (legislatif) secara konstitusional mempunyai peranan implisit dalam mengawasi lembaga eksekutif dan peranan eksplisit dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri. Sehingga apabila seorang Presiden sering menekankan bahwa ia adalah satu-satunya pemegang otoritas mengenai kebijakan luar negeri, namun ia selalu membutuhkan otoritas Kongres untuk berbagai keputusan yang diambil dalam masalah-masalah tertentu. Seorang presiden bisa lebih kuat atau berpengaruh jika ia bekerjasama dengan Kongres.<sup>2</sup> Tetapi secara umum dalam pengambilan kebijakan luar negeri, kedudukan lembaga eksekutif selalu memimpin dan merumuskannya dengan sedikit sekali campur tangan atau petunjuk dari Kongres.

Aktor lain dalam pemerintahan Amerika yang tak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri adalah kelompok-kelompok kepentingan. Perhatian ini biasanya dicurahkan kepada para lobbist, baik yang duduk dalam jajaran pemerintahan maupun non pemerintahan. Gary Schuman menyatakan bahwa untuk masalah kebijakan luar negeri yang sangat penting, biasanya pemerintah yang paling menentukan walaupun kadang-kadang agak mengalah untuk tidak mengabaikan suatu kelompok tertentu.

---

<sup>2</sup> Gary Schuman, Hubungan Indonesia-Amerika Serikat, CSIS, 1985.

Terkait dengan kelompok kepentingan (*interest group*) ini didefinisikan sebagai berikut :

*"Interest group is an organized group of individuals sharing common objectives who actively attempt to influence policymakers in all three branches of the government and at all levels. Also called pressure group or lobby".<sup>3</sup>*

Struktur sistem politik Amerika memungkinkan individu dan kelompok untuk mempengaruhi sistem. Kelompok kepentingan berkali-kali berusaha untuk mempengaruhi tindakan pemerintah untuk kepentingan-kepentingannya. Di dalam pemerintahan Amerika terdapat badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Jika suatu kelompok kepentingan merasa dirugikan oleh badan legislatif dengan undang-undangnya, maka mereka akan berusaha mempengaruhi gubernur, pihak yang dapat memveto pembuatan undang-undang dan mereka berusaha mempengaruhi birokrasi (*the bureaucracy*) untuk merintangi implementasi undang-undang. Cara lain yang dilakukan adalah dengan menghalangi pembuatan undang-undang di pengadilan. Pada pemilihan selanjutnya, kelompok kepentingan berusaha menolak pihak terpilih yang telah mendukung rencana undang-undang. Jika menjumpai ketidakpuasan di *level state*, kelompok kepentingan berusaha untuk menggerakkan debat di *level federal*. Seluruh institusi pemerintah mengajukannya di bawah amandemen pertama pada konstitusi, yang menjamin hak warganegara dalam berkumpul dan petisi pemerintah untuk memperbaiki *grievance*.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Barbara A. Bardes, Mack C. Shelley II, Steffen W. Schmidt, *American government and Politics Today : The Essentials*, Wadsworth Publishing Company, USA, 1998, hal 227.

<sup>4</sup> *Ibid.* hal.230.



Sedangkan media massa di Amerika bisa bersifat dua arah, dalam arti untuk membentuk opini masyarakat tentang kebijakan luar negeri pemerintah atau sebagai media untuk memberikan reaksi terhadap kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan di White House sebagai tempat penentu utama kebijakan luar negeri adalah sebagai berikut :

1. persetujuan adanya fakta;
2. kesepakatan pada tujuan kebijakan;
3. mendefinisikan secara tepat masalah yang dihadapi;
4. memusyawarahkan semua solusi yang mungkin;
5. mendata semua akibat yang mungkin timbul dari masing-masing solusi;
6. merekomendasi dan membuat pilihan akhir dari satu alternatif;
7. pengkomunikasian dari pilihan tersebut;
8. tindakan itu sendiri serta menilai hasil-hasil tindakan.

### **3.4 Pengaruh Lobi Yahudi Dalam Penentuan Politik Luar Negeri AS**

Sistem pemerintahan Amerika Serikat merupakan perwujudan sistem trias politika Montesquieu, yang memisahkan badan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Dalam pelaksanaan pemerintahan, terutama di bidang politik luar negeri, eksekutif (presiden) harus memperoleh persetujuan Kongres, seperti mengangkat Duta Besar, memberi bantuan, menjual senjata, menyatakan perang, dan lain-lain. Karena begitu pentingnya Kongres, sehingga setiap kelompok masyarakat atau kelompok politik yang ingin aspirasinya tersalur, berusaha untuk mempengaruhi para senator dan

kongreswan dengan membentuk lobi. Merupakan suatu kebiasaan dalam arena politik Amerika bahwa anggota-anggota Kongres dipetisi lobist-lobist, agar suatu undang-undang yang dapat berpengaruh atas *interest* golongan mereka, ditolak atau diololoskan oleh Kongres, karena Kongres menjadi kunci penentu kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Paul Mc Closkey, menyatakan bahwa, “Perlobian adalah merupakan bagian penting dan terhormat dalam proses politik Amerika Serikat”.<sup>5</sup> Setiap anggota Kongres Amerika, dipengaruhi oleh hampir sepuluh orang lobist. Seorang anggota Kongres yang berpengaruh bahkan dipengaruhi oleh lebih dari jumlah tersebut. Hampir separuh dari undang-undang yang lolos dari Kongres, diperkirakan adalah hasil “garapan” lobist-lobist itu. Mereka berusaha mempengaruhi anggota-anggota Kongres dengan menggunakan hak suara mereka, memberi kesaksian-kesaksian kepada komite, memuat tulisan-tulisan di media massa, melakukan pembicaraan pribadi dengan tokoh-tokoh berpengaruh dan sebagainya.

Lobi yahudi adalah lobi yang terkuat, paling efektif dan paling terorganisir dengan baik di Amerika Serikat. Lobi Yahudi ini merupakan lobi untuk membina hubungan antara pemerintah Amerika dengan Israel. Kekuatan lobi Yahudi di Amerika Serikat dapat pula diketahui dari pernyataan Jenderal George Brown, Ketua Joint Chiefs of Staff pada tahun 1974 :

---

<sup>5</sup> Findley Paul, *Mereka Berani Bicara : Menggugat Dominasi Lobi Yahudi*, Mizan, Pengantar : Roeslan Abdul Gani, Bandung, 1990, hal.11.

*"... It is so strong you wouldn't believe now.... We have the Israelis coming to use for equipment. We say we can't possibly get the Congress to support a programme like that. They say, "Don't worry about the Congress". We'll take care of the Congress. Now this is somebody from another country, but they can do it...."*<sup>6</sup>

Beberapa organisasi lobi Yahudi di AS yang terkenal antara lain :

1. AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee) atau Komite Urusan Publik Israel-Amerika Serikat
2. AJC (American-Jewish Committee) atau Komite Yahudi Amerika
3. JNF (Jewish National Fund) atau Dana Nasional Yahudi
4. American-Jewish Congress
5. B'nai B'rith International
6. B'nai B'rith Anti Defamation League
7. B'nai B'rith Women
8. Jewish Community Council
9. Jewish War Veteran
10. National Jewish Welfare Board
11. National Council of Jewish Women
12. National Conference on Soviet Jewry
13. Institute for Jewish Policy Planning and Research
14. Zionist Organization of America
15. Union of American Hebrew Congregation

<sup>6</sup> "Kecenderungan Timbang Tahun 1980-an & Lobi Israel", *Balitbang Dephu*, hal.276 dikutip dari skripsi Indrawati, *Peranan & Pengaruh Lobi Yahudi dalam Proses Pengambilan Keputusan di Amerika Serikat*. 1991.

Sejauh ini, kekuatan lobi politik yang paling dahsyat di Amerika bekerja untuk Israel, dikomandani oleh Komite Aksi Publik Israel Amerika (AIPAC). Hampir tidak ada anggota Kongres yang kampanye pemilihannya tidak didanai oleh AIPAC. Kongres pun dipenuhi oleh para “yes-men” Israel.

Kekuatan lobi Yahudi tersebut didukung oleh beberapa faktor yaitu faktor kultural, psikologis, ekonomi dan politis.

#### A. Faktor Kultural

Pada umumnya pemerintah dan sebagian rakyat Amerika percaya akan “Judeo-Christian Ethic” (Etik Yahudi-Kristen), yakni suatu anggapan bahwa antara Yahudi dan Kristen mempunyai hubungan yang erat, seolah-olah mereka masih merupakan keluarga besar yang harus saling membantu.

Presiden Amerika Jimmy Carter, pernah mengatakan bahwa hubungan antara Amerika dan Israel tidak dapat dihancurkan, sebab berakar pada kesadaran moral, agama dan kepercayaan bangsa Amerika sendiri.<sup>7</sup>

Secara emosional, banyak masyarakat Kristiani Eropa yang menaruh simpati terhadap Yahudi sebagai satu ikatan ras dan dengan satu kenyataan bahwa etos keilmuan Yahudi banyak dipengaruhi oleh ilmuwan-ilmuwan Kristen Eropa dan Amerika, sehingga tidak mengherankan jika ada dukungan dari negara-negara Eropa dan Amerika terhadap Yahudi.

---

<sup>7</sup>R. Garudi, *Israel dan Praktek-Praktek Zionisme*, Pustaka, Bandung, 1988, hal. vii.

Banyak penganut Krsiten Amerika, baik yang konservatif maupun yang berasal dari aliran utama, mendukung Israel karena persamaan nilai-nilai politik, kultural, dan dalam kaitannya dengan holocaust. Tak sedikit kaum konservatif yang merasa bahwa terbentuknya Israel pada tahun 1948, merupakan perwujudan dan nubuwat Biblikal, dan bahwa negara Yahudi itu akan terus memainkan peranan sentral dalam rencana Ilahiyah. Hampir semua orang Kristen mendukung Israel dan cenderung menolak atau menentang suara apapun yang mempersoalkan kebijakan Israel. Lobi itu telah memanfaatkan secara besar-besaran dukungan ini dengan menggencarkan program-program nasionalnya.

#### B. Faktor Psikologis

Sebagian besar rakyat Amerika terpedaya dengan propaganda Yahudi yang selalu menyegarkan kembali ingatan rakyat Amerika terhadap pengalaman pahit Yahudi pada masa eksodus, diaspora dan holocaust.

Lobi Yahudi menggencarkan kampanye nasional yang membangkitkan kembali kenangan atas pembantaian massal Nazi terhadap enam juta kaum Yahudi Eropa selama Perang Dunia II melalui pemutaran-pemutaran film dan buku-buku. Cara-cara seperti ini akan dapat mempengaruhi sejumlah kecil suara disana-sini, sehingga mempermudah perlobian. Banyak orang Amerika yang mengidap rasa berdosa atas peristiwa holocaust ini, akibat perasaan ini, orang Amerika menjadi cemas kalau dituduh anti-semit. Dan kecemasan ini akan jauh lebih efektif dalam membungkam para kandidat politik daripada pejabat-pejabat pemerintah, daripada ancaman-ancaman penarikan suara atau uang untuk kampanye.

### C. Faktor Ekonomi

Modal Yahudi-lah yang menguasai dunia industri dan perdagangan Amerika. Lobi Yahudi di Amerika sangat kuat dan mengakibatkan pengaruh mereka sangat besar dalam perumusan kebijakan luar negeri di Amerika Serikat.

Para kandidat Presiden Amerika juga tergantung pada sumbangan dari sumber-sumber Yahudi. Komite Nasional Demokrat, yang tugasnya mengupayakan kekuasaan partai demokrat di Gedung Putih selama bertahun-tahun menerima kira-kira 50% dananya dari Yahudi. Ada banyak orang Yahudi yang berduit melimpah, yang sudah lama tahu bahwa mereka dapat memperoleh pengaruh yang jauh melebihi jumlah mereka dengan memberikan sumbangan-sumbangan strategis terhadap para kandidat.

### D. Faktor Politis

Kekuatan lobi Yahudi dikarenakan salah satunya oleh banyaknya orang-orang Yahudi Amerika (pro Israel) yang menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan atau kongres, sehingga dengan posisi ini lobi Yahudi dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan di Amerika dengan lebih mudah.

Rata-rata warga negara Amerika berketurunan Yahudi aktif dalam kegiatan politik, data demografis juga menunjukkan bahwa sebagai suatu kelompok, orang-orang Yahudi adalah warga negara yang paling terpelajar, paling profesional dan paling kaya. Memang tidak seluruh Yahudi Amerika membela politik ekspansionis Israel, tapi sebagian besar jelas telah dipengaruhi oleh propaganda Zionis dan sedikit banyak cenderung bersikap pro-Israel. Banyak diantara keturunan Yahudi ini yang menjadi penasihat politik calon senator atau calon presiden Amerika. Jika tokoh yang

didukungnya menang, merekapun akan memperoleh kursi dalam kabinet. Dengan demikian mereka dapat lebih mudah mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik Amerika Serikat.

Kekuatan lobi Yahudi ini telah menguasai dan mempengaruhi para pejabat dan lembaga pemerintahan Amerika dengan sentimen pro-Israel. Seperti kongreswan dikuasainya dengan jalan memberi dukungan dana, media massa pada waktu pemilihan di distriknya. Sedangkan dalam birokrasi seperti Departemen Luar negeri, Departemen Pertahanan, posisi lobi Yahudi telah merasuk dengan membentuk jaringan diantara para pejabat. Kiprah lobi Yahudi di Amerika adalah demi eksistensi negara Israel. Dengan kekuatannya dalam setiap tingkat pemerintahan lobi Yahudi berhasil mengontrol politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel.

#### 1. Di Gedung Putih

Tekanan lobi Yahudi atas Gedung Putih dilakukan pada berbagai *level*. Tekanan *level* pertama biasanya ditujukan langsung pada orang yang memegang atau yang sedang mengupayakan jabatan Presiden. Terhadap kandidat Presiden, bantuan yang diberikan tidak tanggung-tanggung mulai dari jumlah suara pemilih Yahudi, media massa sampai dana-dana kampanye. Sebagai imbalannya lobi Yahudi dapat menekan politik luar negeri Amerika di Timur Tengah untuk mendukung Israel. Hal ini dialami oleh hampir semua Presiden Amerika, sejak berdirinya Israel pada tahun 1948.

Sedangkan tekanan *level* kedua dilakukan terhadap presiden yang telah menduduki Gedung Putih, penekanan dilakukan oleh sahabat-sahabat pribadi yang pengaruhnya hanya terbatas pada presiden itu sendiri.

Tekanan *level* ketiga dilakukan terhadap kepresidenan yang dilakukan pada pejabat-pejabat penting di departemen-departemen seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan juga Dewan Keamanan Nasional. Di tempat-tempat ini para pejabat pemerintah dipengaruhi dengan sentimen pro-Israel, sehingga laporan mereka pada atasan (kabinet atau wakil mereka) bersifat pro-Israel. Dengan demikian dalam pemerintah dari *level* terendah sudah dikuasai oleh lobi Yahudi.

## 2. Pada Birokrasi

Dalam pemerintahan, jaringan intelijen lobi Yahudi telah merasuk ke dalam birokrasi. Dengan sejumlah besar sukarelawan di semua jenjang yang akrab dengan sumber pemerintah, yang berkaitan dengan masalah-masalah Israel telah dibuat tidak berdaya menghadapi tekanan lobi Yahudi, walaupun suatu informasi yang sangat rahasia pasti akan diperoleh. Bila pemerintah Amerika mengetahui mengenai informasi rahasia yang telah diperoleh lobi Yahudi jarang sekali atau bahkan tidak pernah diselidiki oleh pejabat yang berwenang.



Terhadap kerahasiaan sumber informasi di Amerika, lobi Yahudi dapat secara terang-terangan menembus pertahanan yang paling kokoh untuk memperoleh informasi rahasia yang mereka inginkan, namun jika mereka bermaksud menjaga informasi yang telah mereka peroleh agar tetap rahasia, maka siapapun tidak akan bisa menembus pertahanan mereka.<sup>8</sup>

### 3. Pada Capitol Hill

Kongres Amerika yang secara eksplisit mempunyai peranan besar untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri juga menjadi sasaran lobi Yahudi. AIPAC sebagai organisasi Yahudi terbesar di Amerika berhasil mengontrol Kongres di Capitol Hill, terutama Komite Urusan Luar Negeri yang membidangi Timur Tengah.

Seperti dalam pemilihan presiden, kandidat Kongres yang pro-Israel dibantu baik dalam bentuk dana, media massa dan suara pemilih Yahudi. Sebagai konsekwensinya, hampir seluruh anggota Kongres mentaati permintaan lobi Yahudi, sebab umumnya mereka menganggap AIPAC sebagai representasi langsung di Capitol Hill dari sebuah kekuatan politik yang bisa membuka dan menutup peluang-peluang mereka pada waktu pemilihan anggota Kongres.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Paul Findley, *Mereka Berani Bicara*, Mizan, Bandung, 1993, hal. 211.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 55.

Terhadap para calon anggota Kongres dan Senat, pelobi Yahudi yang berada di Kongres menanyai setiap anggota Kongres dan Senat mengenai pandangannya terhadap Israel dan Timur Tengah. Sehingga mereka bisa menentukan sikap dan dukungan mereka terhadap kandidat anggota tersebut. Jika kandidat tersebut bersikap positif terhadap Israel, maka ia akan dibantu sepenuhnya oleh lobi Yahudi dalam proses menjadi anggota Kongres atau Senat. Tetapi jika tidak maka ia akan tersingkir dari keanggotaan dewan perwakilan tersebut.

Seorang partisipan konferensi internasional tentang Palestina di Jenewa, Lord Mayhew mengungkapkan bagaimana sebenarnya Kongres Amerika seringkali merupakan suatu badan perwakilan yang bertingkah laku bebas sebagai tuan rumah di rumahnya sendiri. Namun dalam masalah Palestina, Kongres Amerika secara finansial sangat korup, sebab ia telah dibeli oleh suatu pemerintahan asing yaitu pemerintah Israel melalui lobi Zionisnya di Amerika.

### 3.5 Pengaruh Kelompok Kepentingan Bisnis & Kelompok Militer didalam Pemerintahan AS

Perusahaan minyak Amerika Serikat merupakan industri yang memiliki ikatan yang sangat kuat para pemegang keputusan di Amerika Serikat. Presiden Bush sendiri adalah Kepala Bagian Perusahaan Minyak Texas, yang menerapkan kebijakan energi nasional yang mengandalkan pada perluasan sumber-sumber minyak baru secara agresif. Wakil Presiden, Dick Cheney ada dibagian CEO pelayanan minyak raksasa Halliburton. Penasehat keamanan nasional Condoleezza Rice adalah direktur bagian Chevron.

Selain itu Amerika Serikat kini dikendalikan oleh figur-figur perusahaan transnasional. Ada Richard Armitage, Wakil Menteri Luar Negeri (pembuat pesawat terbang, termasuk pesawat tempur), Wakil Presiden Dick Cheney dan Wakil Kepala Staf AU Peter Teets dari Lockheed Martin (pembuat pesawat dan tank), Northrop Grumman (pembuat persenjataan) berhasil menempatkan James Roche sebagai Kepala Staf AU dan Paul Wolfowitz sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Kepala Staf AU kini dipegang oleh Gordon England dari General Dynamics (perusahaan yang merancang sistem pertahanan rudal AS). Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld berasal dari Center for Security Policy (CSP) perusahaan yang merancang sistem pertahanan rudal.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> M. Ismail Y., "Negara Perusahaan", *Suara Hidayatullah*, Edisi Khusus 15 tahun Mei-Juni 1988-2003, hal.78.

Dewan Kebijakan Pertahanan Amerika didominasi oleh kelompok anti-Irak yang menginginkan serangan atas Irak dengan segera. Orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut mendesak perubahan-perubahan kebijakan pemerintah Amerika melalui sebuah operasi "dari dalam ataupun luar". Bila tidak bisa mengubah kebijakan lewat pemberian nasihat, Jaringan ini juga dapat menjalankan operasi-operasi rahasia sebagai "pemerintah dalam pemerintah", sebagaimana mereka lakukan selama kasus Iran-kontra.

Ketua Dewan Kebijakan Pertahanan, Richard Perle, bekas asisten Menteri Pertahanan untuk urusan keamanan internasional di masa pemerintahan Ronald Reagan, kini aktif di sebuah lembaga neokonservatif American Enterprise Institute. Inilah orang yang pernah merancang gagasan tentang perang nuklir Armageddon di masa Perang Dingin. Perle juga merupakan aset penting bagi sebuah kelompok bisnis multinasional Hollinger Internasional, Inc. milik miliuner Conrad Black. Hollinger memiliki raksasa media Inggris yang dekat dengan partai konservatif, Telegraph Plc, sekaligus koran Jerusalem Post, yang selalu haus perang.

Anggota "kelas berat" lain Dewan Kebijakan Pertahanan Amerika Serikat adalah orang-orang fanatik ahli geopolitik dari kalangan Israel-AngloAmerika dari beberapa dekade silam, diantaranya : bekas Menlu Henry A. Kissinger, yang juga anggota Dewan Penasehat Internasional Hollinger; bekas Ketua DPR AS Newt Gingrich; bekas Direktur CIA masa Clinton, R. James Woosley; bekas Wakil Kepala Staf Gabungan Laksamana David E. Jeremiah; bekas Wakil Presiden Dan Quayle;

bekas Menteri Pertahanan dan Energi James R. Schlesinger, dan bekas Menteri Pertahanan semasa Presiden Carter, Harold Brown.

Anggota Dewan Kebijakan, Newt Gingrich pernah mempropagandakan “perang bergulir” terhadap Afghanistan, lalu Irak, lalu negara demi negara sampai dendam tuntas terbalaskan. Berbicara kepada London Times, yang pemiliknya adalah propagandis Inggris-Israel nomor wahid Rupert Murdoch, Gingrich mengatakan bahwa mentargetkan Taliban Afghan tanpa mengalahkan Irak akan sama dengan “mengalahkan kekaisaran Jepang dan membiarkan lepas kaum Nazi”.

Richard Perle sebagai penata gerak gerombolan ini bersama dengan tokoh neo-konservatif William Kristol yang menulis surat terbuka kepada presiden Bush di Evening Standart (juga milik Rupert Murdoch). Di dalamnya, ia mengultimatum Bush agar mendukung sebuah “perang peradaban” berupa Perang Tiga Puluh Tahun di Timur Tengah, dan menggulingkan Saddam Hussein, bahkan sekalipun bukti tidak mengaitkan Irak secara langsung dengan serangan 11 September 1999.

Tidak diragukan lagi bahwa duet Wolfowitz-Perle merupakan jantung jaringan. Bahkan sebenarnya, Wolfowitz adalah salah satu harapan terbesar bagi ekstrimis sayap kanan Israel, yang menuntut pembunuhan terhadap Arafat dan pengusuran seluruh rakyat Palestina dari wilayah pendudukan. Mereka adalah kaki tangan generasi kedua yang dikader oleh konglomerat Yahudi Albert Wohlstetter pemilik RAND Corporation, seorang bekas komunis aliran Trotsky yang menjadi ahli strategi nuklir.

Seorang anggota penting kelompok anti-Irak lainnya adalah Richard Armitage, orang nomor dua di Departemen Luar Negeri Amerika, yang sempat diperiksa dalam skandal Iran-Kontra, dan seorang kolaborator lama dengan Wolfowitz dalam menargetkan Irak. Kelompok ini juga memiliki kaki tangan di Dewan Keamanan Nasional, diantaranya :

- Jendral Wayne Downing, bekas Panglima Komando Operasi Khusus, yang baru ditunjuk sebagai Direktur Pemberantasan terorisme untuk Dewan Pertahanan Tanah Air. Selama 1997-1998, Downing mendesain rencana militer untuk menggulingkan Saddam, dengan pembunuhan bila perlu. Rencana itu banyak bergantung pada operasi mempersenjatai geng-geng pembangkang dari kalangan Syi'ah di Selatan Irak dan para pejuang Kurdi di Utara.
- Richard Clarke, penasehat presiden untuk Perang Alam Maya. Clarke yang bekerja untuk Departemen Luar Negeri semasa pemerintahan Bush senior, sempat diturunkan jabatannya karena menutup-nutupi pelanggaran Israel atas berbagai undang-undang mengenai ekspor persenjataan.
- Elliott Abrams, seorang Staf Dewan Keamanan Nasional yang pernah didakwa juga dalam skandal Iran-Contra, diam-diam ditempatkan di Dewan Keamanan Nasional sebagai seorang pakar tentang "agama dan hak asasi manusia". Dia merupakan anggota lama jaringan Zionis sayap kanan yang mengilfiltrasi badan keamanan Amerika Serikat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Michele Steinberg, "Gerombolan Wolfowitz Membajak Amerika", *Ibid.*, hal 48-51.

### 3.6 Amerika Serikat dibawah George W. Bush

George W. Bush mewakili suara konservatif Amerika. Kemenangannya dalam pemilihan presiden sangat ditentukan oleh dukungan finansial dan jaringan politik fundamentalis Kristen (*Right Wing Network*). Jaringan sayap kanan ini dikoordinasikan oleh *The Heritage Foundation* dengan basis dukungan lobi fundamentalis Kristen.<sup>12</sup>

Keluarga Bush sendiri sangat dekat dengan pemuka-pemuka gereja konservatif, terutama Reverend Moon, yang terkenal sebagai pemimpin The Unification Church. Di bawah jaringan Moon terdapat front-front organisasi bisnis dan keagamaan yang siap dimobilisasi untuk suatu dukungan politik.

Dalam jaringan ini terdapat nama-nama fundamentalis Kristen semacam Ralph Reed (mantan pemimpin Christian Coalition) dan juga Jerry Falwell. Kalangan fundamentalis Kristen ini, karena alasan pragmatis dan teologis –berupa nubuat turunnya kembali Jesus Kristus di Jerussalem- memiliki kedekatan dengan kalangan fundamentalis Yahudi.

Kelompok lain yang lebih berpengaruh di seputar Bush, dan menyita perhatian publik saat ini adalah apa yang disebut dengan kelompok neo-konservatif (neo-kon). Mereka adalah para imigran Yahudi dari Eropa Timur yang pada mulanya berhaluan kiri. Begitu memasuki Amerika mereka bergabung ke dalam sayap kiri Partai Demokrat. Namun secara perlahan, mereka beralih ke sayap kanan Partai Republik, lantas menetap di sana.

---

<sup>12</sup> *Republika*, 31 Maret 2003.

Kelompok neo-kon merupakan gugus kerjasama yang ketat dan jaringan Washington yang efektif. Anggota-anggotanya menyusup ke dalam Kongres, lembaga-lembaga tangki pemikir, media massa dan program-program *talk show* di televisi. Pandangan politiknya sangat anti komunis dan sangat pro-Israel. Tokoh terpenting dari kelompok ini adalah Paul Wolfowitz yang saat ini memegang jabatan Deputy Menteri Pertahanan (*Secretary of Defense*). Tokoh kunci lainnya adalah Richard Perle, mantan asisten Menteri Pertahanan yang saat ini menjadi ketua The Defense Policy Board, sebuah gugus sipil terkemuka yang memberikan saran kebijakan kepada Menteri Pertahanan.

Selain kedua orang itu, ada juga nama John Bolton, seorang neo-kon yang paling radikal yang bekerja sebagai Menteri Pertahanan. Alhasil, posisi-posisi kunci pengambilan keputusan di Pentagon dikuasai oleh jaringan neo-konservatif.

Dalam kacamata neo-kon, Saddam Hussein dengan kecenderungan ekspansionis dan koneksi Rusianya merupakan ancaman berbahaya bagi masa depan Israel. Tak heran, dalam 12 tahun terakhir, Saddam merupakan agenda utama mereka. Mereka bersemangat mendukung George Bush senior dalam Perang Teluk I dan sangat gelisah ketika Bush menarik mundur pasukan sebelum Saddam berhasil dijatuhkan.

Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Bush senior, Dick Cheney sependapat dengan neo-kon, bahwa keputusan menghentikan perang merupakan kesalahan besar. Namun di era Presiden Clinton, tidak banyak hal yang bisa mereka lakukan, karena tergusur dari pusat-pusat pengambilan keputusan.



Pada bulan Februari 1998, The Center Security Policy, sebuah tanki pemikir neo-kon, mengirim surat terbuka pada Clinton, menyatakan bahwa dengan pengerahan kekuatan bersenjata AS krisis di Irak bisa diselesaikan dengan memuaskan. Surat tersebut ditandatangani oleh 30 gembong neo-kon termasuk Richard Perle dan Paul Wolfowitz, didukung garis keras Republican seperti Caspar Weinberger dan Donald Rumsfeld. Tapi nyatanya Clinton tidak memberikan respon yang diharapkan.

Patah arang dengan Clinton, perhatian mereka mulai dipusatkan untuk mencari dan mendukung kandidat presiden selanjutnya. Pilihannya adalah Gubernur Texas, George W. Bush. Baik Perle maupun Wolfowitz masuk ke dalam tim penasehat untuk urusan keamanan dan luar negeri Gubernur Bush. Dengan posisi-posisi strategisnya di kementerian pertahanan, mereka mulai merancang kembali agenda Irak yang pernah tertunda. Bagi mereka Irak dibawah Saddam Hussein dengan senjata-senjata canggihnya (yang pernah dipasok AS) bisa menjadi ancaman bagi Israel.

**BAB IV**  
**KRISIS ENERGI DAN KRISIS EKONOMI AS**  
**DI MASA PEMERINTAHAN G.W. BUSH & IMPLIKASINYA BAGI IRAK**

**4.1 Krisis Energi Amerika Serikat di Masa G.W. Bush**

Amerika Serikat adalah sebuah negara pengonsumsi energi terbesar di dunia. Dengan populasi penduduk 4,5 % dari total penduduk dunia, ia menghabiskan 25,3% dari total penggunaan energi di dunia pada tahun 1999.<sup>1</sup> Amerika sebenarnya merupakan negara penghasil gas alam terbesar kedua di dunia, dan merupakan penghasil minyak terbesar ketiga di dunia. Namun tingkat konsumsi yang irrasional di dalam negeri Amerika Serikat menjadikan potensi tersebut tidak dapat menolong kebutuhannya terhadap energi.

Amerika Serikat membutuhkan minyak bumi sebanyak 19 juta barel per hari, sedangkan kemampuan produksi minyak mentahnya sendiri hanya sekitar 8 juta barel per hari. Ini berarti Amerika harus mengimpor minyak sekitar 11 juta barel per hari. Akhir-akhir ini, cadangan minyak Amerika hanya mencapai 22 miliar barel atau hanya sekitar 2% saja dari cadangan minyak dunia. Hal itu terus menunjukkan terus berkurangnya cadangan minyak Amerika, walaupun pihaknya memiliki cara-cara terbaru, peralatan teknologi canggih dan memiliki kemampuan tinggi untuk mengembangkan eksplorasi minyak. Namun hal ini juga tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak Amerika yang kian tahun semakin meningkat.

---

<sup>1</sup> *International Energy Outlook 2002.*

Krisis energi Amerika Serikat ditandai oleh besarnya tingkat impor minyaknya. Di tahun 2001 impor bersih sebanyak 55 persen dari total permintaan minyak Amerika, naik dari 37 persen pada tahun 1980 dan 42 persen pada tahun 1990. Dan kenaikan impor minyak Amerika ini diperkirakan akan terus berkelanjutan.

Total konsumsi energi Amerika diproyeksikan naik dari 97,3 ke 130,1 Btu antara tahun 2001 dan 2020. Rata-rata konsumsi tahunannya naik 1,5 persen. Dan pada tahun 2025, total konsumsi energi diproyeksikan mencapai 139,1 quadrillion berdasarkan *Annual Energy Outlook 2003* (AEO 2003).

Dan untuk total permintaan petroleum diproyeksikan meningkat dari rata-rata 2,2 persen per tahun hingga tahun 2025 ( mencapai 29,17 juta barel per hari) diikuti oleh pertumbuhan transportasi, yang diperkirakan sebesar 74 persen dari permintaan petroleum di tahun 2025. Proyeksi permintaan di tahun 2020 (27,13 juta barel per hari) ini lebih besar jumlahnya daripada proyeksi tahun 2002 dengan besar 470 ribu barel per hari dikarenakan besarnya permintaan di bidang transportasi.

Total konsumsi energi Amerika diperkirakan naik lebih cepat daripada produksi energi domestik hingga tahun 2025. Akibatnya, impor bersih energi diproyeksikan agar sesuai dengan pertumbuhan permintaan energi. Proyeksi produksi minyak mentah turun dari 5,3 juta barel per hari di tahun 2025 berdasarkan AEO 2003, tingkat rata-rata tahunan 0,4 persen antara tahun 2001 dan 2025. Produksinya sebesar 0,2 juta barel per hari, lebih rendah daripada tahun 2020 berdasarkan AEO 2002.

Di tahun 2025, impor bersih petroleum, termasuk minyak mentah dan minyak jadi diperkirakan naik dari 55 persen di tahun 2001 menjadi 68 persen. Meskipun diperkirakan terjadi peningkatan kapasitas penyulingan minyak domestik menjadi 3 juta barel per hari. Impor bersih produk minyak berdasarkan barel per hari dihitung untuk pertumbuhan impor bersih total, meningkat dari 15 persen di tahun 2001 menjadi 34 persen di tahun 2025. Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui secara pasti bahwa Amerika Serikat memiliki tingkat ketergantungan yang teramat tinggi pada impor minyak, hal ini dikarenakan cadangan minyak Amerika mulai menipis dan tidak dapat dipakai untuk mencukupi kebutuhan energi jangka panjangnya.<sup>2</sup>

#### **4.2 Krisis Ekonomi AS di Bawah Pemerintahan G.W. Bush**

Di Amerika Serikat kesenjangan antara kaya dengan miskin semakin membesar. Menurut laporan Badan Statistik Amerika, situasi ekonomi negara tersebut memburuk secara dramatis. Untuk pertama kalinya sejak 8 tahun jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat. Bersamaan dengan itu jumlah pendapatan rata-rata penduduk menurun. Ini pertama kalinya terjadi sejak tahun 1991.

Kita lihat rincian statistik tahun lalu : di Amerika sekitar 32,9 juta warga dinyatakan tergolong miskin. Jumlah ini meningkat 1,3 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini berarti 11,7 persen penduduk Amerika hidup di bawah garis kemiskinan, dimana keluarga yang beranggotakan 4 orang, pendapatan per tahunnya

---

<sup>2</sup> Lihat : [www.eia.doe.gov](http://www.eia.doe.gov)

hanya 18 ribu dolar. Sementara itu pendapatan rata-rata tiap keluarga tahun lalu yang berkisar pada 42 ribu dolar, menjadi turun sebesar 2,2 %. Hanya mereka yang tergolong lapisan atas pada perolehan pendapatan, penghasilannya terus bertambah.

Selain itu, perekonomian Amerika diguncang oleh beberapa korporat (terungkap sebanyak 34 korporat) yang melakukan manipulasi pembukuan untuk mendongkrak *revenue* korporat dan menipu para investor. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh korporat farmasi Merck, yang terlibat dalam skandal akuntansi senilai US\$ 12,4 miliar. Akibat skandal pembukuan tersebut, bursa Wall Street mengalami kerugian luar biasa. Indeks Dow Jones turun 31,05 poin atau 0,34% menjadi 9,348 pada 8 Juli 2001. Padahal pada 5 Juli 2002, Dow Jones memecahkan rekor pencapaian indeks sejak 24 september 2001 setelah terjadinya aksi terorisme Di Amerika Serikat. Indeks Nasdaq juga jatuh sebanyak 12,92 poin atau 0,89% menjadi 1.435,44. Indeks S & P 500 turun 2,53 poin atau 0,26% menjadi 986,5 poin. Saham Merck sendiri yang merupakan salah satu saham teraktif di bursa New York turun US\$ 1,86 atau 3,8% menjadi US\$ 47.<sup>3</sup>

Skandal memalukan yang dilakukan oleh korporat-korporat Amerika itu telah menyebabkan nilai US\$ terlihat melemah. Pada 26 Juni 2002 lalu, US\$ menyentuh US\$ 98,3 sen per Euro, tingkat terendah atas mata uang itu sejak Februari 2000. Kemudian nilai beli US\$ terhadap yen Jepang juga hanya 120 yen, kurs terkecil sejak

---

<sup>3</sup> Lihat : <http://www.alislam.or.id/artikel/arsip/00000064.html>

September 2001. Sejak 1 April 2002, saat dimulainya periode tergelincirnya nilai US\$, US\$ telah kehilangan lebih dari 11% nilainya atas mata uang utama dunia.<sup>4</sup>

Jika penurunan US\$ ini berlanjut, maka ini akan berakibat pada permasalahan besar bagi perekonomian Amerika Serikat. Inflasi akan melonjak, perekonomian asing yang dikendalikan ekspor akan menderita, dan tak banyak yang bisa dilakukan oleh Bank Sentral (*The Fed*). Usaha *The Fed* untuk menghentikan penurunan US\$ dengan menaikkan tingkat suku bunga akan merugikan sektor riil yang justru membutuhkan stimulus moneter berupa rendahnya *cost of money*.

Penurunan US\$ saat ini masih relatif teratur, namun tren terjadinya bencana 'susulan' atas nilai US\$ tampaknya tak bisa dielakkan. Hal ini disebabkan oleh : Pertama, dua prasyarat keruntuhan US\$ sudah terlihat, yaitu berupa defisit perdagangan yang besar dan krisis kepercayaan investor. Per April 2002, defisit perdagangan Amerika naik menjadi US\$ 35,9 miliar setelah mencatat rata-rata US\$31,6 miliar per bulan selama kuartal I 2002. Meningkatnya defisit perdagangan itu diperkirakan akan mengurangi 1% atau lebih pertumbuhan PDB kuartal II.

Kedua, Amerika juga memiliki problem jangka panjang berupa berkurangnya modal asing sehingga membatasi perekonomian Amerika Serikat. Jika pada tahun 1995-2001 pembelian saham dan obligasi korporat oleh investor asing naik hampir 10 kali lipat, maka tahun lalu pembelian saham dan obligasi korporat oleh investor asing turun 24% dan investasi langsung modal asing turun 63%.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> *Business Week*, 8 Juli 2002.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 8 Juli 2002.

Belum lagi masalah defisit neraca berjalan Amerika yang terus membengkak akibat melonjaknya anggaran militer pemerintah. Belanja militer untuk kegiatan anti terorisme naik US\$ 95 miliar. Prospek untuk US\$ tidak lagi begitu menarik ketimbang Euro dan lainnya. George Soros pun memprediksikan bahwa nilai US\$ akan anjlok hingga sepertiga.<sup>6</sup>

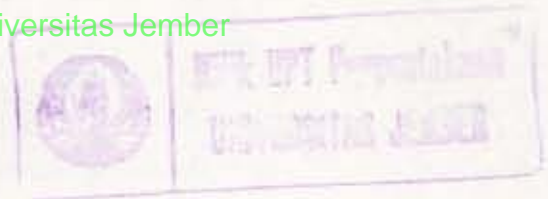
Selain itu, perekonomian di masa G.W. Bush ditandai pula dengan :

1. Tercatatnya angka defisit tahunan terparah dalam sejarah ekonomi Amerika Serikat;
2. Banyak bangkrutnya perusahaan swasta dan skandal perusahaan saham terbesar di seluruh dunia dalam kurun sejarah;
3. Anjloknya bursa saham terparah dalam sejarah Amerika;
4. Lebih dari dua juta orang Amerika menjadi pengangguran selama dua tahun pertama kepemimpinannya;
5. Terjadinya krisis energi terbesar dalam sejarah Amerika dan menolak intervensi bahkan sesudah terungkapnya korupsi di balik krisis tersebut;
6. Menghabiskan anggaran pendapatan negara untuk biaya program pertahanan sebesar 450 miliar dolar AS.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Bisnis Indonesia*, 4 Juli 2002.

<sup>7</sup> Lihat : [http://www.nyu.edu/ranesi/html/ekonomi\\_AS.html](http://www.nyu.edu/ranesi/html/ekonomi_AS.html)



Dalam situasi yang serba sulit ini, maka jelas Amerika kini mengalami fase-fase yang mencemaskan. Sulit diprediksikan Amerika Serikat akan bisa keluar dari kemelut ini. Oleh karena itu, penguasaan minyak Irak tentunya bisa menjadi jalan keluar bagi krisis ekonomi yang dialami oleh Amerika, selain juga merupakan solusi atas krisis energi Amerika Serikat.

#### **4.3 Implikasi Krisis Energi dan Krisis Ekonomi Amerika Terhadap Irak.**

Di akhir Perang Dunia II, salah satu ambisi besar dari pemerintah Amerika adalah membuat rencana untuk mendominasi dunia pasca perang, termasuk dalam menguasai sumber-sumber minyak. Meyakini bahwa sumber utama minyak mereka di barat laut Amerika, Venezuela, dan Meksiko tidak cukup, maka Departemen Luar Negeri berinisiatif untuk melakukan sebuah studi intensif dalam rangka menemukan sumber-sumber yang lain.

Penasehat Departemen Ekonomi, Herbert Feis, mengatakan bahwa hanya satu tempat yang dapat menyediakannya, yaitu Timur Tengah.

Maka Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Franklin Roosevelt bertemu dengan Raja Arab Saudi King Abdul Aziz Ibnu Saud di atas sebuah kapal perang Amerika di Terusan Suez, menyusul konferensi 1945 di Yalta antara Roosevelt, Winston Churchill dan Yoseph Stalin. Disinilah Roosevelt menjanjikan perlindungan Amerika kepada Raja Arab Saudi sebagai balasan atas hak-hak istimewa untuk mengakses minyak di Arab Saudi. Kesepakatan ini menjadi poin utama dari hubungan antara Amerika-Arab Saudi hingga saat ini.



Di Irak, kapanpun akses mereka terhadap minyak terancam, kekuatan-kekuatan Barat selalu mengintervensi. Pada tahun 1972, saat Partai Ba'ath yang dipimpin oleh Jendral Ahmad Hasan al Bakar menasionalisasi industri minyak, Amerika secara cepat bereaksi –seperti yang dilakukan pada tahun 1951 saat Iran menasionalisasi minyak mereka.

Presiden Amerika Richard Nixon kemudian mempersenjatai oposisi diantara kaum Kurdi untuk menjatuhkan al Bakar. Akan tetapi kemudian, wakil Presiden Saddam Hussein menyetujui untuk menyerahkan jalur air penting Shatt al Arab di Teluk Persia kepada Amerika Serikat – di bawah kontrol Syah Iran. Kesepakatan ini membuat Amerika menghentikan bantuan persenjataannya kepada Kurdi.

Dua dekade kemudian, saat Irak menginvasi kekayaan minyak Kuwait pada tahun 1990, Amerika Serikat merespon dengan mengorganisir sebuah kampanye dan pemboman paling intensif dalam sejarah. Tidak kurang dari 200 ribu orang Irak terbunuh dalam perang ini, dan disusul lebih dari satu juta orang meninggal dalam waktu 10 tahun akibat embargo ekonomi yang diorganisir Amerika Serikat.

Jauh sebelum peristiwa 11 September 2001— dimana setelah serangan teroris di Amerika ini dijadikan dalih oleh pemerintahan Bush untuk melancarkan perang tanpa akhir terhadap teroris—, potensi minyak Irak masuk dalam agenda Amerika. Bulan April 2001, Dick Cheney, Ketua White House Energy Policy Development Group ( Badan Kebijakan Pengembangan Energi Gedung Putih), secara khusus membuat sebuah laporan mengenai “Keamanan Energi”.

Dalam laporan itu dikatakan : “ Amerika akan tetap menjadi tahanan bagi dilema energinya, sementara Irak tetap menjadi sebuah pengaruh yang buruk dalam hal mengalirkan minyak ke pasar internasional dari Timur Tengah. Saddam Hussein juga telah memastikan sebuah kesiapan untuk mengancam menggunakan minyak sebagai senjata dan menggunakan program ekspornya sendiri untuk memanipulasi pasar minyak”.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, Amerika harus segera meninjau kembali kebijakan terhadap Irak, termasuk asesmen-asesmen militer, energi, ekonomi, dan politik atau diplomatik. Amerika kemudian harus membangun sebuah strategi yang terintegrasi dengan sekutu-sekutu kunci di Eropa dan Asia dan dengan negara-negara kunci di Timur Tengah, mengulang kembali tujuan-tujuannya dengan menghormati kebijakan Irak dan memulihkan sebuah koalisi yang kohesif dari sekutu-sekutu kunci.

Dari proposal Cheney tersebut menjadi indikasi kuat kebijakan Amerika terhadap Irak bahwa invasi yang dilakukan Amerika terhadap Irak adalah invasi untuk kepentingan minyak.

Dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 23 Januari 1980, Presiden Carter menyatakan bahwa Amerika siap menggunakan kekuatan militer jika perlu untuk melindungi kepentingan vitalnya di teluk Arab termasuk suplai minyak.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Pembebasan Politik Rakyat Miskin*, no.5, tahun II, Februari 2003, hal.13.

<sup>9</sup> Christoph Bertram, *Konflik Dunia Ketiga dan Keamanan Dunia*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal.93.

Departemen Pertahanan Amerika dalam laporannya pada bulan Mei 1995, menggambarkan bahwa Amerika mempunyai kepentingan strategis abadi di Timur Tengah. Penilaian ini menegaskan bahwa dunia akan lebih bergantung pada minyak Teluk memasuki awal abad 21 dibanding sebelumnya. Dan dalam jangka panjang Amerika merupakan negara maritim komersial dengan kepentingan global, akan melindungi kelancaran lalu lintas kapal dan jalan menuju pasar regional. Amerika Serikat akan mengupayakan pengaturan terhadap keamanan Timur Tengah dengan diplomasi ekonomi dan militer.

Timur Tengah sejak dulu hingga kini telah menjadi fokus penting politik luar negeri Amerika dalam hubungannya terhadap suatu penilaian tertentu yang meliputi :

1. Perlindungan terhadap akses dan strategi kawasan ini;
2. Hubungan baiknya dengan negara-negara konservatif pro-Amerika (Barat);
3. Keamanan dan eksistensi Israel
4. Perlindungan keamanan dan stabilitas kawasan.<sup>10</sup>

Dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa sejak penarikan terakhir pasukan Inggris di sebelah timur Terusan Suez pada akhir 1960, pemerintanan Amerika yang cukup berhasil tersebut dibutuhkan kehadirannya secara permanen di kawasan ini untuk menjamin keamanan dan kestabilan aliran minyak bagi keperluan negara Barat. Secara khusus, politik Amerika semenjak doktrin Carter pada tahun 1980 (yang kemudian ditandatangani Reagan) segera berkembang menuju suatu pernyataan :

---

<sup>10</sup> Abul Kalam Azat, *Intifada : The New Dimension to Palestinian Struggle*, BISS Papers, 1990 dikutip dari Skripsi Aminah Kusuma, *Faktor-Faktor Penyebab Hadirnya Pasukan AS (Multinasional) di Arab Saudi Sehubungan dengan Invasi Irak ke Kuwait*, 1992.

*"If necessary, American force would be used to prevent any hostile domination of the Gulf"*<sup>11</sup>,

Penggunaan kekuatan militer untuk mewujudkan *security supply* terhadap minyak Irak, yang disinyalir oleh beberapa pihak sebagai motif invasi Amerika terhadap Irak kali ini dilakukan dengan menerjunkan diantaranya pengebom B-2 Stealth (siluman), pengebom tempur F-18 US Navy (Angkatan LautAS) dan F-15 Air force (Angkatan Udara AS), rudal-rudal penjelajah Tomahawk, pesawat-pesawat angkut militer C-130 dengan lebih dari 60 ribu serdadu. Serta pengerahan berbagai peralatan perang modern dan super canggih dengan harga miliaran dolar AS yang dioperasikan secara intensif dan masif –termasuk dari kekuatan multinasional- di negara sekitar Irak.<sup>12</sup>

Kekuatan militer digunakan jika permasalahan suplai minyak berkembang dengan buruk. Ini dikarenakan suplai energi (minyak) begitu essential untuk *survive* dan karena alasan inilah maka perang menjadi sesuatu yang dibenarkan, dengan berdasarkan pada hak untuk mempertahankan diri. Karena itu, sebagaimana dikatakan bahwa Amerika dan sekutu-sekutunya dapat membenarkan pendudukan atas negara-negara Teluk Persia. Kebijakan ini dibuat untuk mengamankan akses suplai minyak bagi Amerika dan juga sekutu-sekutunya.

---

<sup>11</sup> *The Guardian*, 26 Agustus 1990.

<sup>12</sup> *Republika*, 20 Maret 2003.

## BAB V

### AGENDA AMERIKA SERIKAT DIBALIK INVASI AS KE IRAK

Dalam mengkaji kebijakan AS di Timteng, tidak terlepas dari prinsip-prinsip luar negeri AS yang telah mengalami perjalanan panjang. Secara garis besar, prinsip-prinsip utama yang mendasari kebijakan AS pada decade 1990-an, sebagaimana diutarakan Menlu Warren Christopher adalah sebagai berikut : Pertama, mempertahankan kepemimpinan global AS baik di bidang politik, keamanan maupun ekonomi. Kepemimpinan global merupakan hal yang sangat esensial bagi AS untuk menjaga stabilitas dan perdamaian internasional dalam upaya menciptakan tata dunia baru. Kedua, mempertahankan pola interaksi yang konstruktif dengan negara-negara kuat lainnya, seperti dengan negara-negara di Eropa, Asia Pasifik, Timteng dan Amerika Latin. Prinsip ini terutama mengacu pada kepentingan ekonomi AS terhadap negara-negara di kawasan tersebut. Ketiga, memperkuat berbagai institusi internasional secara damai. Keempat, memperluas penyebaran nilai-nilai demokrasi ke seluruh dunia sebagai prasyarat terciptanya perdamaian internasional.<sup>1</sup>

Dalam tataran teoritis politik luar negeri yang ideal adalah politik luar negeri yang senantiasa bersifat responsive dan fleksibel terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam lingkungan internasional. Sementara itu, isu demokratisasi dunia menempati pula posisi penting dalam kebijakan politik luar negeri AS.

---

<sup>1</sup> Anak Agung Bayu Perwita, "Politik Luar Negeri AS Pasca Pemilu 1996 : Kontinuitas atau Perubahan?", dalam *Analisis CSIS* tahun XXVI, No.6, November-Desember, Jakarta, 1997, hal. 575

Dalam memahami kebijakan suatu negara atau kawasan lain, maka tidak akan terlepas dari kepentingan nasional dari negara yang bersangkutan. Begitu juga dengan AS yang berkepentingan dengan kawasan Timteng. Dalam hal ini kepentingan AS terhadap Timteng dapat dilihat dari berbagai aspek, namun dalam tulisan ini akan ditinjau dari aspek ekonomi dan kepentingan hegemoni.

Dalam mencapai suatu tujuan, suatu negara akan menggunakan suatu cara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Serangan militer AS ke Irak adalah merupakan cara dalam pencapaian tujuan AS baik di kawasan ataupun tingkat global. Motif serangan AS tersebut juga tidak terlepas dari motif ekonomi. AS berharap, dengan menumbangkan Saddam Hussein, AS bisa mendikte pemerintahan baru Irak dalam soal minyak. Dengan demikian, AS masih punya kekuatan untuk mengendalikan ekonomi global, termasuk dalam menghadapi mata uang euro. Kebijakan AS dalam bidang ekonomi biasanya tidak bersifat vulgar dan biasanya dikemas dalam bentuk kebijakan politik atau militer. Sehingga untuk lebih memahami tujuan ataupun motif yang ada dalam sebuah kebijakan harus dicari target yang sebenarnya dengan cara melakukan analisa secara cermat dan mendalam. Untuk itu penulis akan terlebih dahulu memaparkan motif-motif yang bisa melatarbelakangi invasi AS ke Irak tersebut.

## I. DEMOKRATISASI DI IRAK

Dalam kultur Irak, rakyat Irak lebih menghormati seorang pemimpin berdasarkan garis keturunan yang dimiliki. Sistem ini juga telah menimbulkan ketidakpuasan rakyat Irak sehingga terjadi kudeta yang pertama kali oleh partai Ba'ath pada tahun 1936. Kudeta inilah yang telah membuat suatu pola pemerintahan yang didominasi oleh militer secara kuat—

Pemerintahan Saddam Hussein dimulai pada awal tahun 1970-an ketika ia masih sebagai orang kuat di belakang layar (dibalik presiden Bakr). Selama beberapa tahun ia mempertahankan posisi yang tidak menonjol sebagai wakil ketua komando regional partai Ba'ath dan juga menjadi wakil ketua komando revolusioner.

Sejak Saddam Hussein berkuasa di Irak, sistem pemerintahan Irak dapat dikatakan sangat tergantung dari pemikiran Saddam dan ideology partai Ba'athnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pemerintahan Irak di bawah Saddam adalah sebuah pemerintahan yang jauh dari demokrasi. Ia seringkali bertindak otoriter dan sering menyingkirkan lawan-lawan politiknya dengan bengis.

Gambaran diatas oleh AS dikatakan sebagai potret dari negara yang tidak demokratis. Oleh sebab itu AS menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk mengadakan serangan militer ke Irak. Dan menjadikan alasan tersebut sebagai alasan untuk pencapaian tujuan terhadap negara lain.

Selain itu, Saddam Hussein pun oleh AS dianggap sebagai penghambat kepentingan AS di kawasan Timur Tengah. Oleh sebab itu dibuatlah skenario untuk menggulingkan Saddam Hussein. Sebagaimana kita ketahui, Saddam Hussein adalah sosok

pemimpin Irak yang berambisi untuk menjadi pemimpin regional di kawasan Timteng. Padahal Amerika juga memiliki kepentingan yang sama di kawasan tersebut. Sehingga kepentingan AS ini dihalangi oleh sosok Saddam Hussein yang keras kepala dan tidak bisa diajak kompromi. Selain itu Saddam juga sangat anti Amerika dan cenderung menentang kepentingan AS.

Sebagai negara anggota GNB (Gerakan Non Blok), Irak juga memiliki peran dalam perancangan politik dunia ketiga terhadap negara maju dalam hal ini salah satunya adalah AS, dimana logika kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang jelas bertentangan. Disamping itu posisi Irak sebagai negara anggota OPEC juga sangat berperan dalam menentukan produksi, distribusi serta minyak dunia, karena Irak memilikibanyak persediaan minyak yang dibutuhkan AS. Dengan mengetahui melimpahnya minyak dan sumber daya alam yang lainnya, AS Irak berkeinginan untuk mengajak Irak bekerjasama, namun Saddam Hussein tidak mau bekerja sama dengan AS, sehingga mendorong AS untuk menjadikan Irak sebagai musuh. AS lantas menganggap Irak sebagai negara yang harus dikuasai, sehingga ancaman terhadap Israel dan kepentingan AS bisa diatasi.

## II. HEGEMONI AS DI KAWASAN TIMTENG

Invasi AS ke Irak nampaknya tidak terlepas dari orientasi kebijakan luar negeri AS untuk menciptakan lingkungan internasional yang kondusif untuk kemakmuran negerinya. Lingkungan internasional yang kondusif ini tidak lain adalah tidak adanya ancaman negara lain yang dicirikan adanya permusuhan yang disebabkan perbedaan ideology yang dianut dan kemampuan dari negara yang bersangkutan untuk mewujudkan dan mengembangkan



ideologinya. Sementara itu, kemakmuran negaranya adalah berhubungan dengan bergerakaknya industri yang dijamin oleh akses pada sumber energi dan bahan mentah, sekaligus menguntungkan produk-produk AS di pasar dunia.<sup>2</sup>

Politik luar negeri AS terhadap Irak dapat dilihat dari dua fase. Pertama, Irak sebagai sekutu AS di Timteng dan kedua, Irak sebagai musuh AS. Fase Pertama, Irak mendapat dukungan dari AS dalam menghadapi Iran pada saat perang Irak-Iran pada tahun 1980-1988. Dukungan AS ini dilatarbelakangi oleh potensi-potensi yang dimiliki Irak pada saat itu, yang salah satunya adalah terus meningkatnya militer menjadi kekuatan militer terbesar di Timteng.

Persekutuan antara AS dan Irak ini kemudian berakhir setelah invasi Irak ke Kuwait. Pada masa ini AS memasuki fase kedua, yakni munculnya konflik antara AS dan Irak. Perubahan posisi Irak dari sekutu menjadi musuh adalah disebabkan oleh adanya lobi Israel yang juga merupakan sekutu AS di Timteng.

Terhentinya hubungan baik antara AS dan Irak ini tidak berarti pula terhentinya politik luar negeri AS terhadap Irak. Peresmian kekuatan militer AS di Teluk menjadi Armada V secara permanen, mengukuhkan nilai strategis kawasan ini bagi AS. Pembentukan Armada V ini didasarkan pada beberapa konsep yang dianut AS di kawasan Teluk saat ini. Konsep ini, pertama, harus ada kekuatan militer Barat secara abadi di kawasan Teluk untuk menjamin keamanan jalur lalu lintas kapal tanker minyak. Kedua, mengendalikan sendiri keamanan di kawasan Teluk, tanpa harus melibatkan mitra lain.

<sup>2</sup> Menurut Richard Falk, dalam BO Burhamuddin, "AS Biang Negara Teroris", *Pelita*, 1 April 2003, hal.4, dalam Skripsi I Jro Sabu, "Kebijakan AS untuk Menggulingkan Pemerintahan Saddam Hussein di Irak, 2003, hal.60

Ketiga, menyepak sejauh mungkin kekuatan musuh seperti Irak dan Iran dari daerah sensitif di Teluk. Keempat, mengaitkan keamanan Teluk dengan keamanan AS dengan cara mengadakan perjanjian bilateral keamanan dengan negara-negara setempat, seperti yang telah dilakukan dengan Kuwait, Bahrain dan Qatar.<sup>3</sup>

Agresi militer AS ke Irak sebenarnya hanya merupakan salah satu langkah mutakhir dari suatu kecenderungan hegemoni AS yang sudah mulai dirintis sejak usainya Perang Dunia II. Pada saat itu AS memegang hegemoni dunia karna tidak ada satupun negara di dunia yang dapat mengalahkan kekuatan hegemoni ekonomi dan politiknya. Hegemoni ini mulai digoyahkan Uni Soviet dan RRC, sehingga hegemoni militer harus dibagi dengan negara itu. Sementara itu, hegemoni ekonomi juga harus dibagi dengan negara-negara Eropa dan Jepang. Sejak saat itu, AS berupaya memperoleh kembali hegemoni ekonomi dan militer melalui dua cara utama : secara unilateral dan militeristik atau secara diplomasi damai melalui jalur multilateral.<sup>4</sup>

Agresi G.W. Bush ke Irak menampakkan penggunaan pendekatan unilateral militeristik dengan terlebih dulu meyardangkan predikat negara tiran dan sarang teroris terhadap Irak. Dengan cara seperti itu AS dengan leluasa dapat menyerang Irak terlebihdahulu dengan mendapat dukungan dari negara-negara sekutunya.

Serangan AS terhadap Irak ini dilakukan karena AS memandang bahwa Irak merupakan ancaman bagi kepentingannya, sehingga AS tidak ingin melihat Irak kembali kuat seperti sebelum Perang Teluk I. Irak pun dipersepsikan oleh AS sebagai ancaman

<sup>3</sup> Skripsi I Jro saba, "Kebijakan AS untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein di Irak, 2003, hal.60.

<sup>4</sup> Smita Notosusanto, "Hegemoni" dalam Tempo, 6 April 2003, hal 102.

stabilitas kawasan yang mempunyai kekuatan militer besardan sekaligus berambisi besar untuk menguasai kawasan Teluk. Padahal kawasan Teluk merupakan kawasan yang memiliki arti penting dan khusus bagi AS.

Amerika Serikat berasumsi bahwa keberhasilannya dalam menaklukkan Irak akan mengakibatkan ditaklukkannya negara-negara sekitarnya hingga AS berhasil menancapkan hegemoninya di kawasan Teluk Persia.

### III. MENGUASAI INDUSTRI MINYAK DUNIA

Dimensi ekonomi sering menjadi faktor preventif disamping jugabisa menjadi sebab terjadinya perang, serta bisa menjadi alasan bagi terwujudnya aliansi perdamaian pada dua atau tiga dekade lalu, soal minyak dan pengaruh penting minyak terhadap hubungan internasional adalah bukti yang tepat. Bahkan dalam kasus Timteng, kendali konflik Arab dan Israel mulanya tidak didasarkan pada isu ekonomi, ternyata pada akhirnya faktor ekonomi pun menjadi pengaruh penting. Dalam kasus serangan AS ke Irak, isu ekonomi tidak bisa dilepaskan dan bahkan menjadi target strategis banyak negara tidak hanya AS.

Perang menghancurkan Irak untuk yang kesekian kalinya ini merupakan salah satu cara untuk kembali meyegarkan kebuntuan-kebuntuan yang dialami AS dalam upaya menguasai kebutuhan minyak AS. Apalagi menurut data statistik, angka pertumbuhan ekonomi AS yang paling tinggi dicapai pada saat Perang Teluk II berlangsung. Pencapaian inilah yang ingin diperleh AS kembali.

Target dan tujuan AS untuk menguasai industri minyak dunia merupakan target prioritas AS. Hal ini mereka lakukan untuk mencari solusi atas kebangkrutan ekonomi dan

menipisnya cadangan minyak AS. Dengan langkah ini AS memprediksi bahwa dengan melakukan intervensi dan menguasai secara langsung negara-negara yang kaya minyak, maka mereka akan selamat dari ancaman energi tersebut.

Sebenarnya berbagai pendekatan sudah dilakukan AS agar Irak tidak perlu melawan AS dengan minyaknya. AS pun pernah meminta Irak untuk berkoalisi dengan perusahaan-perusahaan multinasional AS untuk mengoperasikan ladang-ladang minyak mereka, namun Saddam malah memberikannya kepada Perancis, Rusia dan Cina serta Indonesia.

Motif utama invasi AS ke Irak kali ini adalah minyak sehingga logis jika Irak bukan tujuan terakhir. Iran, Arab Saudi, Libya juga memiliki cadangan minyak yang cukup besar, dan kalau dikuasai AS, paling tidak 60 % minyak dunia ada disitu semuanya. Minyak punya beberapa aspek, selain sumber energi industri yang belum tergantikan, juga alat untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia.<sup>5</sup>

Jika AS menguasai seluruh potensi minyak di Timteng, ditambah minyaknya di Alaska, berarti AS sudah menguasai 80 % cadangan minyak dunia. OPEC saja saat ini hanya menguasai 50-60 %. Kalau sekarang AS bisa menguasai Irak berarti negara-negara yang lain seperti Iran, Arab Saudi dan Kuwait pun akan menyusul. Itu sudah cukup bagi AS untuk bisa mengatur harga dan suplai minyak di Barat. Kendati pasokan minyak AS dari Arab Saudi dan Kuwait serta negara produsen minyak lainnya untuk sementara dapat memenuhi kebutuhan konsumsi AS, namun untuk jangka panjang hal itu masih belum bisa memenuhi rasa aman AS.

<sup>5</sup> "Irak Pasca Invasi : Di Ujung Ketidakpastian, *Kompas*, 13 April 2003, hal 25

Karena Irak tidak dapat diajak bekerja sama dalam hal minyak oleh AS, maka tujuan AS dalam invasinya ke Irak adalah agar Irak tidak memegang kendali atas cadangan minyak di kawasan Timteng. Setelah AS sukses menghancurkan pemerintahan Saddam dan mampu mengontrol Irak, berarti AS mempunyai kekuasaan atas cadangan dan produksi minyak terbesar di dunia. Hal ini memungkinkan AS memiliki kontrol penuh atas system ekonomi global. Dengan demikian AS berpeluang untuk mendikte kuota eksplorasi dan pendistribusiannya.

Invasi AS ke Irak bukan terkait dengan senjata pemusnah massal, tetapi perang untuk memperoleh kendali atas minyak. Hal ini juga sejalan dengan ambisi sekelompok elit pendukung pemerintahan Bush untuk menguasai dunia lewat kendali atas sumber energi strategis.<sup>6</sup> Sehingga alasan melucuti senjata pemusnah massal, menjatuhkan rezim otoriter atau alasan mencegah terorisme semakin kelihatan kalau itu hanya sebuah kedok untuk menutupi tujuan yang sebenarnya dari invasi AS ke Irak.

---

<sup>6</sup> Ivan A. Haidar, "Militarisme AS", *Kompas*, 31 Maret 2003, hal. 4.

## BAB VI

### KESIMPULAN

Minyak adalah ibarat urat nadi bagi keberlangsungan suatu negara, terutama negara-negara industri maju. Terhenti atau terhambatnya suplai minyak suatu negara akan berakibat pada macetnya kegiatan industri. Kemacetan ini akan berpengaruh pada terciptanya pengangguran besar-besaran. Kegiatan berproduksi terhenti dan aktivitas perdagangan yang biasanya akan menghasilkan *income* dan kenaikan GNP (Gross National Product) akan sulit direalisasikan. Otomatis, rendahnya GNP akan menjadikan perekonomian menjadi *collapse*.

Selain itu minyak akan menjadikan negara penghasil minyak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) di hadapan negara lain sehingga menjadikan keberadaannya juga akan dipertimbangkan oleh negara-negara lain. Hal ini disebabkan begitu tingginya tingkat ketergantungan negara-negara industri maju akan suplai minyak yang didapatnya dari negara penghasil minyak. Dan karena begitu vitalnya arti minyak bagi keberlangsungan suatu negara, maka negara-negara industri maju terpaksa menyetujui permintaan atau desakan negara-negara penghasil minyak asalkan mereka bisa mengakses minyak darinya. Politisasi minyak oleh negara-negara penghasil minyak, terutama oleh negara-negara anggota OPEC menjadikan negara-negara industri maju –terutama AS- berada dibawah kendali mereka, suatu kondisi yang tidak menyenangkan apalagi bagi suatu negara yang mengklaim dirinya sebagai negara adikuasa dan polisi dunia. Apalagi politisasi minyak tersebut dapat

menjadi ancaman bagi suplai minyak Amerika Serikat dimasa mendatang. Fakta politisasi minyak dan adanya kepentingan-kepentingan tertentu terutama kepentingan ekonomi dan politis, memunculkan sebuah pemikiran bagi pihak Amerika untuk menguasai akses minyak dari negara-negara penghasil minyak. Selain dari itu, akses minyak juga dapat digunakan untuk menguasai suatu negara atau kawasan tertentu. Hal ini disebabkan karena di tangan-tangan negara-negara penghasil minyak terbesar itulah ditentukan dan diputuskan aturan tentang produksi, distribusi dan harga minyak dunia. Sebelum berdirinya OPEC, The Seven Sisters merupakan kolaborasi beberapa perusahaan minyak yang kemudian menjadikannya sebagai penguasa minyak dunia, yang ditangannyalah terdapat hak untuk menentukan jumlah produksi minyak dunia, distribusinya hingga ke penentuan harganya. Namun setelah OPEC berdiri peran itu kemudian diambil alih oleh OPEC.

Selain dari pada hal diatas, minyak juga berpengaruh pada tingkat kekuatan militer Amerika Serikat. Tanpa minyak maka Amerika tidak akan mungkin bisa menggerakkan mesin perangnya yang dibutuhkan untuk membuktikan kesuperiorannya atas dunia

Begitu vitalnya minyak bagi keberlangsungan negara Amerika Serikat telah mendorong pemerintah Amerika mengeluarkan kebijakan tentang pemenuhan dan pengamanan suplai minyak terhadap negaranya. Dan pemerintah Amerika memaklumkan penggunaan kekuatan militer untuk memenuhi tujuan tersebut. Hal ini disebabkan karena alasan yang terkait dengan kebutuhan untuk *survive* dan upaya untuk mengatasi krisis energi dan ekonomi yang mengancam Amerika Serikat.

Irak dijadikan sasaran invasi Amerika Serikat karena selain Irak adalah negara yang sangat kaya minyak dengan posisi negara penghasil minyak terbesar kedua di dunia, biaya produksi minyak Irak terhitung yang paling rendah di dunia dan rasio produksi minyak Irak terbesar- diantara negara-negara penghasil minyak dunia lainnya, termasuk Arab Saudi. Oleh karena itu prospek bisnis migas di Irak jauh lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan yang lainnya.

Penguasaan terhadap ladang-ladang minyak Irak ini menjadi *entry point* bagi Amerika Serikat untuk menancapkan hegemoninya atas dunia dan kawasan Timur Tengah. Dikuasainya ladang minyak Irak –yang merupakan anggota aktif OPEC yang memiliki pengaruh dalam menentukan produksi, distribusi dan harga minyak dunia- maka dunia akan mudah dikendalikan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat akan menjadikan minyak sebagai senjata politik untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap negara lain dalam upayanya mewujudkan hegemoni atas dunia dan wilayah Timur Tengah. Selain itu juga untuk menggeser peran OPEC dan berusaha menjadikan *The Seven Sisters* sebagai penguasa minyak dunia di bawah kepemimpinan Amerika Serikat.

Kepuasan untuk melakukan invasi untuk mewujudkan tujuan diatas dipengaruhi oleh kelompok kepentingan bisnis, kelompok militer dan kelompok lobi Yahudi. Perumus kebijakan invasi terhadap Irak kebanyakan adalah pengusaha-pengusaha besar minyak di Amerika Serikat. Dan lobi Yahudi begitu mencengkeram dalam politik pemerintahan Amerika sehingga keputusan-keputusan politik banyak dipengaruhinya. Selain daripada itu, Yahudi adalah partner abadi Amerika sehingga Amerika akan selalu berusaha membantu memperjuangkan idealisme Yahudi berupa upaya pembentukan



Israel Raya. Irak adalah sebuah wilayah yang diklaim sebagai wilayah yang dijanjikan Tuhan atas mereka. Oleh sebab itu Amerika Serikat dan Israel bekerja sama melumpuhkan Saddam Hussein untuk mencapai kepentingan-kepentingannya.

Selain dipengaruhi oleh lobi Yahudi, keputusan pemerintah Amerika untuk menginvasi Irak juga dipengaruhi oleh kelompok bisnis dan kelompok militer “yang haus darah”. Sebagian besar pada pembuat keputusan luar negeri Amerika dikuasai oleh para pengusaha minyak dunia yang begitu piawai dalam melakukan kalkulasi matematis untuk meraup keuntungan yang sangat luar biasa. Di Dewan Kebijakan Pertahanan didominasi oleh orang-orang yang gila perang.

Dengan cara menyebarkan opini yang buruk tentang Irak, seperti sebutan otoriter bagi Saddam Hussein, pemerintahan Saddam yang tidak demokratis, terdapatnya jaringan teroris radikal-fundamentalis hingga pada alasan pemilikan senjata pemusnah massal, Amerika bermaksud untuk mencari alasan pembenar bagi tindakan invasinya. Tindakan invasi ke Irak ini pun dijadikan sebagai ajang untuk menunjukkan kepada dunia tentang eksistensinya sebagai pemimpin dunia dan pula sebagai polisi dunia. Klaim sebagai pemimpin dunia dan polisi dunia ditunjukkan dengan melakukan penggalangan persenjataan militer canggih dan mutakhir secara besar-besaran di sebuah negara lemah dan miskin seperti Irak. Pemberian hukuman berupa sanksi militer kepada Irak dengan tanpa mengindahkan moral dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi sebuah resiko bagi negara yang tidak mau ada dalam kendali Amerika Serikat. Tindakan penghakiman Amerika atas Irak ini dilakukan guna mendapat pengakuan dari dunia sebagai polisi dunia, meskipun guna mendapatkan klaim itu Amerika Serikat sering melanggar resolusi PBB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Bardes, Barbara A, Mack C. Shelley II, dan Steffen W. Schmidt, *American Government & Politics Today : The Essentials*. Wadsworth Publishing Company, USA, 1998.
- Berry, Brian J.L., Edgar C. Conkling, dan Michael Ray, *The Global Economy : Resource US, Location Choice and International Trade*. Prentice Hall Inc, 1993.
- Bertram, Christoph, *Thirld World Conflict and International Security*. Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Coplin, William D., Marsedes Marbun, *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis* (edisi kedua). CV. Sinar Baru, Bandung, 1992.
- Damhuri, Elba, *Di Balik Invasi AS ke Irak*. Senayan Abadi, Jakarta, 2003.
- Doveherty, James F, dan Robert L. Pfatgraff Jr, *Contending Theory's to International Relations*. J.B. Lippincot, Co. Ltd, Philadelphia, 1971.
- Garaudi, R., *Israel & Praktek-Praktek Zionisme*. Pustaka, Bandung, 1988.
- Husaini, Adian, *Habis Irak Siapa Lagi? Memahami Pragmatisme dan Terorisme Amerika*, Pustaka Progresif, Surabaya, 2003.
- Jatmiko, Sidik, *Amerika Pengnambat Demokrasi : Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*. Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2000.
- Jones, Walter S., *Logika Hubungan Internasional : Persepsi Nasional*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*. CV. Rajawali Pers, Jakarta, t.th.
- Lenczowski, G., dan Bixby Asgar, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*. Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1991.
- Mas'oe'd, Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Methodologi*. LP3ES, Jakarta, 1989.

- ....., *Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisasi*. PAU Studi Ilmu Sosial UGM, Yogyakarta, 1990.
- ....., *Ekonomi Publik Internasional dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, t.th.
- Morgenthau, Hans J., *Politik Antar Bangsa*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1990.
- Nasution, Dahlan, *Perang atau Damai dalam Wawasan Politik Internasional*. Remadja Karya CV, Bandung, 1984.
- Noreng, Qystein, *Minyak dalam Politik : Upaya Mencapai Konsensus Internasional*. CV Rajawali, Jakarta, 1983.
- Paul, Findley, *Mereka Berani Bicara : Menggugat Dominasi Lobi Yahudi*. Mizan, Bandung, 1990.
- ....., *Mereka Berani Bicara*. Mizan, Bandung, 1993.
- Purwodarminto, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka, Jakarta, t.th.
- Romli, Usep H.M., Ahmad Setiyaji, dan Zainurrofiq, *Di Balik Invasi AS ke Irak : Upaya Menciptakan Israel Raya*. Mujahid Press, Bandung, 2003.
- Schuman, Gary, *Hubungan Indonesia - Amerika Serikat*. CSIS, 1985.
- Sihbudi, Riza, (et al), *Profil Negara-Negara Timur Tengah*. PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Snyder, Richard C., *Foreign Policy Decision Making an Approach to International Politics*. The Free Press, New York, 1962.
- Soeprapto, *Hubungan Internastonal : Sistem, Interaksi dan Perilaku*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Metode Research*. PN. Alumni, Bandung, 1980.
- The Liang Gie, *Ilmu Politik*. FISIP UGM, Yogyakarta, 1974.
- Utomo, Arif Punto, dan Hery Sucipto, *Irak Pasca Invasi : AS, Minyak, dan Berakhirnya Pan Arab*. Global Mahardika, Jakarta, 2003.
- Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Yusuf, Almuzamil, *Perang Irak – AS : Hegemoni Baru AS di Timur Tengah dan Dampak Globalnya*. COMES Foundations & JIM Malaysia, Jakarta, 2003.

Majalah :

Bisnis Indonesia, 4 Juli 2002.

Business Week, 8 Juli 2002.

The Guardian, 26 Agustus 1990.

Pembebasan Politik Rakyat Miskin, no. 5, tahun II, Februari 2003.

Suara Hidayatullah, Edisi Khusus 15 tahun Mei – Juni 1988, 2003.

Time, 18 Nopember 2002.

Koran :

Kompas, 18 Oktober 2002

....., 28 Nopember 2002

....., 31 Maret 2003

....., 13 April 2003

Republika, 13 Maret 2003

....., 20 Maret 2003

....., 31 Maret 2003

....., 5 April 2003

Tempo, 6 Februari 2003

....., 9 Februari 2003

Pelita, 1 April 2003

Internet :

<http://www.islamonline.net>

<http://www.alislam.or.id/artikel/arsip/00000064.html>

[http://www.mw.nl/ranesi/html/ekonomi\\_AS.html](http://www.mw.nl/ranesi/html/ekonomi_AS.html)

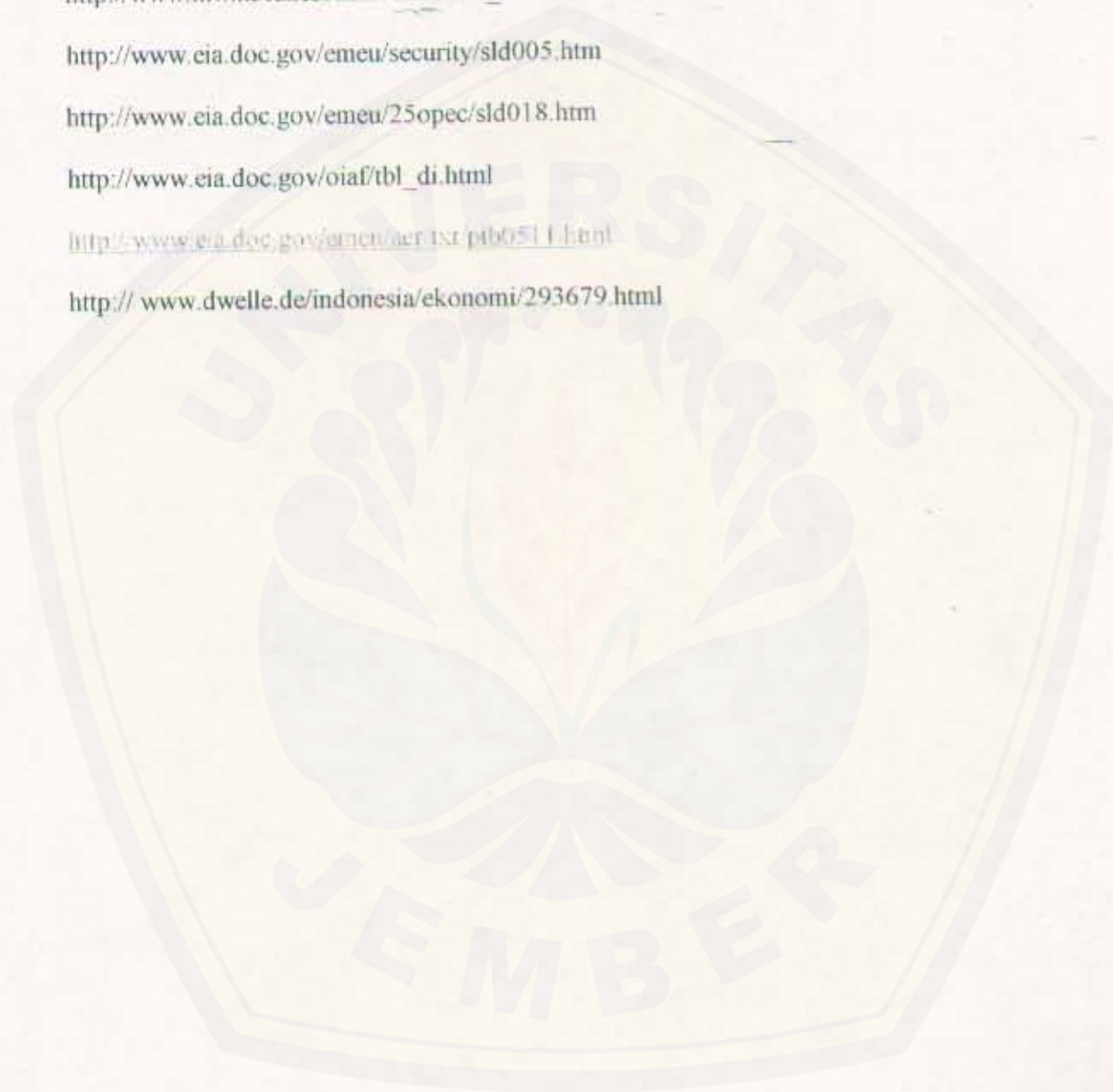
<http://www.eia.doc.gov/emeu/security/sld005.htm>

<http://www.eia.doc.gov/emeu/25opec/sld018.htm>

[http://www.eia.doc.gov/oiaf/tbl\\_di.html](http://www.eia.doc.gov/oiaf/tbl_di.html)

<http://www.eia.doc.gov/emeu/aer/txt/ptb0511.html>

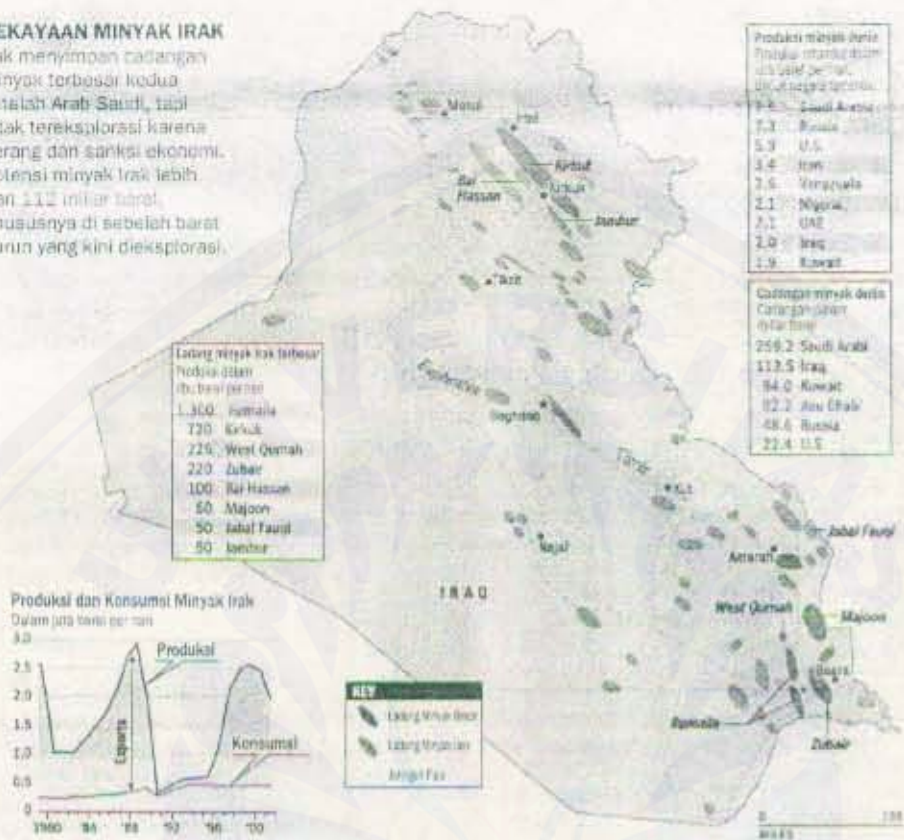
<http://www.dwelle.de/indonesia/ekonomi/293679.html>



## LAMPIRAN 1 Kekayaan Minyak Iraq

### KEKAYAAN MINYAK IRAK

Irak menyimpan cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi, tapi tidak terekplorasi karena perang dan sanksi ekonomi. Potensi minyak Irak lebih dari 112 miliar barel, khususnya di sebelah barat gunung yang kini dieksplorasi.



Dikutip dari Republika, 14 April 2003, hal. 9

Sumber: Energy Information Agency, Department of Energy, International Petroleum Encyclopedia.



## LAMPIRAN 2

### Peta Iraq

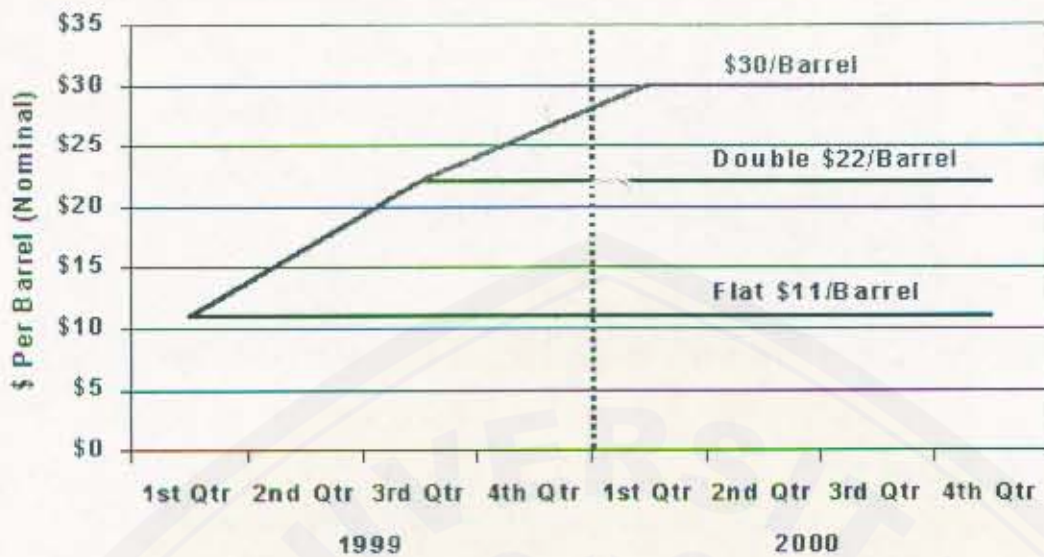


Dikutip dari Kompas, Maret 2003

Sumber: World Book Fact

JEMBER

# Crude Oil Price Scenarios to Illustrate U.S. Economic Impacts



### Notes:

What are the macroeconomic impacts of the recent rise in world oil prices? Crude oil price essentially doubled between the first and third quarters of 1999. Consider two hypothetical cases. The first assumes that the price of oil stays constant at \$11 per barrel through 1999 and 2000. The second reflects world oil prices rising from \$11 in the first quarter to \$22 by the third quarter of 1999 and remaining at that level through 2000. The table below highlights impacts on the economy.

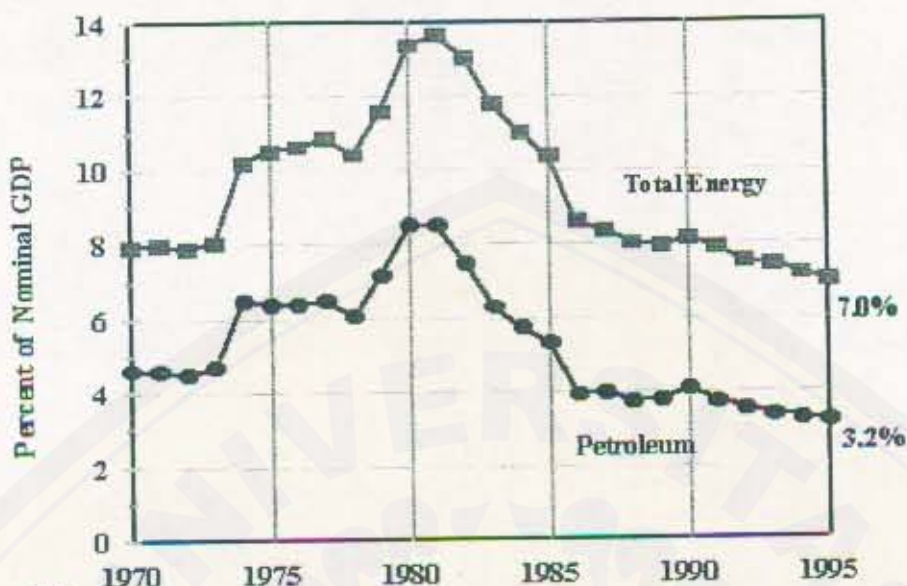
### Impacts of the World Oil Price Rising from \$11 to \$22 per Barrel

	1999	2000
Increase in CPI Inflation	+0.50 percentage points	+0.75 percentage points
Loss in GDP Growth	-0.50 percentage points	-1.00 percentage points

CPI Inflation is higher by an additional 0.5 percentage points in 1999, reflecting higher prices for oil and other energy commodities. In 2000, higher prices paid for energy will cycle through the economy and create additional



## Energy Share of the Economy (Petroleum & Total Expenditures)



SOURCE: U.S. Energy Prices and Expenditures Report 1995, Energy Information Administration, DOE/EIA-019(95), Aug. 1996.  
Current Annual GDP Excludes Income of Economic and Public Utilities



### Notes:

The third chart shows the relative size of petroleum and total energy expenditures as a share of the aggregate economy.

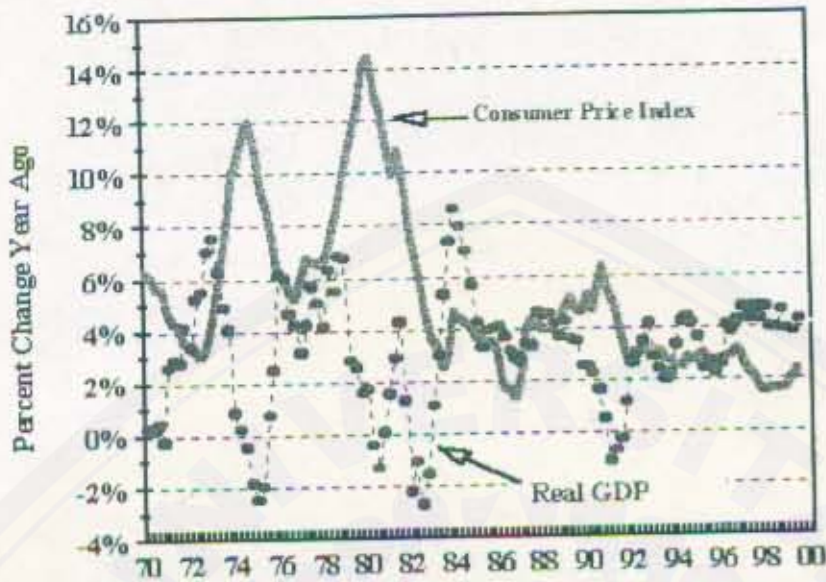
Prior to the embargo of 1973-74, total energy expenditures constituted 8 percent of the output of the economy, measured by GDP. The share of petroleum expenditures was just under 5 percent.

The price shocks of the 1970s and early 1980s resulted in the energy and petroleum shares rising dramatically to approximately 14 percent and 8 percent, respectively, by 1981.

Since that time, the shares have fallen consistently. Part of the reason is the decline in world oil prices. The other reason is the steady decline in energy intensity, measured by the energy to GDP ratio. This ratio has declined due to structural shifts in the economy and improvements in energy efficiency. By 1995, total energy expenditures had fallen to 7 percent of the economy, while petroleum had fallen even further, to 3.2 percent.

Also, since 1981, petroleum consumption as a share of total energy consumption has declined from 42 percent to 38 in 1995.

## Movements in Inflation & GDP



### Notes:

The second chart shows movements in CPI inflation and GDP growth, measured quarterly as a percent change from the prior year.

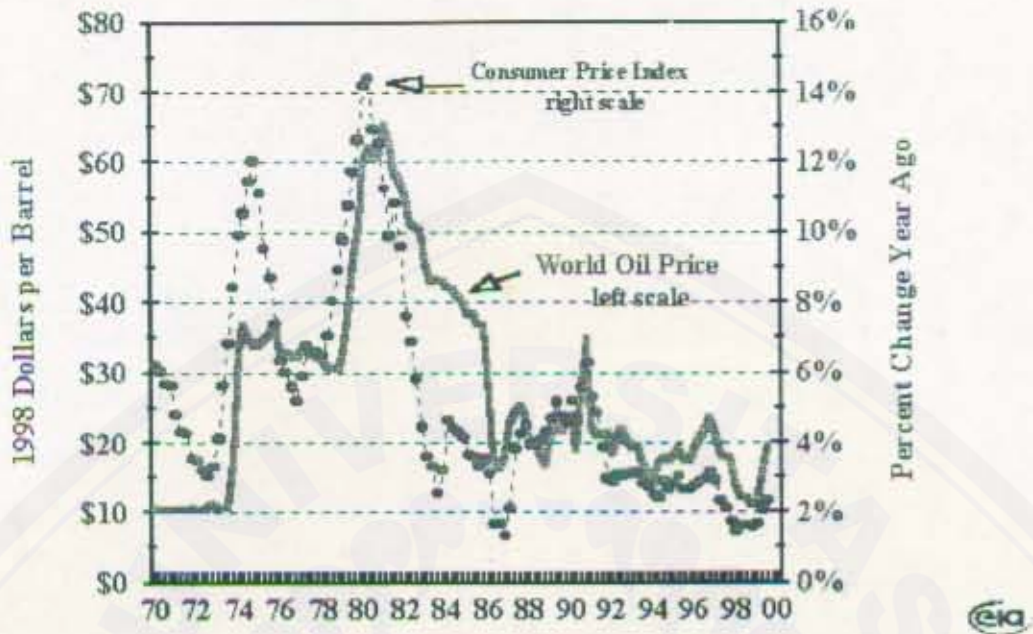
Looking from the 1970s forward, there are observable changes in GDP growth as the world oil price underwent dramatic change. The price shocks of 1973-74, the late 1970s/early 1980s, and early 1990's are all followed by first a decline in GDP growth and then a rebound.

Some have suggested that other circumstances exacerbated these output losses, such as price controls and other Federal policies. Nonetheless, the pressure of energy prices on aggregate prices in the economy created adjustment problems for the economy as a whole.

Current upward movements in the CPI are still moderated by the low level of core CPI inflation and worldwide competition in traded goods. If oil prices remain high, this will place continued pressure on prices of other commodities, in the United States and worldwide.

If higher oil prices continue to put upward pressure on CPI inflation, historical patterns suggest a downward adjustment of economic activity.

# Movements in World Oil Price & Inflation



### Notes:

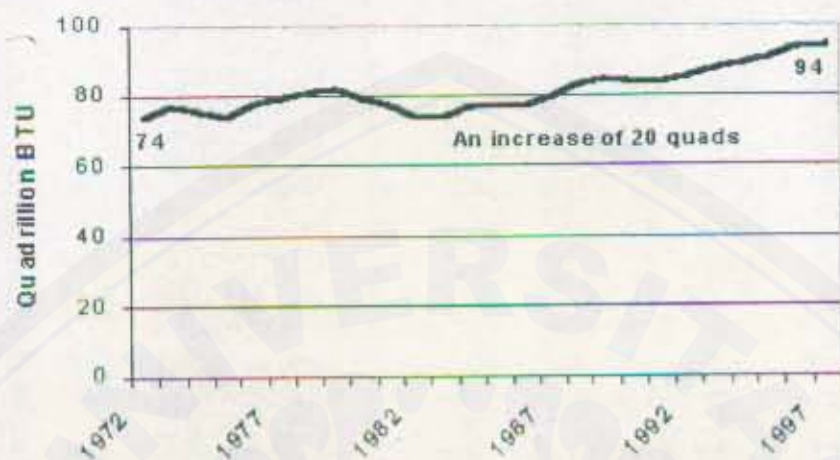
The first chart shows the relationship between quarterly movements in the world oil price and movements in the rate of inflation of the Consumer Price Index (CPI), measured on a quarterly basis as a percent change from the prior year.

Viewed from a long-term perspective, CPI inflation tracks movements in the world oil price. Not only do oil and other energy prices comprise a portion of the actual CPI, but downstream impacts on other commodity prices will have a lagged effect on the CPI.

Even in the past three years, when the world price of oil first fell steadily to about \$10 per barrel and then rose rapidly to \$20 per barrel (equivalent to WTI \$22), CPI inflation has tracked closely.

Overall, CPI inflation is still very low, principally because inflation in commodities other than energy and agriculture is extremely low. For 1999, the CPI rose by 2.7 percent, while core inflation rose by 1.9 percent, the lowest growth rate since 1965.

# U. S. Total Energy Consumption

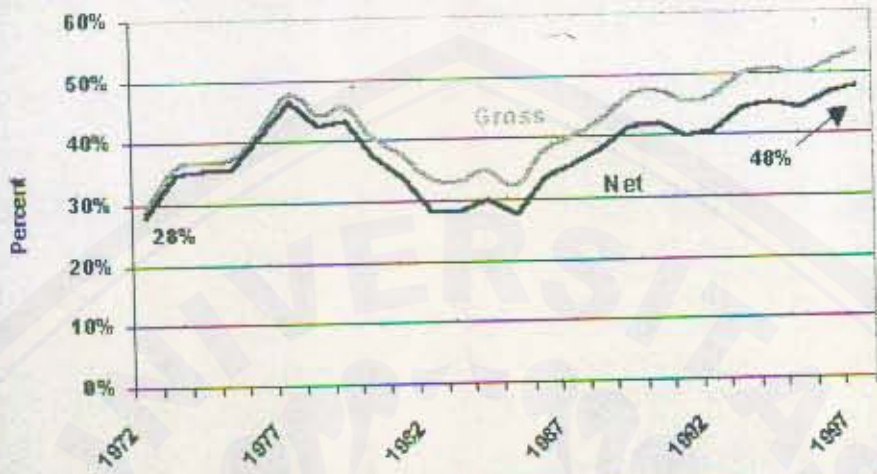


From 1972 to 1997 energy consumption increased by 20 quadrillion Btu-to 94.2 quadrillion Btu-a compound growth rate of about 1.0 percent.

The reductions in growth rate correspond to the 1974/75 and 1981/82 changes in economic growth.

Energy Information Administration, Annual Energy Review 1997, DOE/EIA-0384(97). (Washington, DC, July 1997), Table 1.3. Note: Data include an estimate of 3 quadrillion Btu for nonutility renewables prior to 1990.

## Imported Oil as a Percent of Total U. S. Consumption



The share of total U.S. consumption of imported oil declined significantly in the late 1970's and early 1980's. High oil prices prompted consumers to conserve energy and to switch to other fuels. U. S. dependence on imported oil has increased to record levels during the last 25 years. Net imports provide 48 percent of U.S. oil consumption – (net imports: imports minus exports). The share of total U.S. consumption of imported oil has grown since oil prices collapsed in 1986. Gross imports account for 53 percent of U.S oil consumption (gross imports: no offsets for oil exports).

Source: Energy Information Administration, Annual Energy Review 1997, DOE/EIA- 0384(97). (Washington, DC, 1998), Table 5.1.

## International Energy Outlook 2003

D1. World Oil Production Capacity by Region and Country, Reference Case, 1990-2025  
(Million Barrels per Day)

Region/Country	History (Estimates)		Projections				
	1990	2001	2005	2010	2015	2020	2025
<b>Persian Gulf</b>							
Bahrain	3.2	3.7	3.9	4.2	4.5	4.7	4.9
Iraq	2.2	2.8	3.2	3.6	4.2	4.6	5.2
Kuwait	1.7	2.4	2.8	3.3	3.9	4.5	5.1
Qatar	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8
Saudi Arabia	8.6	10.2	11.1	13.6	15.7	19.5	23.8
United Arab Emirates	2.5	2.7	2.9	3.4	4.0	4.8	5.4
<b>Total Persian Gulf</b>	<b>18.7</b>	<b>22.4</b>	<b>24.5</b>	<b>28.7</b>	<b>33.0</b>	<b>38.9</b>	<b>45.2</b>
<b>Other OPEC</b>							
Algeria	1.3	1.6	1.7	2.0	2.1	2.4	2.8
Indonesia	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Libya	1.5	1.7	1.7	2.0	2.2	2.6	2.9
Nigeria	1.8	2.2	2.3	2.6	3.1	3.5	3.8
Venezuela	2.4	3.2	3.4	3.9	4.4	5.0	5.6
<b>Total Other OPEC</b>	<b>8.5</b>	<b>10.2</b>	<b>10.6</b>	<b>12.0</b>	<b>13.3</b>	<b>15.0</b>	<b>16.6</b>
<b>Total OPEC</b>	<b>27.2</b>	<b>32.6</b>	<b>35.1</b>	<b>40.7</b>	<b>46.3</b>	<b>53.9</b>	<b>61.8</b>
<b>Non-OPEC</b>							
<b>Industrialized</b>							
United States	9.7	9.0	9.0	9.2	9.0	9.4	9.4
Canada	2.0	2.8	3.1	3.4	3.6	3.8	4.1
Mexico	3.0	3.6	3.8	4.2	4.5	4.6	4.8
Australia	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
North Sea	4.2	6.5	6.1	5.9	5.5	5.0	4.5
Other	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7
<b>Total Industrialized</b>	<b>20.1</b>	<b>23.2</b>	<b>23.4</b>	<b>24.3</b>	<b>24.1</b>	<b>24.3</b>	<b>24.3</b>
<b>Eurasia</b>							
China	2.8	3.3	3.5	3.6	3.5	3.5	3.4
Former Soviet Union	11.4	8.8	9.7	11.6	13.3	14.4	15.9
Eastern Europe	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
<b>Total Eurasia</b>	<b>14.5</b>	<b>12.3</b>	<b>13.5</b>	<b>15.5</b>	<b>17.1</b>	<b>18.3</b>	<b>19.7</b>
<b>Other Non-OPEC</b>							
Central and South America	2.3	3.8	4.3	4.7	5.7	6.2	6.7

Middle East	1.4	1.8	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7
Africa	2.2	3.0	3.4	3.9	4.9	5.6	6.7
Asia	1.7	2.5	2.5	2.6	2.8	2.7	2.6
Total Other Non-OPEC	7.6	11.1	12.2	13.4	15.8	17.0	18.7
Non-OPEC	42.2	46.6	49.1	53.2	57.0	59.6	62.7
World	69.4	79.2	84.2	93.9	103.3	113.5	124.5

OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries.  
 Sources: **History:** Energy Information Administration (EIA), Energy Markets and Contingency Information System; **Projections:** EIA, System for the Analysis of Global Energy Markets (2003); and U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, *World Petroleum Assessment 2000* (Reston, VA, July 2000).

For more information, contact us at...

Last modified on Tue May 20 18:14:55 UTC+0700 2003.  
[http://www.eia.doe.gov/oiaf/ico/tbl\\_d1.html](http://www.eia.doe.gov/oiaf/ico/tbl_d1.html)



Year	Difference
92	
97	-32.0
97	291.0
41	308.0
17	-17.0
11	-1.0
33	69.0
36	-29.0
0	0.0
58	-81.0
73	218.0
94	-183.0
95	63.0
0	0.0
57	-20.0
89	119.0
90	268.0
01	149.0
19	47.0
90	244.0

04	9.0
5	1.0
07	-68.0
40	209.0
98	108.0
45	-24.0
90	244.0
36	410.0

Year	Difference From Year Ago
2.9	-24.1
2.7	-12.7
3.1	-10.0
0.0	0.0
1.5	-5.4
1.1	2.7
0.0	-0.1
0.5	-0.1
1.7	-14.7
0.1	-1.4
1.5	-13.4
-1.4	0.2
0.3	-1.4
4.2	-42.6
5.4	-95.6
1.7	33.9
7.1	-61.7



Year	Asphalt and Road Oil	Aviation Gasoline	Distillate Fuel Oil	Jet Fuel	Kerosene	Liquefied Petroleum Gases		Lubricants	Motor Gasoline	Petroleum Coke	Residual Fuel Oil	Other <sup>2</sup>	Total	Change From Previous Year <sup>3</sup>
						Propane <sup>1</sup>	Total							
1949	157	93	902	[ <sup>4</sup> ]	281	NA	187	91	* 2,410	40	1,359	243	5,763	-
1950	180	108	1,062	[ <sup>4</sup> ]	323	NA	234	106	" 2,616	41	1,517	250	6,458	12.1
1951	198	145	1,225	[ <sup>4</sup> ]	338	NA	277	116	* 2,840	40	1,546	281	7,016	8.6
1952	213	189	1,303	55	331	NA	286	104	* 2,954	38	1,517	289	7,270	3.9
1953	216	194	1,337	94	314	NA	325	111	" 3,110	48	1,536	315	7,600	4.3
1954	230	178	1,442	126	324	NA	352	106	* 3,194	54	1,431	320	7,756	2.1
1955	254	192	1,592	154	320	NA	404	116	" 3,463	67	1,526	366	8,455	9.0
1956	272	204	1,683	197	321	NA	441	120	* 3,548	68	1,538	384	8,775	4.1
1957	263	201	1,688	" 216	279	NA	453	113	" 3,615	74	1,504	403	8,808	0.1
1958	280	223	1,790	* 275	284	NA	487	108	" 3,711	85	1,455	410	9,118	3.5
1959	298	209	1,808	" 325	262	NA	562	117	* 3,860	97	1,544	424	9,527	4.5
1960	302	161	1,872	" 371	271	NA	621	117	" 3,969	149	1,529	435	9,787	3.1
1961	311	158	1,902	" 415	266	NA	641	114	* 4,043	184	1,503	439	9,976	1.5
1962	332	143	2,007	" 489	269	NA	700	119	" 4,199	194	1,495	454	10,400	4.2
1963	340	137	2,047	" 522	266	NA	757	119	" 4,334	190	1,477	554	10,743	3.3
1964	346	127	2,050	" 558	253	NA	806	125	4,403	182	1,515	646	11,023	2.9
1965	368	120	2,126	602	267	NA	841	129	4,593	202	1,608	657	11,512	4.2
1966	396	105	2,185	670	277	NA	887	134	4,808	202	1,716	714	12,084	5.0
1967	379	90	2,242	824	274	618	944	121	4,958	205	1,786	737	12,560	3.9
1968	405	84	2,388	955	281	692	1,054	132	5,261	209	1,826	798	13,393	6.9
1969	417	70	2,466	981	275	784	1,221	134	5,526	221	1,978	838	14,137	5.3
1970	447	55	2,540	967	283	776	1,224	136	5,785	212	2,204	865	14,697	4.0
1971	458	49	2,661	1,010	249	794	1,251	135	6,014	219	2,296	870	15,212	3.5
1972	488	46	2,913	1,045	235	893	1,420	144	6,378	241	2,529	949	16,367	7.9
1973	522	45	3,092	1,059	216	872	1,449	162	6,674	261	2,822	1,005	17,308	5.5
1974	481	44	2,848	993	176	830	1,406	155	6,537	239	2,639	1,034	16,653	-3.9
1975	419	38	2,851	1,001	159	783	1,333	137	6,675	247	2,462	1,001	16,322	-2.0
1976	411	37	3,133	987	168	830	1,404	152	6,978	243	2,801	1,145	17,461	7.3
1977	436	39	3,352	1,039	175	821	1,422	180	7,177	268	3,071	1,284	18,431	5.3
1978	479	39	3,432	1,057	175	778	1,413	172	7,412	256	3,023	1,391	18,847	2.3
1979	476	38	3,311	1,076	188	849	1,582	180	7,034	246	2,826	1,546	18,513	-1.8

1982	352	2,671	1,013	127	751	1,509	146	6,622	229	1,421	1,042	15,231	-0.4
1983	373	2,690	1,046	127	751	1,509	146	6,622	229	1,421	1,042	15,231	3.5
1984	406	2,845	1,175	115	833	1,572	156	6,693	247	1,369	1,120	15,726	-0.3
1985	425	2,868	1,219	114	883	1,569	145	6,831	264	1,202	1,032	15,728	3.5
1986	448	2,914	1,307	88	831	1,512	142	7,034	268	1,418	1,105	16,281	2.4
1987	467	2,976	1,355	95	924	1,512	161	7,206	289	1,264	1,176	16,665	4.0
1988	485	3,122	1,449	96	923	1,656	155	7,336	312	1,378	1,266	17,283	-0.0
1989	453	3,157	1,459	84	990	1,668	169	7,329	307	1,370	1,264	17,325	-1.9
1990	483	3,021	1,522	43	917	1,555	164	7,235	339	1,229	1,373	16,968	-1.6
1991	444	2,921	1,471	46	982	1,689	146	7,188	328	1,158	1,269	16,714	2.2
1992	454	2,979	1,454	41	1,032	1,755	149	7,268	362	1,094	1,434	17,033	0.9
1993	474	3,041	1,469	50	1,006	1,794	152	7,476	368	1,080	1,373	17,237	2.8
1994	484	3,162	1,527	49	1,062	1,860	159	7,601	361	1,021	1,454	17,718	0.0
1995	486	3,207	1,514	54	1,096	1,899	156	7,789	365	852	1,361	17,725	3.6
1996	484	3,365	1,576	62	1,136	2,012	151	7,891	379	848	1,518	18,309	1.4
1997	505	3,435	1,599	66	1,170	2,038	160	8,017	377	797	1,605	18,620	1.6
1998	521	3,461	1,622	78	1,120	1,952	168	8,253	447	887	1,508	18,917	3.2
1999	547	3,572	1,673	73	1,246	2,195	169	8,431	477	830	1,532	19,519	1.2
2000	525	3,722	1,725	67	1,235	2,231	156	8,472	406	909	1,456	19,701	-0.8
2001 <sup>†</sup>	519	3,820	1,654	73	1,129	2,035	153	8,586	432	932	1,370	19,593	

R=Revised, P=Preliminary, NA=Not available, — = Not applicable.

Notes: • For the definition of petroleum products supplied, see Notes 1, 2, and 3 at end of section.  
 • Totals may not equal sum of components due to independent rounding

Web Page: [http://www.eia.doe.gov/bil\\_gas/petroleum/info\\_glance/petroleum.html](http://www.eia.doe.gov/bil_gas/petroleum/info_glance/petroleum.html)

Sources: • 1949-1975—Bureau of Mines, Mineral Industry Surveys, *Petroleum Statement, Annual, annual reports*. • 1976-1980—Energy Information Administration (EIA), *Energy Data Reports, Petroleum Statement, Annual, annual reports*. • 1981-2000—EIA, *Petroleum Supply Annual, annual reports*. • 2001—EIA, *Petroleum Supply Monthly* (February 2002).

Includes propane.

<sup>†</sup> Still gas (refinery gas), petrochemical feedstocks, waxes, natural gasoline, pentanes plus, and miscellaneous products. Beginning in 1984, includes special naphthas. Beginning in 1991, also includes negative barrels per day of distillate and residual fuel oil reclassified as unfinished oils, and other products (from both primary and secondary supply) reclassified as gasoline blending components. Beginning in 1983, also includes crude oil burned as fuel.

<sup>†</sup> Percent change from previous year calculated from data in thousand barrels per year.

<sup>†</sup> Included in the products from which jet fuel was blended. In 1952, 71 percent gasoline, 17 percent kerosene, and 12 percent distillate fuel.

## Petroleum Flow, 2001 (Million Barrels per Day)



[Back to Annual Energy Review](#)

[Back to EIA Home](#)

Page Last Modified: October 2002

Contact:

Leigh Carleton  
Phone: (202) 586-1132  
FAX: (202) 586-9753

URL: [./aer2001/diagrams/diagram2.html](#)

If you are having technical problems with this site, please contact the EIA Webmaster at [wmaster@eia.doe.gov](mailto:wmaster@eia.doe.gov)